

# KECAMATAN KIARACONDONG

**RENSTRA 2025 - 2029**





**PEMERINTAH KOTABANDUNG**  
**KECAMATAN KIARACONDONG**

Jalan Lapangan Radar Babakansari III, Kelurahan Babakansari  
**B A N D U N G**

---

**K E P U T U S A N**

**CAMAT KIARACONDONG KOTA BANDUNG**

NOMOR : PN.03.03/Kep.693a - Kec. Kc/XI/2025

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KIARACONDONG  
KOTA BANDUNG TAHUN 2025 - 2029**

**CAMAT KIARACONDONG KOTA BANDUNG**

**Menimbang:**

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang transparan, responsif, efektif, efisien dan akuntabel sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pemerintah, maka perlu dilakukan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dalam mendukung Rencana Pembangunan Daerah dalam satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan Daerah Bandung Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029, maka perlu dilakukan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah;  
dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Kiaracondong Kota Bandung.

**Mengingat:**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 8);
8. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Uraian Tugas serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 28).

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : Keputusan Camat Kiaracondong tentang Rencana Strategis Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2025 - 2029.
- KESATU : Rencana Strategis Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2025 - 2029, sebagaimana tercantum dalam lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2025 - 2029 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yang selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Kiaracondong Tahun 2025 - 2029 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2025 - 2029.
- KETIGA : Renstra Kecamatan Kiaracondong Tahun 2025 - 2029, sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kiaracondong Tahun 2025 - 2029.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada Tanggal : 13 November 2025

**CAMAT KIARACONDONG**



**Mochamad Arief Budiman, S.STP**  
Pembina Tk I/IV b  
NIP. 197712171996121001

## Kata Pengantar

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan Kasih sayang-Nya dalam membimbing dan memberi kekuatan sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 - 2029 Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung ini dapat disusun dan diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Renstra 2025 - 2029 Perangkat Daerah disusun sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029.

Rencana Strategis (Renstra) 2025 - 2029 Kecamatan Kiaracondong merupakan dokumen pedoman Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Kiaracondong yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaannya, sekaligus sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja selama 5 tahun dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam mencapai tujuan Kecamatan guna mewujudkan Visi dan Misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2025 - 2029.

Pada kesempatan baik ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyelesaian



dokumen ini, jajaran aparat di lingkungan Pemerintahan Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dan masyarakat yang telah mendukung penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Daerah Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung tahun 2025 - 2029.

Semoga apa yang disusun dalam dokumen perencanaan ini dapat dijadikan pedoman dan memberi manfaat bagi pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Kiaracondong khususnya dan masyarakat Kota Bandung pada umumnya.

Billahi Taufik Wal Hidayah.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**Camat Kiaracondong**



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	iii
<b>DAFTAR TABEL</b>	v
<b>DAFTAR GRAFIK</b>	vi
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	vi
<b>DAFTAR DIAGRAM</b>	vi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.3.1 Maksud	6
1.3.2 Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
<b>BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN KIARACONDONG</b>	<b>9</b>
2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Kiaracondong	9
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Kiaracondong	9
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	23
2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Kiaracondong	36
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Kiaracondong	61
2.1.5 Mitra Kecamatan Kiaracondong	62
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis	66
2.2.1 Permasalahan Kecamatan Kiaracondong	66
2.2.2 Isu-Isu Strategis	73
<b>BAB 3 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>84</b>
3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Kiaracondong Tahun 2025 - 2029	84
3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Kiaracondong Tahun 2025 - 2029	86
3.3 Analisis Lingkungan Strategis Kecamatan Kiaracondong	89
3.3.1 Identifikasi Kekuatan dan Kelemahan	89
3.3.2 Perumusan Strategi	93



3.4	Strategi Kecamatan Kiaracondong Tahun 2025 – 2029	95
3.5	Arah Kebijakan Kecamatan Kiaracondong Tahun 2025 – 2029	97
<b>BAB 4</b>	<b>PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN</b>	<b>99</b>
4.1	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kecamatan Kiaracondong Tahun 2025 – 2029	99
4.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kiaracondong Tahun 2025 – 2029	121
<b>BAB 5</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>132</b>



## DAFTAR TABEL

2.1	Jumlah Luas Area Kelurahan	24
2.2	Jumlah Pegawai Kecamatan Kiaracondong	31
2.3	Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Kecamatan Kiaracondong	32
2.4	Sarana dan Prasarana Pendukung Indikator Kinerja Kecamatan	33
2.5	Realisasi Anggaran Belanja Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2019 – 2024	35
2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2020 – 2024	38
2.7	Data Stunting Kecamatan Kiaracondong Tahun 2023 – 2024	55
2.8	Data DTSEN Kecamatan Kiaracondong Tahun 2025	56
2.9	Data Cluster Produksi Sampah Kecamatan Kiaracondong	57
2.10	Data Mikro Kelurahan Kecamatan Kiaracondong Tahun 2024	57
2.11	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2020 – 2024	60
2.12	Kelompok Sasaran Layanan	61
2.13	Data Mitra Kecamatan Kiaracondong Dalam Pemberian Pelayanan	62
2.14	Permasalahan Kecamatan Kiaracondong	69
2.15	Perumusan Isu Strategis Kecamatan Kiaracondong Tahun 2025 – 2029	82
3.1	Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Kecamatan Kiaracondong Tahun 2025 – 2029	87
3.2	Identifikasi Lingkungan Strategis	89
3.3	Matriks Analisis SWOT	94
3.4	Strategi Pembangunan Kecamatan Kiaracondong Tahun 2025 – 2029	96
3.5	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	98
4.1	Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2025 – 2029	103
4.2	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung 2025 – 2029	111
4.3	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kiaracondong	122
4.4	Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	129



## DAFTAR GRAFIK

2.1	RW dan RT Kecamatan Kiaracondong	26
2.2	Kelompok Umur Masyarakat Kecamatan Kiaracondong	30
2.3	Nilai IKM Kecamatan Kiaracondong Tahun 2020 – 2024	39
2.4	Capaian Persentase Kelurahan Unggul Tahun 2020 – 2024	41
2.5	Capaian Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul Tahun 2021 – 2023	45
2.6	Capaian Persentase Siskamling RW Aktif Tahun 2021 – 2023	51

## DAFTAR GAMBAR

2.1	Bagan Struktur Organisasi Kecamatan	22
2.2	Luas Wilayah Kecamatan Kiaracondong	23
2.3	Peta Kecamatan Kiaracondong	25
2.4	Pembagian Wilayah Kecamatan Kiaracondong	26
2.5	Agenda Pembangunan Global	73
2.6	Tantangan Domestik SDGs Pada Tata Kelola Pelayanan Publik dan Kewilayahan	74
2.7	Asta Cita sebagai Prioritas Pembangunan	75
2.8	Visi dan Misi Jawa Barat Tahun 2025 – 2029	76
4.1	Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah	100

## DAFTAR DIAGRAM

2.1	Luas Wilayah per Kelurahan Kecamatan Kiaracondong	24
2.2	Penduduk Kecamatan Kiaracondong	27
2.3	Pendidikan Masyarakat Kecamatan Kiaracondong	28
2.4	Mata Pencaharian Masyarakat Kecamatan Kiaracondong	29

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, maka diperlukan penyelarasan RPJMD Tahun 2025 - 2029 dengan RPJMN Tahun 2025 - 2029. Penyelarasan ini mencakup penyelarasan kinerja dan periodisasinya. Aspek penyelarasan dimaksud bermakna bahwa disamping RPJMD Tahun 2025 - 2029 menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah, dan wakil kepala daerah terpilih, sekaligus juga merupakan bagian dari upaya mendukung secara seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian 8(delapan) Asta Cita, 17(tujuh belas) Program Prioritas, dan 8(delapan) Proyek Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025 - 2029.

Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahun 2025 - 2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai periodisasi dan substansinya baik untuk Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah (PD). Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dijabarkan oleh dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra PD, selanjutnya dioperasionalkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Definisi Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5(lima) tahun sesuai dengan ketentuan umum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD

(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan Renstra PD (Rencana Strategis Perangkat Daerah) tahun 2025 – 2029.

*Nilai Strategis* dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah bahwa dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kiaracundang dibuat untuk menjabarkan rangkaian kinerja yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan dengan menggambarkan kebermanfaatannya Kecamatan Kiaracundang berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD. Disamping itu juga Renstra Kecamatan Kiaracundang merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan yang di antaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus, dan penentuan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan di masyarakat yang dinamis.

## 1.2 Landasan Hukum

Memuat tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah, landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kiaracandong Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 Tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah



- Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 5);
  15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 8);
  16. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Uraian Tugas serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 28);

## 1.3 Maksud dan Tujuan

### 1.3.1 Maksud

Maksud Penyusunan Renstra Kecamatan Kiaracondong Tahun 2025–2029 adalah untuk memberikan arahan bagi penyelenggaraan bidang urusan/unsur kewilayahan atau Kecamatan yang mendukung pelaksanaan tahapan pertama perencanaan pembangunan jangka panjang Kota Bandung.

### 1.3.2 Tujuan

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kiaracondong mulai tahun 2025 hingga tahun 2030;
2. Sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada bidang urusan/unsur kewilayahan Kecamatan.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kiaracundang Kota Bandung mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang terdiri dari 5 (lima) bab sebagai berikut:

**Bab 1 : Pendahuluan**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

**Bab 2 : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Kiaracundang**

- 2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Kiaracundang
  - 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Kiaracundang
  - 2.1.2 Kiaracundang
  - 2.1.3 Sumber Daya Kecamatan Kiaracundang
  - 2.1.4 Kinerja Pelayanan Kecamatan Kiaracundang
  - 2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan
  - 2.1.6 Mitra Kecamatan Kiaracundang
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis
  - 2.2.1 Permasalahan
  - 2.2.2 Isu Strategis

**Bab 3 : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

- 3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Kiaracundang Tahun 2025-2029
- 3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Kiaracundang Tahun 2025-2029
- 3.3 Analisis Lingkungan Strategis Kecamatan Kiaracundang



- 3.4 Strategi Kecamatan Kiaracandong dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Kiaracandong Tahun 2025-2029
  - 3.5 Arah Kebijakan Kecamatan Kiaracandong dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Kiaracandong Tahun 2025-2029
- Bab 4 : Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**
- 4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kecamatan Kiaracandong Tahun 2025 - 2029
  - 4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kiaracandong
- Bab 5 : Penutup**

## BAB 2

# GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN KIARACONDONG

## 2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Kiaracondong

### 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Kiaracondong

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 28 tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Uraian Tugas serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Kedudukan Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya, Kecamatan Kiaracondong mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan;
2. Pelayanan publik; dan
3. Pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan

Uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Uraian Tugas serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Bandung, sebagai berikut :

## **Camat**

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan Wali Kota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Camat mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- g. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota dan untuk melaksanakan tugas pembantuan. Adapun uraian tugas dimaksud sebagai berikut :

- a) merumuskan dan menetapkan Renstra, Renja, Program Kerja, anggaran dan kinerja Kecamatan berdasarkan kebijakan umum daerah kota sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) membina dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Wali Kota agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;

- c) mengoordinasikan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan;
- d) mengoordinasikan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah kerja Kecamatan;
- e) mengoordinasikan penyelenggaraan sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan;
- f) mengoordinasikan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- g) mengoordinasikan penyelenggaraan sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan;
- h) mengoordinasikan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum yang melibatkan swasta;
- i) mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- j) mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- k) mengoordinasikan pencapaian standar pelayanan minimal di Kecamatan;
- l) mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan administrasi umum pemerintahan dan pelayanan administrasi pertanahan;
- m) penyusunan Laporan Kinerja Daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, LKPD, LAKIP dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan
- o) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Sekretaris Camat**

Sekretaris Camat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup kesekretariatan, yang meliputi pengelolaan umum, kepegawaian data dan Informasi, pengelolaan keuangan, pengoordinasian penyusunan program serta pengkoordinasian tugas-tugas seksi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris Camat mempunyai uraian tugas :

- a) merencanakan program, kegiatan dan kinerja lingkup Sekretariat dan mengoordinasikan penyusunan rencana kerja, program kerja dan anggaran Kecamatan berdasarkan kebijakan operasional Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) membina dan mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan melaksanakan dan pengoordinasian penyusunan rencana kerja, program kerja, dan anggaran Kecamatan berdasarkan kebijakan operasional Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c) mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum, kepegawaian, data dan informasi, pengeolaan keuangan, pengoordinasian penyusunan program, serta pengoordinasian tugas-tugas seksi;
- d) mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata naskah dinas lingkup Sekretariat dan Kecamatan;
- e) mengoordinasikan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan membina bawahan dengan cara memotifasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup Sekretariat, Sub Bagian dan Seksi;
- f) mengoordinasikan manajemen kepegawaian lingkup Kecamatan;
- g) mengoordinasikan penatausahaan BMD;
- h) mengoordinasikan penatausahaan keuangan Kecamatan;

- i) mengoordinasikan penyusunan data dan informasi bahan penetapan rencana kerja daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja, serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - j) mengoordinasikan penyusunan bahan penetapan laporan kinerja daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - k) mengoordinasikan pengolahan, penataan dan penyimpanan data/atau informasi publik di lingkungan Kecamatan;
  - l) mengoordinasikan pelayanan informasi publik;
  - m) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup sekretariat dan Kecamatan; dan
  - n) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- o) **Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi**

Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Camat lingkup Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi.

Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi mempunyai uraian tugas :

- a) menyusun rencana program kerja dan bahan kinerja lingkup Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi;
- b) membina, membagi dan mengarahkan tugas berdasarkan arah kebijakan umum Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- c) melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi persuratan yang meliputi penerimaan, pencatatan, pendistribusian dan pengiriman naskah dinas;
- d) melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan kegiatan rapat-rapat kedinasan, kehumasan dan keprotokolan;

- e) melaksanakan pengelolaan kearsipan naskah dinas dan dokumentasi kedinasan serta pengelolaan perpustakaan Kecamatan;
- f) melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan kerumahtanggaan, kebersihan, keindahan, ketertiban lingkungan, dan keamanan serta pelayanan administrasi Kecamatan;
- g) melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;
- h) melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;
- i) melaksanakan pengumpulan dan pengolahan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan cuti pegawai, kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, Tabungan Perumahan, asuransi kesehatan pegawai, Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan dan administrasi kepegawaian lainnya;
- j) melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi pengembangan karier, pemberian penghargaan, peningkatan kesejahteraan pegawai dan pengembangan kompetensi;
- k) melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan penilaian prestasi kerja pegawai dan pengelolaan hukuman disiplin pegawai;
- l) melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi penatausahaan BMD lingkup Kecamatan;
- m) melaksanakan pengolahan, penataan dan penyimpanan data dan/atau informasi publik di lingkungan Kecamatan;
- n) melaksanakan pelayanan informasi publik;
- o) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan

- p) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

o **Sub Bagian Program dan Keuangan**

Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Camat lingkup program dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas :

- a) menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Sub Bagian Program dan Keuangan;
- b) membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- c) melaksanakan pengumpulan data bahan penyusunan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Kecamatan;
- d) melaksanakan penatausahaan keuangan Kecamatan;
- e) menganalisis data untuk bahan penyusunan rancangan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan;
- f) melaksanakan penyusunan bahan dan pembuatan daftar gaji dan tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN);
- g) melaksanakan pengoordinasian, penyiapan bahan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Kecamatan;
- h) melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan bahan Renstra, Renja, program kerja dan anggaran serta kinerja Kecamatan;
- i) melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas;
- j) melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi program dalam rangka penyiapan bahan rencana kerja daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD serta rencana kerja lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- k) melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan bahan penetapan laporan kinerja Daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan-laporan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- l) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- m) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3 Seksi Pemerintahan**

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai uraian tugas :

- a) menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Pemerintahan;
- b) membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- c) melaksanakan pelayanan administrasi pertanahan;
- d) melaksanakan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil serta domisili orang asing;
- e) melaksanakan pembinaan Rukun Warga dan Rukun Tetangga;
- f) memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan pelayanan pemerintahan dengan instansi terkait;
- g) membantu Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pertanahan;
- h) melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan Kelurahan;
- i) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan

- j) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4 Seksi Ketenteraman dan Ketertiban**

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di lingkup ketenteraman dan ketertiban.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai uraian tugas :

- a) menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
- b) membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- c) melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban serta penegakan peraturan daerah dan peraturan Wali Kota;
- d) melaksanakan pembinaan potensi perlindungan masyarakat;
- e) melaksanakan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan bencana;
- f) memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan ketenteraman dan ketertiban dengan instansi terkait;
- g) membantu Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- h) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- i) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **5 Seksi Ekonomi dan Pembangunan**

Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup ekonomi dan pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai uraian tugas :

- a) menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- b) membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- c) melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan;
- d) melaksanakan fasilitasi bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- e) melaksanakan inventarisasi potensi ekonomi masyarakat dan pembangunan;
- f) melaksanakan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana fisik fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- g) melaksanakan fasilitasi upaya pelestarian lingkungan hidup dan pelaksanaan program kebersihan dan keindahan;
- h) memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi dan ketahanan pangan, dan pembangunan dengan instansi terkait;
- i) membantu Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pangan, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, penanaman modal, statistik, persandian, perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian;

- j) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- k) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **6 Seksi Kesejahteraan Sosial**

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang Kesejahteraan Sosial.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai uraian tugas :

- a) Menyusun rencana kerja dan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial;
- b) membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- c) melaksanakan inventarisasi potensi bidang kesejahteraan sosial;
- d) melaksanakan pembinaan terhadap lembaga kesejahteraan sosial ditingkat Kecamatan dan Kelurahan;
- e) memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan kesejahteraan sosial dengan instansi terkait;
- f) membantu Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang pendidikan, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- g) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- h) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **7 Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi.

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai uraian tugas berikut :

- a) menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- b) membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- c) melaksanakan inventarisasi potensi bidang pemberdayaan masyarakat;
- d) melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga lainnya di tingkat Kecamatan;
- e) memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan instansi terkait;
- f) membantu Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, pariwisata, transmigrasi;
- g) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- h) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Lurah**

Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan. Kelurahan dipimpin oleh Lurah dan bertanggung jawab kepada Camat. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Lurah mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
- b. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- d. Pemelihara ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Pemelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat;
- g. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

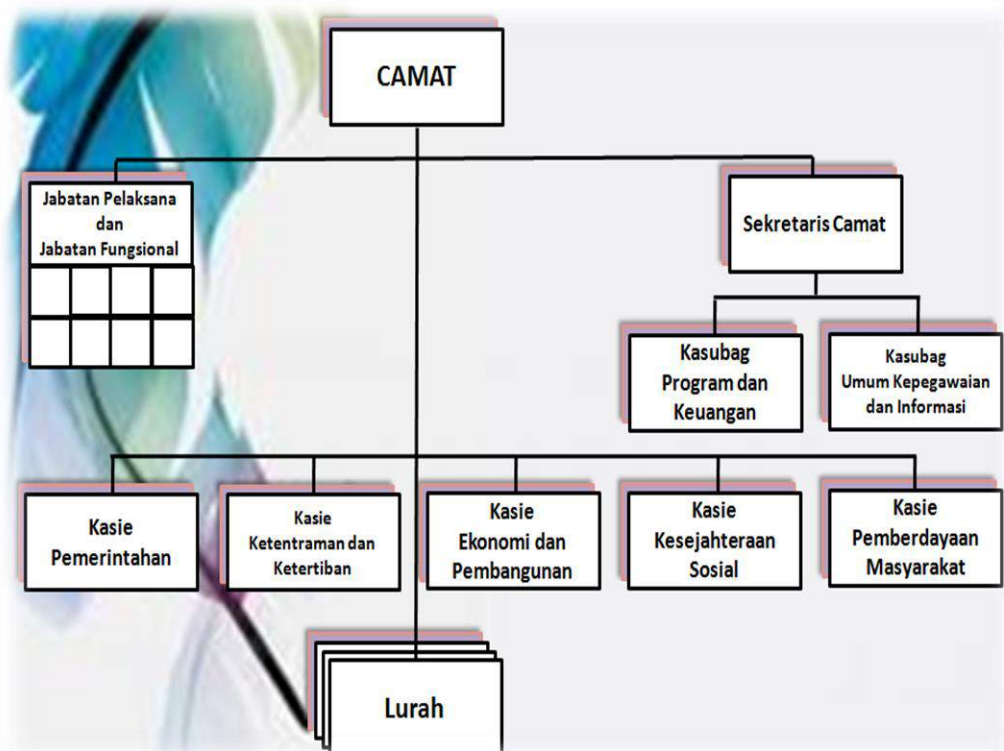
Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Lurah juga melaksanakan uraian tugas sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Kelurahan;
- b) Membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- c) Melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
- d) Melaksanakan pemberdayaan dan pendampingan masyarakat Kelurahan;
- e) Melaksanakan pelayanan masyarakat;
- f) Melaksanakan pemelihara ketentraman dan ketertiban umum;
- g) Melaksanakan pemelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h) Melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- i) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- j) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Kecamatan Kiaracondong berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Uraian Tugas serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung sebagai berikut :

Gambar 2.1

**Bagan struktur organisasi Kecamatan**



## 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.1.2.1 Demografi dan Geografi Kecamatan Kiaracondong

Gambar 2.2

#### Luas Wilayah Kecamatan Kiaracondong



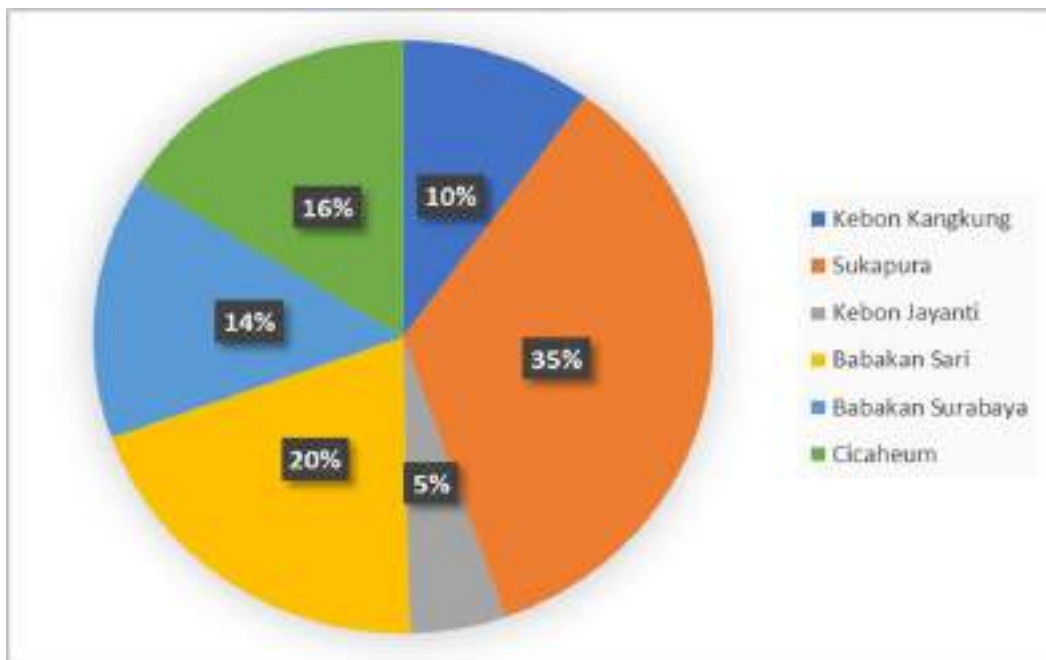
Secara astronomis Kecamatan Kiaracondong berada di titik koordinat -6.9241819 LS, 107.6481682 BT dengan posisi geografisnya memiliki batas-batas : sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Cibeunying Kidul, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Buahbatu, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Batununggal, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Antapani.

Kecamatan Kiaracondong terletak pada ketinggian 681 meter di atas permukaan laut (dpl), luas wilayah 5,8 km<sup>2</sup> yang terbagi menjadi 6 Kelurahan diantaranya Kelurahan Sukapura, Kelurahan Kebon Jayanti,

Kelurahan Babakan Surabaya, Kelurahan Cicaheum, Kelurahan Babakansari dan Kelurahan Kebon Kangkung. Kelurahan terluas adalah Kelurahan Sukapura dengan luas wilayah 2,01 km<sup>2</sup>, sedangkan Kelurahan dengan luas wilayah terkecil adalah Kelurahan Kebon Jayanti dengan luas wilayah 0,29 km<sup>2</sup>.

Diagram 2.1

**Luas Wilayah per Kelurahan Kecamatan Kiaracandong**



Tabel 2.1  
**Jumlah Luas Area Kelurahan**

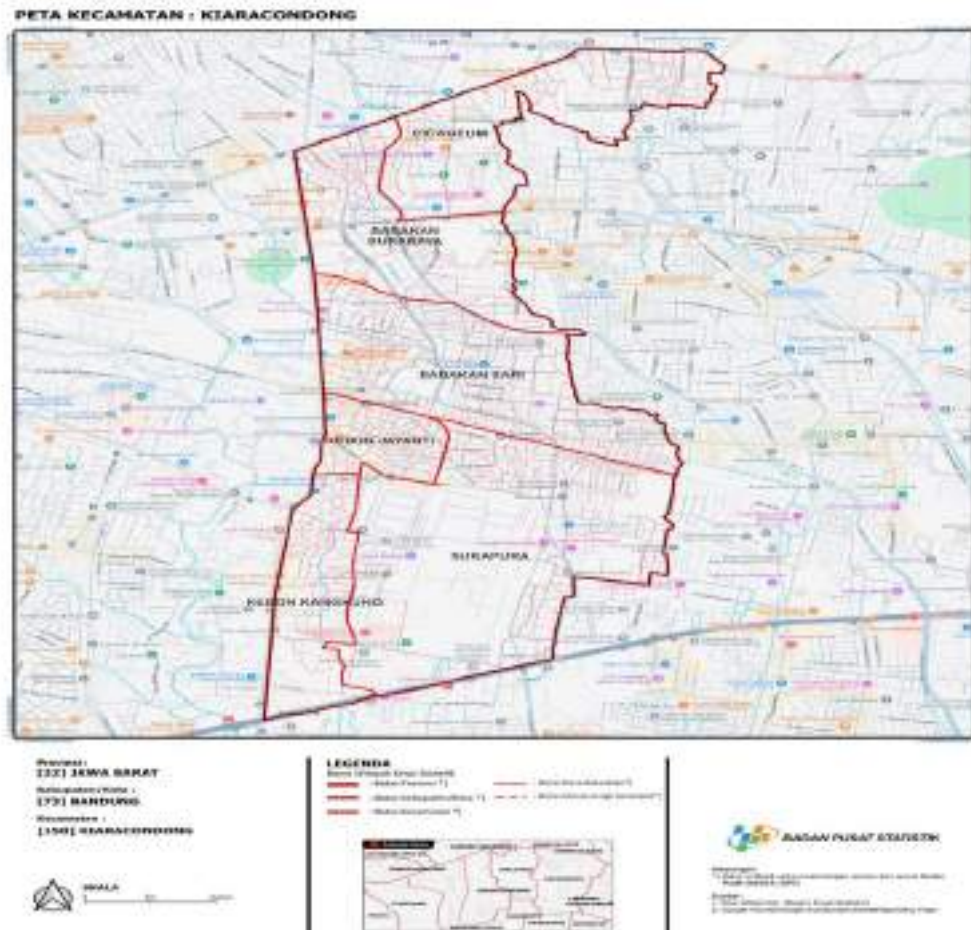
Kelurahan Subdistrict	Luas Total Area (km <sup>2</sup> /sq.km)	Persentase terhadap Luas Kecamatan Percentage to District Area
(1)	(2)	(3)
Sukapura	2,01	34,65
Kebon Jayanti	0,29	5,00
Babakan Surabaya	0,83	14,31
Cicaheum	0,94	16,21
Babakansari	1,15	19,83
Kebon kangkung	0,58	10
<b>Kecamatan District</b>	<b>5,8</b>	<b>100</b>

Sumber : Kecamatan Kiaracandong Tahun 2025



Gambar 2.3

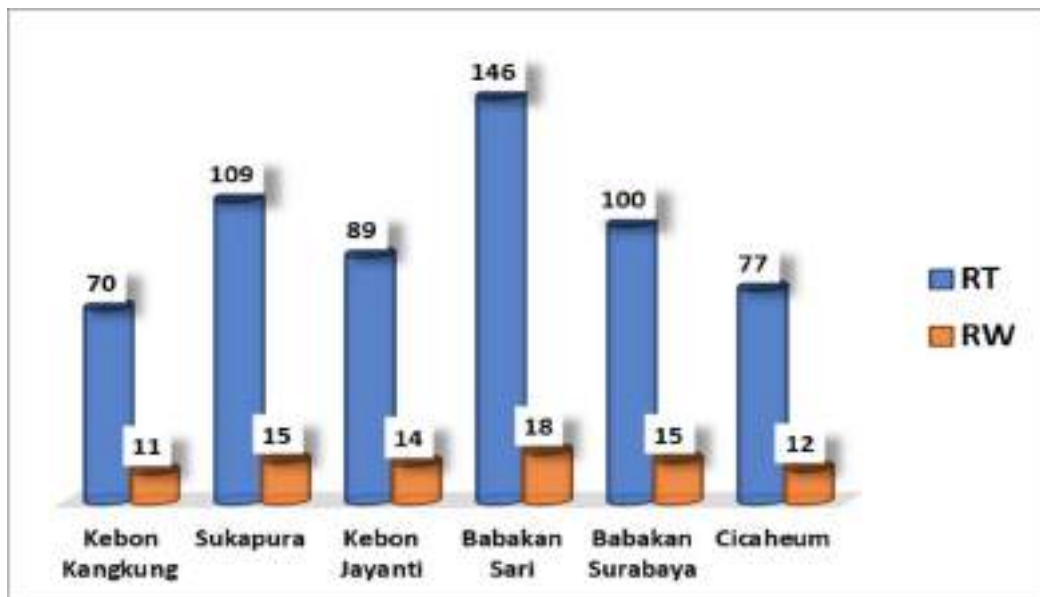
**Peta Kecamatan Kiaracondong**



Gambar 2.4  
**Pembagian Wilayah Kecamatan Kiaracondong**



Grafik 2.1  
**RW dan RT Kecamatan Kiaracondong**

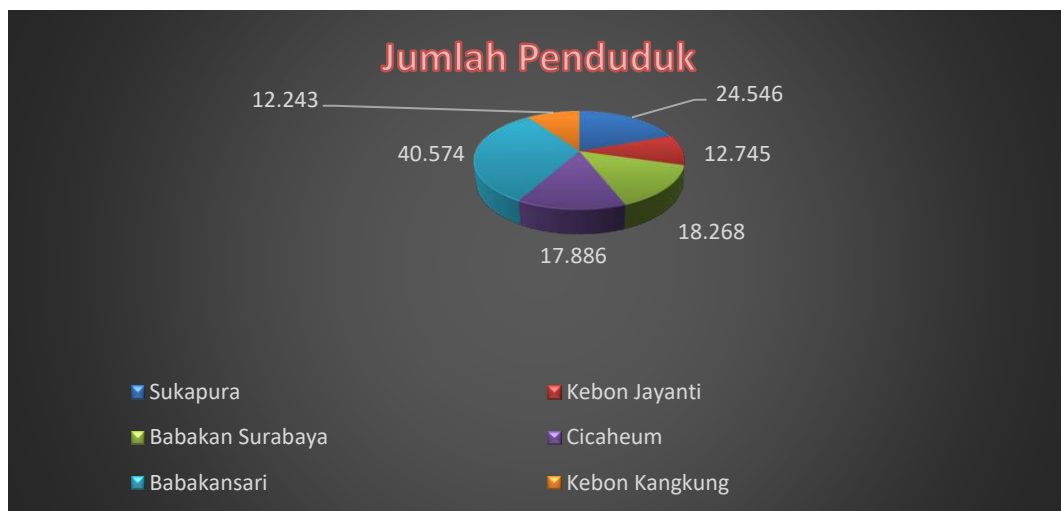


Kecamatan Kiaracondong terdiri dari 6 Kelurahan, dimana setiap Kelurahan terdiri dari Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT). Jumlah RW sebanyak 85 RW dan jumlah RT sebanyak 591 RT, dimana Kelurahan Babakansari memiliki RW dan RT terbanyak yaitu 18 RW dan 146 RT, sedangkan Kelurahan Kebon Kangkung memiliki RW dan RT terkecil yaitu 11 RW dan 70 RT.

### 2.1.2.2 Populasi Penduduk Kecamatan Kiaracondong

Diagram 2.2

#### Penduduk Kecamatan Kiaracondong

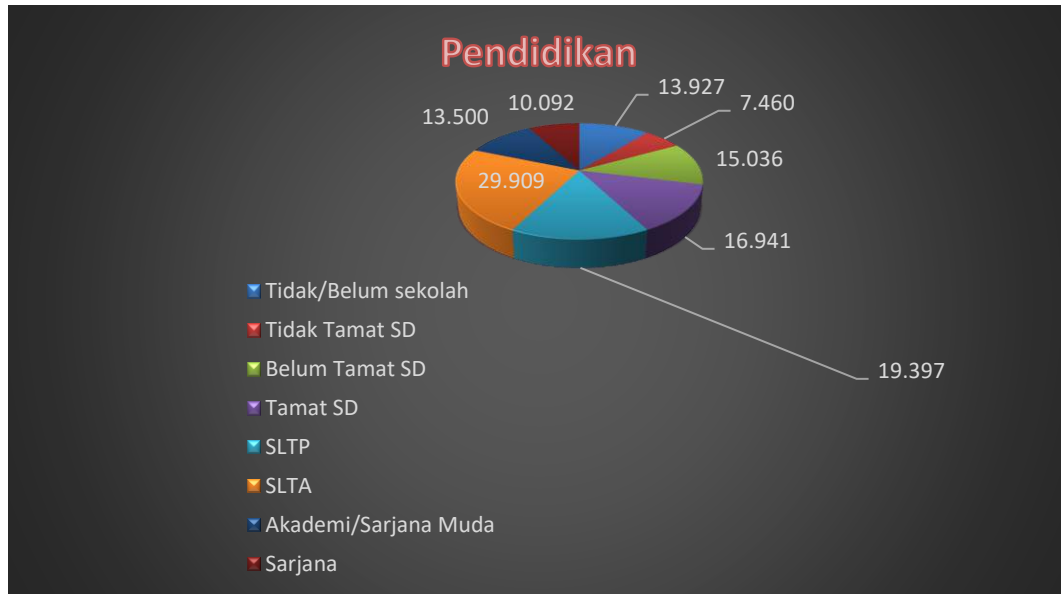


Sumber : Kasi Pemerintahan Kecamatan Juni 2025

Pada diagram 2.2 menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbesar ada di wilayah Kelurahan Babakansari mencapai 32,13 % dari total penduduk sejumlah 126.262 jiwa dengan memiliki kepadatan penduduk sebesar 35,28 ribu jiwa/km<sup>2</sup>, sedangkan jumlah penduduk terkecil ada di wilayah Kelurahan Kebon Kangkung mencapai 9,70 % dengan memiliki kepadatan penduduk sebesar 21,10 ribu jiwa/km<sup>2</sup>. Kelurahan Sukapura mencapai 19,44 % dengan kepadatan penduduk sebesar 12,21 ribu jiwa/km<sup>2</sup>, hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat lahan produktif yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat seperti lahan pertanian dan perkebunan, serta industry PT. Pindad (Persero).

Diagram 2.3

**Pendidikan Masyarakat Kecamatan Kiaracondong**

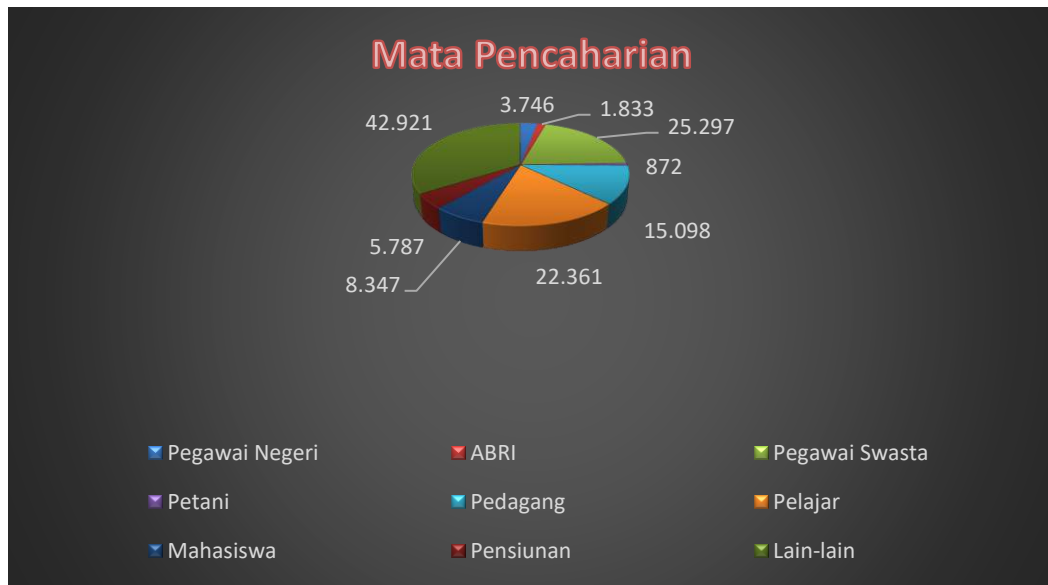


Sumber : Kasi Pemerintahan Kecamatan Juni 2025

Pada diagram 2.3 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Kiaracondong lebih didominasi pada lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sebesar 23,69 %. Lulusan Akademi dan Sarjana mencapai 18,68 %, lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) mencapai 15,36 % sedangkan lulusan di bawah tingkat SLTP mulai tidak/belum sekolah sampai dengan lulusan Sekolah Dasar (SD) hampir mencapai 42,27 %. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan di wilayah Kecamatan Kiaracondong perlu mendapatkan perhatian khusus mengingat pendidikan merupakan kunci keberhasilan dalam memajukan berbagai aspek kehidupan, baik individu maupun masyarakat.

Diagram 2.4

### Mata Pencaharian Masyarakat Kecamatan Kiaracundang



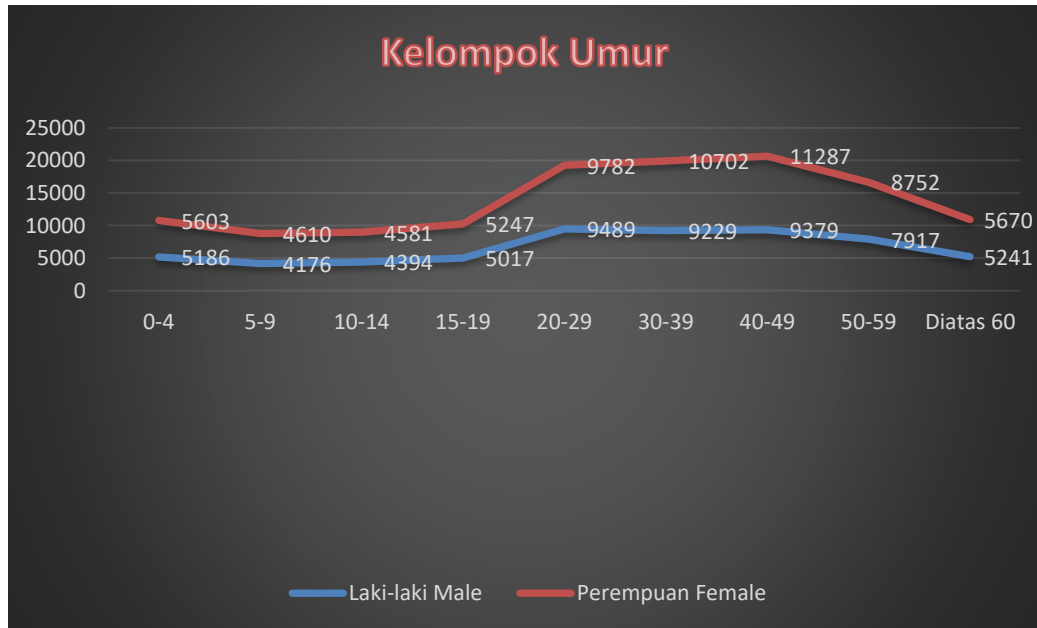
Sumber : Kasi Pemerintahan Kecamatan Juni 2025

Pada diagram 2.4 menunjukkan bahwa mata pencaharian masyarakat Kecamatan Kiaracundang lebih banyak didominasi dengan mata pencaharian lain-lain atau bervariasi sebanyak 34 %, sedangkan terkecil adalah petani sebesar 0,69 % dari jumlah penduduk Kecamatan Kiaracundang, hal ini sebanding dengan luas lahan pertanian sejumlah 17,03 Ha. Pegawai swasta sebanyak 20,04 %, Pegawai Negeri sebanyak 2,97 %, TNI/Polri sebanyak 1,45 %, Pedagang sejumlah 11,96 %, Pensiunan sebanyak 4,58 % dan Pelajar/Mahasiswa sebanyak 24,32 %.

Dengan berbagai macam mata pencaharian yang ada di kewilayahan Kecamatan Kiaracundang, dapat menjadi sumber daya manusia untuk berpotensi menggerakkan roda perekonomian masyarakat untuk meningkatkan taraf kehidupan di wilayah sekitarnya.

Grafik 2.2

**Kelompok Umur Masyarakat Kecamatan Kiaracundang**



Berdasarkan diagram dan grafik tersebut diatas menunjukkan, bahwa Kelurahan Babakansari merupakan penduduk terpadat mencapai 32 % dengan rata-rata pendidikan tertinggi SLTA mencapai 24 %, mata pencaharian lain-lain 34 % dari jumlah seluruh masyarakat yang ada di Kecamatan Kiaracundang. Sedangkan di kelompok umur usia balita (0-4) tahun mencapai 8,54 % dan anak-anak (5-9) mencapai 6,96 % dari jumlah penduduk Kecamatan Kiaracundang yang sangat rentan terhadap penyakit dan kesehatan.

**2.1.2.3 Sumber Daya Manusia Kecamatan Kiaracundang**

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu dirancang sesuai kebutuhan terutama dalam menciptakan Kecamatan Kiaracundang sebagai perangkat daerah yang unggul. Berdasarkan hasil asistensi kebutuhan Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional di Kecamatan Kiaracundang pada Tahun 2024 terdapat 100 orang pegawai, baik Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional, ataupun Jabatan Fungsional Umum, yang idealnya terisi untuk memenuhi kebutuhan beban kerja dalam melaksanakan

tugas pokok dan fungsinya secara sempurna. Berikut data pegawai di Kecamatan Kiaracandong Kota Bandung pada Bulan Juli 2025 :

Tabel 2.2

**Jumlah Pegawai Kecamatan Kiaracandong**

No.	LOKASI	PEGAWAI						JUMLAH		SELISIH KURANG PEGAWAI
		Jabatan Struktural Esselon III		Jabatan Struktural Esselon IV		Jabatan Fungsional/ Fungsional Umum (PNS dan PPPK)		Exisiting	Ideal	
		Exisiting	Ideal	Exisiting	Ideal	Exisiting	Ideal			
1.	Kecamatan Kiaracandong	1	2	4	7	7	25	12	34	22
2.	Kelurahan Sukapura	-	-	4	5	-	6	4	11	7
3.	Kelurahan Kebon Jayanti	-	-	5	5	1	6	6	11	5
4.	Kelurahan Babakan Surabaya	-	-	5	5	1	6	6	11	5
5.	Kelurahan Cicaheum	-	-	4	5	1	6	5	11	6
6.	Kelurahan Babakansari	-	-	4	5	-	6	4	11	7
7.	Kelurahan Kebon Kangkung	-	-	2	5	1	6	3	11	8
<b>JUMLAH</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>28</b>	<b>37</b>	<b>11</b>	<b>61</b>	<b>40</b>	<b>100</b>	<b>60</b>

Sumber : Sekretariat Kecamatan Kiaracandong Tahun 2025

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah pemangku jabatan di Kecamatan Kiaracandong hanya terdiri dari 40 pegawai, sementara berdasarkan Analisa Beban Kerja dibutuhkan 100 pegawai, yang artinya hanya 40% kebutuhan akan pegawai terpenuhi di Kecamatan Kiaracandong. Banyaknya kekosongan pegawai ini beresiko pada menurunnya produktivitas dan kualitas pelayanan publik yang sudah menjadi tugas pokok dan fungsi dari Kecamatan Kiaracandong untuk dipenuhi kepada masyarakat.

### 2.1.2.4 Aset, Sarana dan Prasarana

Pada saat ini Kecamatan Kiaracondong menempati gedung baru, di Jalan Radar Babakansari III, Kelurahan Babakansari Kota Bandung. Bangunan gedung sebanyak 2 lantai dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang mendukung kinerja karyawan Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung. Adapun secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

#### Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Kecamatan Kiaracondong

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak Berat/Ringan
1	2	3	4	5
1.	Bangunan Gedung Kantor	7 unit	7	0
2.	Kendaraan Roda 4 (Mobil)	10 unit	10	0
3.	Kendaraan Roda 3 (Triseda)	11 unit	11	0
4.	Kendaraan Roda 2 (Motor)	38 unit	37	1
5.	Laptop	19 unit	19	0
6.	Pc. Unit	10 unit	10	0
7.	Printer	13 unit	13	0
8.	Proyektor	3 unit	2	1
9.	Mesin Absensi	3 unit	2	1
10.	Mesin Antrian	1 unit	1	0
11.	Lemari Kayu	3 buah	3	0
12.	Lemari Besi/Metal	5 buah	5	0
13.	Lemari Pendingin	3 buah	3	0
14.	Tangga Almunium	1 buah	1	0
15.	Speaker Portable	2 unit	2	0
16.	Sound System	2 set	2	0
17.	Meja Kerja	28 buah	28	0
18.	AC Sentral	1 unit	1	0
19.	AC Split	12 unit	12	0
20.	Scanner	2 unit	2	0
21.	Kamera	1 unit	1	0
22.	Tripod	1 unit	1	0
23.	Stabilizer	1 unit	1	0
24.	Kitchen Set	2 set	2	0
25.	Kursi Rapat	100 buah	100	0
26.	Kursi Kerja	40 buah	40	0
27.	Mesin Babat Rumput	1 unit	1	0
28.	CCTV	16 unit	16	0
29.	TV (Televisi)	5 unit	5	0
30.	Handphone	2 unit	2	0
31.	Hardisk	2 unit	2	0
32.	Dispenser	6 unit	6	0
33.	Running Text	1 unit	1	0
34.	Papan Visual>Nama	1 unit	1	0
35.	Alat Pemanas Air	3 unit	3	0
36.	Sofa	5 buah	5	0
37.	Meja Resepsionis	2 buah	2	0

Pemenuhan sarana pendukung kelancaran pelaksanaan tugas yang tersedia akan disesuaikan dengan jumlah, kualitas serta kondisi ideal secara bertahap. Hal ini juga didukung dengan anggaran pengadaan Barang/Jasa dan anggaran pemeliharaan yang cukup memadai.

Disamping sarana dan prasarana pelaksanaan tugas, terdapat juga sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama untuk mencapai tujuan dan sasaran serta visi dan misi pemerintah daerah diantaranya sebagai berikut :

Tabel 2.4

**Sarana dan Prasarana Pendukung Indikator Kinerja Kecamatan**

<b>Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan</b>
Tenaga Kebersihan/Gober	Orang	139	Adanya pelatihan
Tenaga Keamanan/Linmas	Orang	78	Adanya pelatihan
Posyandu	Unit	110	Pengadaan sarana prasarana untuk menunjang kualitas
Posbindu	Unit	104	Pengadaan sarana prasarana untuk menunjang kualitas
Tenaga PKK	Orang	96	Adanya pelatihan, pembinaan, pengadaan sarana dan prasarana pendukung
Tenaga Posyandu	Orang	766	Adanya pelatihan, pembinaan, pengadaan sarana dan prasarana pendukung
Tenaga Posbindu	Orang	308	Adanya pelatihan, pembinaan, pengadaan sarana dan prasarana pendukung
Tenaga Karang Taruna	Orang	138	Adanya pelatihan, pembinaan, pengadaan sarana dan prasarana pendukung
Tenaga LPM	Orang	77	Adanya pelatihan, pembinaan, pengadaan sarana dan prasarana pendukung
Tenaga Relawan Sampah	Orang	48	Relawan sampah untuk lebih tertata dan terkontrolnya di masing-masing wilayah
Tenaga Relawan Stunting	Orang	60	Adanya pelatihan dan pembinaan agar lebih kualitas
Tenaga Penyuluh	Orang	1	Adanya pelatihan dan pembinaan
Gedung/Kantor RW	Unit	77	Perlu dilakukan rehabilitasi gedung/kantor RW
Taman RW	Unit	18	Adanya penataan ulang untuk meningkatkan kenyamanan dan ketentraman wilayah
TPS (Tempat Pembuangan Sampah)	Lokasi	6	Perlu adanya penataan dan pembinaan kepada pengelola sampah
PJL (Penerangan Jalan Lingkungan)	Unit	577	Masih banyaknya kekurangan titik pjl di wilayah Kelurahan

Septictank	Unit	428	Lahan padat pemukiman hingga mengaibatkan kurangnya lahan untuk tercapainya odf 100%
Buruan SAE/Urban Farming	RW	24	Fasilitas yang perlu di support untuk pengembangan kualitas Buruan Sae
CCTV	Unit	217	Masih membutuhkan tambahan unit cctv untuk menjaga ketentraman dan keamanan wilayah
Gerobak Sampah	Unit	76	Masih banyaknya kekurangan gerobak sampah di setiap rw dan adanya gerobak sampah yang rusak ringan dan rusak berat
Triseda	Unit	50	Tambahan pengadaan triseda di setiap rw untuk memudahkan mobilitas

Dari tabel 2.4 menunjukkan bahwa sarana dan prasarana penunjang indikator kinerja merupakan langkah awal dalam membantu capaian layanan di kewilayahan untuk mencapai tujuan dan sasaran pemerintah daerah, meskipun sarana dan prasarana penunjang tersebut masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Untuk menutupi kekurangan dan kelemahan tersebut Kecamatan Kiaracondong berupaya meningkatkan potensi sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan dan pembinaan, menambah sarana dan prasarana yang belum terpenuhi, dan memfasilitasi kegiatan serta memberikan support untuk meningkatkan kualitas layanan.

Faktor dukungan anggaran dari APBD masih terus digulirkan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan, sehingga diharapkan sarana dan prasarana pendukung kinerja lebih meningkat dan dapat dioptimalkan.

### 2.1.2.5 Realisasi Anggaran

Untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung, sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang mendukung dan menentukan di samping juga sumber daya manusia dan sarana prasarana. Belanja kegiatan Kecamatan Kiaracondong disusun dengan menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.

Adapun belanja kegiatan yang mendukung kinerja Kecamatan Kiaracondong selama tahun 2019 – 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.5

#### Realisasi Anggaran Belanja Kecamatan Kiarcondong Kota Bandung Tahun 2019 – 2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
	Rp	Rp	%
2019	35.010.722.125	32.680.235.415	93,34
2020	30.388.747.540	27.265.945.467	89,72
2021	26.763.253.099	24.448.352.809	91,35
2022	33.103.734.138	31.275.943.173	94,48
2023	48.555.438.431	41.476.588.528	85,42
2024	37.842.967.740	34.576.697.158	91,37

Sumber : Laporan Keuangan Kecamatan Kiaracondong Tahun 2019 – 2024 (Audited)

Anggaran dan realisasi belanja Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung selama periode 2019-2024 mengalami kenaikan setiap tahunnya dan terjadi peningkatan secara signifikan pada tahun 2023 hal ini dikarenakan adanya belanja pembangunan gedung kantor baru sebesar 7,8 milyar dari anggaran yang canangkan sebesar 10 milyar. Dalam periode 2019-2024, realisasi belanja digunakan untuk keperluan belanja pegawai, belanja operasi, dan belanja modal. Rata-rata belanja operasi tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 sebesar 91,02 % dan tahun 2024 sebesar 92,57 %, belanja modal tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 sebesar 84,53 % dan tahun 2024 sebesar 83,80 %. Rata-rata realisasi belanja tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 mengalami

kenaikan sebesar 3,40 %, belanja operasi sebesar 0,45 % dan belanja modal sebesar 133,73 %. Kenaikan belanja modal meningkat sangat tinggi hal ini dikarenakan adanya realisasi pembangunan gedung kantor Kecamatan baru pada tahun 2023 dan realisasi pembangunan kantor Kelurahan Cicaheum pada tahun 2024. Sedangkan belanja pegawai rata-rata terjadi penurunan sebesar 11,55 %, hal ini disebabkan jumlah formasi pegawai dari tahun ke tahunnya menurun dari tahun 2019 sebanyak 60 orang menjadi 41 orang pada tahun 2024.

### **2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Kiaracundang**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah yang mendapat pelimpahan sebagian kewenangan Walikota/Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Berkaitan dengan pelimpahan kewenangan tersebut, Pemerintah Kota Bandung telah menerbitkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 745 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota Bandung Kepada Camat dan Lurah.

Atas dasar tersebut diatas Kecamatan Kiaracundang dapat melaksanakan pelayanan dasar dibidang urusan pemerintahan umum, diantaranya yaitu :

1. Pelayanan pembinaan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan mengkoordinasikan kegiatan pembinaan masyarakat seperti pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (LKK) diantaranya RW, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga.
2. Pelayanan pemerintahan umum dilaksanakan dengan memfasilitasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum, memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan.

3. Pelayanan peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup masyarakat dilaksanakan dengan memfasilitasi kegiatan peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup masyarakat seperti pemeliharaan jalan lingkungan, buruan sae, peningkatan ODF, fasilitasi pengelolaan sampah, dll;
4. Pelayanan perekonomian masyarakat dilaksanakan dengan memfasilitasi Kegiatan peningkatan perekonomian masyarakat seperti pembinaan UKM dan Koperasi dan pembinaan/sosialisasi peluang usaha;
5. Pelayanan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum dilaksanakan dengan mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum serta memfasilitasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum dikewilayahan.
6. Pelayanan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dilaksanakan dengan mengkoordinasikan kegiatan penerapan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban seperti pembinaan dan pelatihan Linmas/Satwankar, mengkoordinasikan penyelenggaraan sinergisitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, serta tanggap terhadap rawan bencana di wilayah Kecamatan Kiaracondong.

Adapun capaian kinerja Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung menurut indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya disajikan pada tabel berikut :



Tabel 2.6

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung  
Tahun 2020 - 2024**

No	Indikator Kinerja Utama sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung	Satuan	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>A. Renstra Kecamatan Kiaracondong Tahun 2018 - 2023</b>																	
1	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong	Nilai	82,00	82,50	83,00	83,50	-	83,23	-	-	-	-	101,5 %	-	-	-	-
2	Persentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu	Persen	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	50	66,67	83,33	100	-	50	-	-	-	-	100 %	-	-	-	-
4	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	70	72,50	78,75	80	-	42,56	-	-	-	-	60,80 %	-	-	-	-
<b>B. Renstra Perubahan Kecamatan Kiaracondong Tahun 2018 - 2023</b>																	
1	Persentase Siskamling RW Aktif	Persen	N/A	95,29	96,47	98,82	-	N/A	95,29	96,47	98,82	-	N/A	100 %	100 %	100 %	-
2	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	Persen	42,56	74	75	76	-	42,56	74,75	75,73	79,60	-	100 %	101 %	101 %	105 %	-
3	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong	Nilai	82,00	83,00	84,25	85,25	-	83,23	83,40	85,10	85,52	-	101,5 %	100,5 %	101 %	100,3 %	-
4	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	50	66,67	83,33	100	-	50	66,67	83,33	100	-	100 %	100 %	100 %	100 %	-
<b>C. Renstra Perubahan Kecamatan Kiaracondong Tahun 2024 - 2026</b>																	
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong	Nilai	-	-	-	-	85,50	-	-	-	-	85,73	-	-	-	-	100,3 %
2	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100 %
3	Persentase Kelurahan Berdaya	Persen	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100 %
4	Persentase Satlinmas Aktif Lingkup Kecamatan	Persen	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100 %

Dari tabel tersebut diatas bahwa Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kiaracondong memiliki indikator yang beragam. Terdapat 3 periode Renstra yang berbeda dengan indikator serupa, namun memiliki target dan ruang lingkup berbeda. Berikut Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kiaracondong periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebagai berikut :

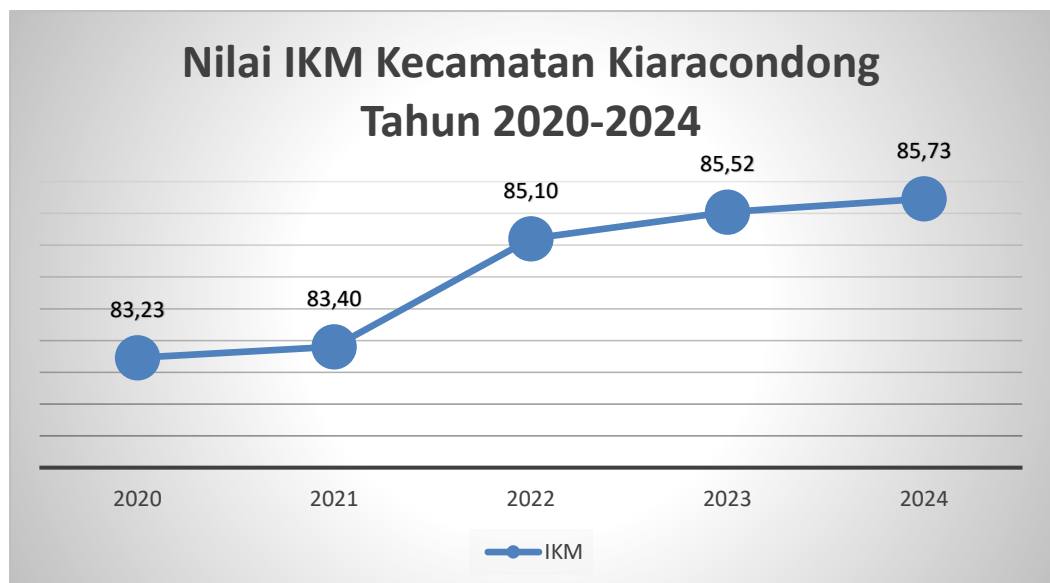
1. Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong

Indikator Rata-rata nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong memiliki persamaan parameter pengukuran dengan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong yaitu berdasarkan pada penilaian pengguna layanan terhadap berbagai unsur pelayanan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Capaian realisasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong tahun 2020 s.d. 2024 sebagai berikut :

Grafik 2.3

**Nilai IKM Kecamatan Kiaracondong Tahun 2020 - 2024**



Sumber : Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong

Grafik hasil survey indeks kepuasan masyarakat (IKM) diatas menunjukkan perkembangan trend yang cukup baik, selama 5 (lima) tahun terakhir indeks selalu meningkat, menunjukkan adanya peningkatan dan perbaikan dalam pelayanan publik khususnya di Kecamatan Kiaracondong. Capaian ini mengindikasikan bahwa upaya perbaikan pelayanan publik sudah berjalan efektif, dengan perbaikan nyata dari tahun ke tahun. Namun, pada tahun 2023, peningkatan yang relatif kecil menunjukkan perlunya inovasi baru atau strategi tambahan agar perbaikan tidak stagnan dan bisa mendorong ke kategori lebih tinggi.

Meskipun Nilai Indeks Kepuasan dari tahun ke tahun meningkat namun masih terdapat permasalahan baik ditingkat implementasi tataran kebijakan, program kegiatan dan teknis operasional.

Meskipun berdasarkan hasil survey IKM pada setiap tahunnya menunjukkan nilai **Baik**, dari nilai 83,23 pada tahun 2020 hingga mencapai nilai 85,73 di tahun 2024, dimana salah satu unsur layanan kompetensi pelaksana dalam hal kualitas Sumber Daya Manusia mengalami peningkatan yang tidak signifikan dengan rata-rata peningkatan mencapai 0,06 dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Sedangkan dari segi kuantitas mengalami penurunan sebesar 31,67 % dari tahun 2020 sejumlah 60 orang pegawai hingga tahun 2024 sejumlah 41 orang pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat dukungan pegawai kepada layanan yang diberikan kepada masyarakat belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal.

Terkait standar pelayanan publik di Kecamatan Kiaracondong perlu dilakukan reviu dalam rangka perbaikan berkelanjutan, mengingat standar yang dikeluarkan oleh Ombudsman RI masih berorientasi pada pemenuhan atau dimensi tangible. Permasalahan lainnya yang dirasakan oleh masyarakat adalah ketidaktepatan mekanisme, waktu, dan biaya layanan. Hal ini memerlukan perbaikan secara berkesinambungan.

Permasalahan lain pada urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil di Kecamatan Kiaracondong masih kurangnya kesadaran masyarakat (keluarga) melaporkan kematian anggota

keluarganya dan laporan kependudukan, serta pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) padahal laporan data tersebut sangat dibutuhkan dalam proses perencanaan pembangunan.

Faktor pendorong pada sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Kecamatan telah tersedia diantaranya dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan DPA dan DPPA, dan bimbingan teknis dan asistensi dengan bagian organisasi dan perangkat daerah Kota Bandung.

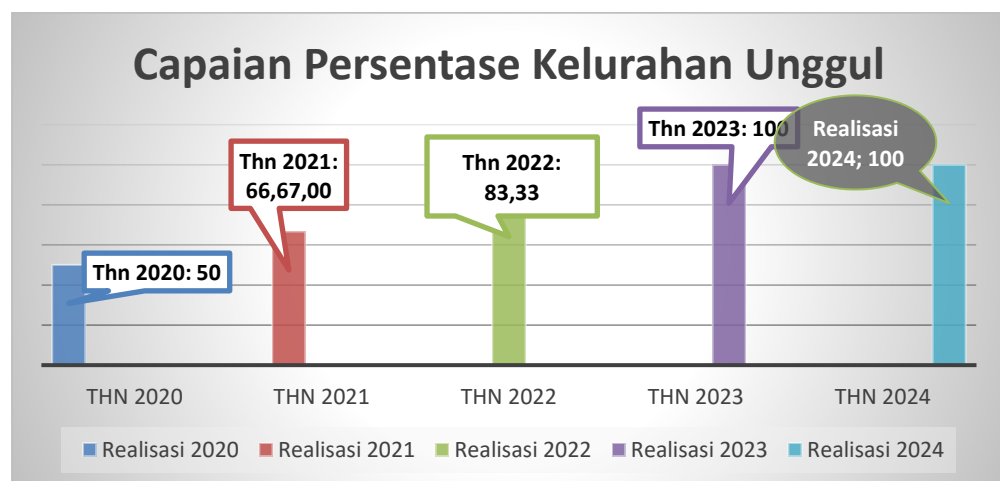
## 2. Persentase Kelurahan Unggul

Capaian indikator Persentase Kelurahan Unggul tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 bisa dikatakan cukup berhasil, hal ini ditunjukkan dengan realisasi indikator di setiap Kelurahan telah melaksanakan kegiatan sesuai parameter yang telah ditentukan sebelumnya.

Realisasi Persentase Kelurahan Unggul tahun 2020 s.d. 2024 nampak sebagai berikut :

Grafik 2.4

### Capaian Persentase Kelurahan Unggul Tahun 2020 - 2024



Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2020 terdapat 3 Kelurahan yang telah memenuhi kriteria Kelurahan Unggul diantaranya Kelurahan Babakansari, Kelurahan Babakan Surabaya

dan Kelurahan Kebon Kangkung dari 6 Kelurahan yang ada di Kecamatan Kiaracondong sehingga capaian Persentase Kelurahan Unggul sebesar 50 %. Tahun 2021 bertambah 1 Kelurahan yaitu Kelurahan Sukapura telah memenuhi kriteria Kelurahan Unggul capaian Persentase Kelurahan Unggul menjadi 66,67 %, Tahun 2022 bertambah 1 Kelurahan yaitu Kelurahan Cicaheum sehingga capaian Persentase Kelurahan Unggul sebesar 83,33 % dan pada tahun 2023 Kelurahan Kebon Jayanti telah memenuhi kriteria Kelurahan Unggul sehingga capaian menjadi 100%.

Pada tahun 2024 capaian indikator Persentase Kelurahan Unggul mencapai 100 %, dengan parameter yang berbeda dengan tahun sebelumnya, adapun parameter tersebut diantaranya sebagai berikut :

Jenis / Kondisi	Wilayah					
	Sukapura	Kebon Jayanti	Babakan Surabaya	Cicaheum	Babakansari	Kebon Kangkung
Laporan RT dan RW lengkap Berdasarkan Perwal 215 Tahun 2018 Terdapat 6 (enam) Dokumen yang harus dipenuhi : - A.1 s/d A.5 : Laporan Kependudukan - Data Laporan Keuangan RW (Pengeluaran dan Penerimaan). <i>Sebagai bentuk administrasi pelaksanaan kegiatan Rt dan RW (honorarium kegiatan RT dan RW)</i>	6 dokumen telah terpenuhi diantaranya : 1. 5 laporan kependudukan form A.1 s.d. A.5 2. 1 laporan keuangan RW	6 dokumen telah terpenuhi diantaranya : 1. 5 laporan kependudukan form A.1 s.d. A.5 2. 1 laporan keuangan RW	6 dokumen telah terpenuhi diantaranya : 1. 5 laporan kependudukan form A.1 s.d. A.5 2. 1 laporan keuangan RW	6 dokumen telah terpenuhi diantaranya : 1. 5 laporan kependudukan form A.1 s.d. A.5 2. 1 laporan keuangan RW	6 dokumen telah terpenuhi di antaranya : 1. 5 laporan kependudukan form A.1 s.d. A.5 2. 1 laporan keuangan RW	6 dokumen telah terpenuhi di antaranya : 1. 5 laporan kependudukan form A.1 s.d. A.5 2. 1 laporan keuangan RW
Ruas jalan, saluran, kerb dan RTH dalam kondisi terpelihara : Kriteria - Kerb terpelihara tidak ada rumput pada nat/ dicat warna hitam putih tidak pudar setiap triwulan; - Jalan terpelihara/tidak ada rumput liar dan sampah setiap triwulan; - Pada saluran air/kali tidak ada gulma, sedimen dan sampah yang mencolok setiap triwulan; - Tidak ada sumbatan air dibawah jembatan yang disebabkan amblas; - Taman RW dalam kondisi	- Kerb terpelihara 1.500 meter - Jalan lingkungan terpelihara 3.459 meter - Gorong-gorong terpelihara 795 meter - Taman RW terpelihara sebanyak 4 lokasi	- Kerb terpelihara 1.650 meter - Jalan lingkungan terpelihara 3.714 meter - Gorong-gorong terpelihara 1.136 meter - Taman RW terpelihara sebanyak 2 lokasi	- Kerb terpelihara 800 meter - Jalan lingkungan terpelihara 11.515 meter - Gorong-gorong terpelihara 3.501 meter - Taman RW terpelihara sebanyak 8 lokasi	- Kerb terpelihara 800 meter - Jalan lingkungan terpelihara 11.515 meter - Gorong-gorong terpelihara 3.501 meter - Taman RW terpelihara sebanyak 8 lokasi	- Kerb terpelihara 800 meter - Jalan lingkungan terpelihara 11.515 meter - Gorong-gorong terpelihara 3.501 meter - Taman RW terpelihara sebanyak 8 lokasi	- Kerb terpelihara 3.500 meter - Jalan lingkungan terpelihara 6.600 meter - Gorong-gorong terpelihara 2.850 meter - Taman RW terpelihara sebanyak 3 lokasi

bersih tidak ada sampah dan tidak ada tumbuhan liar serta memotong daun atau ranting kering; - Melakukan penyiraman pada musim kemarau.						
Pemetaan DTKS - Laporan data DTKS setiap triwulan		Jumlah DTKS sebanyak 1.231 jiwa			Jumlah DTKS sebanyak 2.141 jiwa	Jumlah DTKS sebanyak 985 jiwa
Fasilitasi pengembangan UMKM - mempunyai NIB		Jumlah UMKM yang memiliki NIB terdata sebanyak 1.154 orang			Jumlah UMKM yang memiliki NIB terdata sebanyak 53 orang	Jumlah UMKM yang memiliki NIB terdata sebanyak 1.691 orang

Meskipun parameter yang dicapai sasaran indikator Persentase Kelurahan Unggul terpenuhi, masih terdapat permasalahan-permasalahan bidang pemeritahan diantaranya minimnya kapasitas pengelolaan data, dimana petugas RT/RW tidak semuanya memiliki kemampuan digitalisasi data dan SDM pengelola data terbatas dan belum semua memahami analisis data mikro, kurangnya pemahaman warga terhadap peraturan yang berlaku, seperti prosedur administrasi kependudukan, batas kewenangan RT/RW dan kelurahan, serta pentingnya pelaporan data diri secara berkala. Hal ini berdampak pada rendahnya partisipasi warga dalam proses pemerintahan dan seringkali terjadi kesalahpahaman saat mengurus dokumen atau mengikuti program pemerintah.

Bidang ekonomi dan pembangunan diantaranya belum optimalnya penanganan sampah, kesadaran masyarakat dalam memilah sampah masih sangat rendah; jumlah buruan sae masih sedikit, sehingga hasil Buruan Sae belum optimal pemanfaatannya; Infrastruktur Dasar (Jalan lingkungan, kerb, saluran air, PJJ, dan lain sebagainya) masih banyak yang harus diperbaiki; faktor kemungkinan bencana alam (banjir sungai cidurian, sekewaluh, Ciparumpung dan Cicadas ) merusak tanggul pembatas mengakibatkan tanah longsor; belum terfasilitasi dan optimalisasi kegiatan UMKM yang menjadi penggerak ekonomi masyarakat kewilayahan.

Bidang kesejahteraan sosial diantaranya masih cukup tingginya angka kemiskinan dan pengangguran; adanya trend kenaikan angka

stunting/gizi buruk bagi balita di Kecamatan Kiaracondong sebesar 4,48 % ; bantuan kepada penyandang disabilitas dan lanjut usia yang terlantar belum optimal; akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar di kewilayahan belum optimal; pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial belum terfasilitasi secara optimal.

Dari semua permasalahan yang terjadi Kecamatan Kiaracondong telah berupaya mengatasinya dengan berbagai cara diantaranya bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melaksanakan Mepeling setiap sebulan sekali selama 4 hari, melaksanakan penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota Bandung terkait kependudukan kepada masyarakat, melaksanakan sosialisasi masalah penanganan sampah, melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan di Kewilayahan, membentuk satgas tenaga penyuluh dan relawan penanganan sampah dan stunting, mengalokasikan anggaran untuk menurunkan stunting melalui pemberian makanan tambahan (PMT), melakukan koordinasi secara intens dengan dinas terkait dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di kewilayahan.

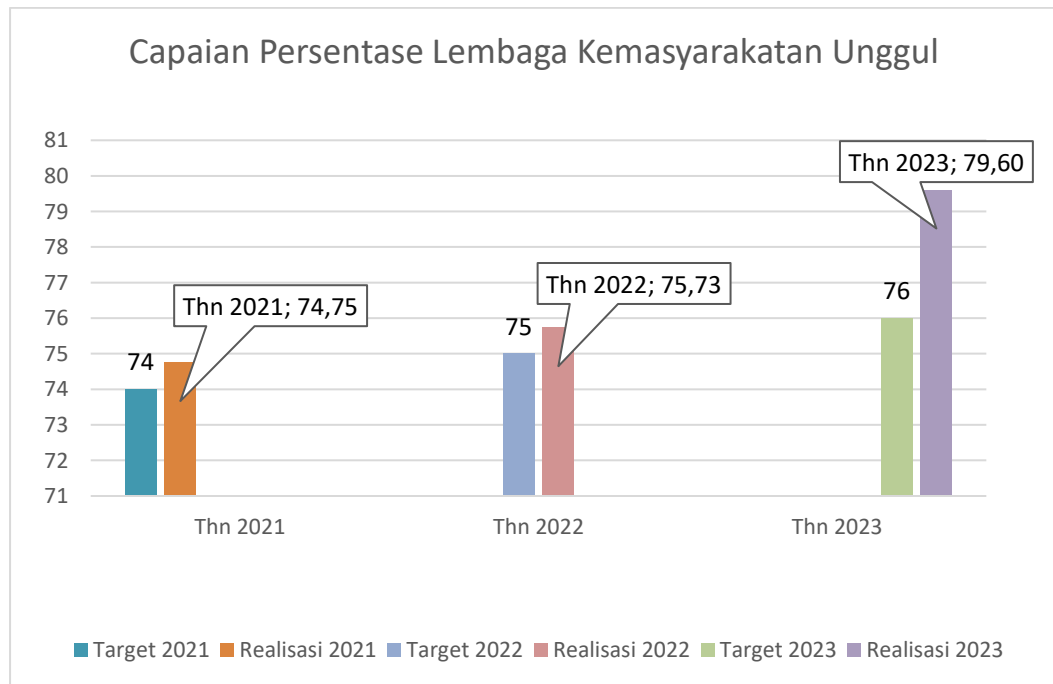
Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak terkait dari Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bandung serta bimbingan dan asistensi maka seluruh program dan kegiatan dalam mencapai sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dalam berjalan dengan baik.

### 3. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul

Capaian Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kecamatan Kiaracondong dapat dilihat grafik sebagai berikut :

Grafik 2.5

**Capaian Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul Tahun 2021 - 2023**



Hasil rekapitulasi pencapaian Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul, pada masing-masing Kelurahan di Kecamatan Kiaracondong diperoleh data sebagai berikut :

Wilayah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Kecamatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang memenuhi kriteria Unggul		Pencapaian	
	RW	LKK	RW	LKK	Lembaga	%
Kelurahan						
Sukapura	15	3	12	3	15	14,56
Kebon Jayanti	14	3	9	2	11	10,68
Babakan Surabaya	15	3	13	3	16	15,53
Cicaheum	12	3	9	3	12	11,65
Babakansari	18	3	14	2	16	15,53
Kebon Kangkung	11	3	9	3	12	11,65
<b>Jumlah</b>	<b>85</b>	<b>18</b>	<b>66</b>	<b>16</b>	<b>82</b>	<b>79,60</b>
	<b>103</b>					



Parameter Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul adalah Lembaga Kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam DPA, minimal 80% dari kegiatan yang dilaksanakan menunjang RPJMD sebagai berikut :

No	Kegiatan	Satuan	Kewilayahan					
			Sukapura	Kebon Jayanti	Babakan Surabaya	Cicaheum	Babakansari	Kebon Kangkung
1	Pengadaan sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah	Unit	1.896	15	1	6	8	25
2	Urban Farming	Unit	9	4	2	5	12	3
3	Pembangunan/perbaikan/pemeliharaan Sanitasi Lingkungan (ODF)	Unit	5	19	8	4	27	40
4	Biopori/Sumur resapan pada jalan/gang	Unit	10	0	0	2	0	1351
5	Penanaman Pohon	Batang	0	20	2	0	0	100
6	Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Jalan	Meter	17.215	2.630		1.108	9.400	6.600
7	Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Saluran Air	Unit	18	0		8	540	12
8	Perbaikan/pemeliharaan gedung/bale RW	Unit	12	0	15	4	8	2
9	Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Usaha dan Ekonomi Produktif	kegiatan	3	0	1	1	0	4
10	Sosialisasi Urban Farming	kegiatan	0	3	2	1	2	6
11	Sosialisasi ODF	kegiatan	0	3	3	1	2	6
12	Taman Tematik ramah disabilitas	Unit	4	0	0	0	0	0
13	Bandung Tanginas	kegiatan	0	3	0	36	0	36
14	Penguatan Kelembagaan	kegiatan	7	3	3	3	34	9
15	Kelompok Lansia Sehat	kegiatan	1	3	0	0	2	36
16	Fasilitasi posyandu lingkup RW	kegiatan	1	3	21	0	8	11



No	Kegiatan	Satuan	Kewilayahan					
			Sukapura	Kebon Jayanti	Babakan Surabaya	Cicaheum	Babakansari	Kebon Kangkung
17	Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup PKK	kegiatan	1	3	0	3	0	3
18	Sosialisasi/Pembinaan Bina Keluarga	kegiatan	0	3	540	0	6	396
19	Sosialisasi Kewirausahaan bagi anggota UP2K-PKK	kegiatan	0	3	0	3	6	6
20	Gerakan Kebersihan dan pemanfaatan sampah	kegiatan	4	3	0	3	3	396
21	Pembinaan Posyandu	kegiatan	13	3	6	0	2	2
22	Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup KARTA	kegiatan	4	0	0	3	2	3
23	Melakukan pelatihan UEP	kegiatan	0	0	0	1	0	6
24	Pendataan PMKS dan PSKS	kegiatan	5	0	6	0	2	5
25	Penyelenggaraan HJKB, Hari Besar Keagamaan, PHBN	kegiatan	6	3	4	3	3	69
26	Event Olah Raga	kegiatan	0	0	3	0	2	4
27	Pusat Pelayanan dan Kreatifitas Remaja (Co-Working space Kelurahan)	kegiatan	0	0	0	0	0	2
28	Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup LPM	kegiatan	1	0	0	3	1	3
29	Melaksanakan BBGRM/BBKT (Bulan Bakti Karang Taruna)	kegiatan	3	3	2	3	3	3
30	Pendataan Profil Kelurahan	kegiatan	1	0	3	3	0	3

No	Kegiatan	Satuan	Kewilayahan					
			Sukapura	Kebon Jayanti	Babakan Surabaya	Cicaheum	Babakansari	Kebon Kangkung
31	Rembug Warga/Pra Musrenbang	kegiatan	3	42	3	3	3	36
32	Pendataan partisipasi / swadaya masyarakat di lingkup RW	kegiatan	0	42	36	3	0	4

Dari alokasi anggaran program pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan, hampir seluruhnya digunakan untuk mendukung sasaran pemberdayaan masyarakat Kecamatan, baik dari alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun Dana Alokasi Umum (DAU) untuk melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan.

Dari tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa selama tahun 2021 sampai tahun 2023 parameter Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul terlaksana secara keseluruhan, hal ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak pada lembaga kemasyarakatan kewilayahan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Meskipun berbagai parameter kegiatan yang mendukung indikator persentase lembaga kemasyarakatan unggul terlaksana, namun masih terdapat permasalahan secara mendasar diantaranya masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan kewilayahan; masih rendahnya tingkat swadaya masyarakat dalam pembangunan kemasyarakatan, yang disebabkan oleh pergeseran nilai-nilai kegotongroyongan ke arah individualisme; dan belum optimalnya pembinaan lembaga kemasyarakatan di tingkat kewilayahan.

Berbagai upaya telah dilakukan Kecamatan Kiaracondong dalam melaksanakan program yang mendukung sasaran tersebut diantaranya memfasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan kewilayahan, berkoordinasi dengan stakeholder yang mendukung program kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan seperti Dinas Pemerintah Kota Bandung yang terkait program dan kegiatan kewilayahan, lembaga vertikal yang terkait dengan

kewilayahan, serta mitra kerja baik BUMN/BUMD dan Perusahaan swasta.

Hal yang menjadi faktor pendukung capaian kinerja ini diantaranya alokasi dana yang cukup memadai dalam melaksanakan kegiatan baik melalui pendapatan asli daerah maupun dana alokasi umum pemerintah pusat, respon masyarakat terhadap program dan kegiatan ditanggapi cukup baik.

#### 4. Persentase Kelurahan Berdaya

Capaian Persentase Kelurahan Berdaya pada tahun 2024 memperoleh nilai 100 %. Capaian tersebut diperoleh dari persentase jumlah Kelurahan yang telah memenuhi kriteria Kelurahan Berdaya sebanyak 6 Kelurahan dari 6 Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Kiaracundang. Seluruh Kelurahan yang ada di Kecamatan Kiaracundang telah memenuhi atau melaksanakan 6 kegiatan dari 10 jenis kondisi kegiatan yang dicanangkan.

Berdasarkan hasil rekapitulasi pencapaian Persentase Kelurahan Berdaya, pada masing-masing Kelurahan di Kecamatan Kiaracundang adalah sebagai berikut :

Kriteria/Jenis Kegiatan Kelurahan Berdaya	Satuan	Wilayah					
		Sukapura	Kebon Jayanti	Babakan Surabaya	Cicaheum	Babakan sari	Kebon Kangkung
Pengelolaan kegiatan pendukung ODF 100%	kegiatan	1	1	1	1	1	1
Pengelolaan kegiatan penanganan stunting	kegiatan	1	1	1	1	1	1
Kangpisan/ pengelolaan sampah RW	kegiatan	1	1	1	1	1	
Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa	kegiatan				1	1	
Buruan Sae/Urban Farming	kegiatan				1	1	
RW bebas genangan	kegiatan					1	



Pembangunan/Pemeliharaan Sarana Prasarana permukiman lainnya	kegiatan			1	1	1	1
Pembinaan Posyandu Aktif	kegiatan	1	1	1	1	1	1
Peningkatan Kewirausahaan Masyarakat	kegiatan	1	1	1		1	1
Fasilitasi kegiatan LKK	kegiatan	1	1	1	1	1	1

Meskipun capaian kinerja persentase Kelurahan Berdaya telah memenuhi kriteria kegiatan namun masih terdapat kendala yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan diantaranya keterbatasan lahan fasilitas umum untuk mencapai ODF 100%, belum optimalisasinya penanganan stunting meskipun telah dilaksanakan pemberian makanan tambahan (PMT), belum optimalisasi penanganan pengelola sampah per RW meskipun telah difasilitasi pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, belum optimalnya penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan kejadian luar biasa, belum ada optimalisasinya untuk support pengembangan buruan sae, Penanganan permasalahan genangan di Kecamatan Kiaracondong saat ini masih belum optimal karena di beberapa titik lokasi banjir / genangan belum dapat terselesaikan, belum optimalisasinya pemeliharaan sarana dan prasarana permukiman masyarakat terkendala alokasi anggaran terbatas, belum optimalisasi pengembangan kewirausahaan masyarakat melalui UMKM terkendala dengan modal kerja dan sarana informasi pemasaran. Berbagai upaya telah dilakukan Kecamatan Kiaracondong dalam melaksanakan program yang mendukung sasaran tersebut diantaranya memfasilitasi kegiatan pembuatan septic tank komunal bagi lingkungan yang belum ODF, melakukan edukasi gizi dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pola makan seimbang, pemantauan pertumbuhan anak dengan melakukan pemeriksaan rutin di posyandu, melakukan kerja sama penanganan sampah dengan komunitas lingkungan, bank sampah induk dan

CSR perusahaan, melakukan pembinaan kepada masyarakat tentang penanganan bencana dan kejadian luar biasa, bekerja sama dengan masyarakat untuk menggiatkan gotong royong dalam rangka membersihkan gorong-gorong dan titik banjir (padat karya), pemasangan PJJ dan CCTV di lingkungan RW, melakukan pembinaan posyandu minimal 1(satu) bulan sekali, memfasilitasi kegiatan kewirausahaan melalui culinary day pada hari minggu, dan memfasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan kewilayahan melalui pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kegiatan lembaga kemasyarakatan baik PKK, Karang Taruna dan Lembaga Pengabdian Masyarakat.

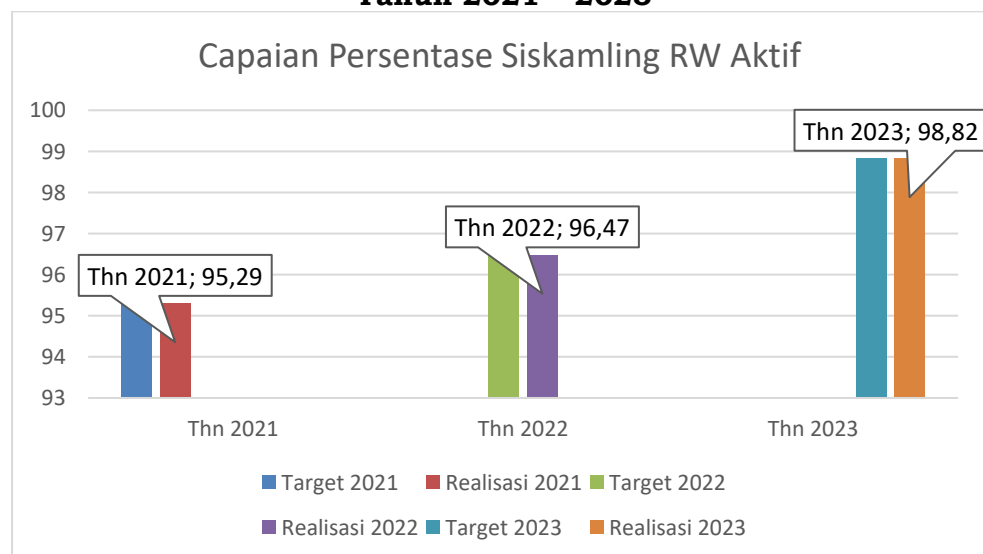
#### 5. Persentase Siskamling RW Aktif

Sasaran meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Kiaracondong dengan indikator kinerja Persentase Siskamling RW Aktif dilaksanakan mulai tahun 2021 sampai dengan 2023, dimana periode sebelumnya tidak dimasukkan sebagai indikator kinerja kunci outcome dan output sehingga tidak tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018 – 2023.

Capaian Persentase Siskamling RW Aktif tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 sebagai berikut :

Grafik 2.6

#### Capaian Persentase Siskamling RW Aktif Tahun 2021 – 2023



Pada tahun 2021 capaian indikator kinerja Persentase Siskamling RW Aktif memperoleh nilai 95,29 %. Capaian tersebut diperoleh dari penilaian Persentase Siskamling RW Aktif dengan nilai 95,29 % merupakan jumlah RW yang telah memenuhi kriteria siskamling RW Aktif sebanyak 81 RW dari 85 RW yang ada di Kecamatan Kiaracondong.

Tahun 2022 capaian indikator kinerja Persentase Siskamling RW Aktif memperoleh nilai 96,47 %. Capaian tersebut diperoleh dari penilaian Persentase Siskamling RW Aktif dengan nilai 96,47 % merupakan jumlah RW yang telah memenuhi kriteria siskamling RW Aktif sebanyak 82 RW dari 85 RW3 yang ada di Kecamatan Kiaracondong.

Capaian kinerja Persentase Siskamling RW Aktif pada tahun 2023 memperoleh nilai 98,82 %. Capaian tersebut diperoleh dari penilaian Persentase Siskamling RW Aktif dengan nilai 98,82 % merupakan jumlah RW yang telah memenuhi kriteria siskamling RW Aktif sebanyak 84 RW dari 85 RW yang ada di Kecamatan Kiaracondong. Permasalahan pada urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Kecamatan Kiaracondong, diantaranya adalah potensi gangguan ketenteraman, kenyamanan dan ketertiban lingkungan. Dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi di kewilayahan Kecamatan Kiaracondong berpotensi meningkatnya angka kriminalitas dan masalah sosial lainnya. Kepadatan penduduk merupakan salah satu faktor penyebab tingginya kriminalitas yang dapat mengganggu ketenteraman, kenyamanan dan ketertiban lingkungan. Penanganan permasalahan keamanan dan kenyamanan lingkungan tidak hanya ada dipihak aparat keamanan seperti Kepolisian dan Rayon Militer, akan tetapi peran serta masyarakat dan kelembagaan yang menjadi ujung tombak di masing-masing wilayah dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan lingkungan. Peran kelembagaan masyarakat dalam meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, hal ini dapat terlihat dari tingkat permasalahan sosial dan tindak pidana masih ada.

Faktor pendukung sasaran meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan dengan indikator persentase siskamling RW aktif diantaranya peran aktif masyarakat bersama Forkompincam bersinergi dalam rangka menjaga lingkungan untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban di wilayah khususnya di Kecamatan Kiaracondong.

#### 6. Persentase Satlinmas Aktif Lingkup Kecamatan

Capaian kinerja Persentase Satlinmas Aktif Lingkup Kecamatan pada tahun 2024 memperoleh nilai 100 %. Capaian tersebut diperoleh dari penilaian jumlah Kelurahan yang telah memenuhi kriteria Satlinmas Aktif sebanyak 6 Kelurahan dari 6 Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Kiaracondong. Adapun kriteria Satlinmas Aktif lingkup Kecamatan sebagai berikut :

Wilayah	Kriteria	Jumlah Kriteria Satlinmas Aktif terpenuhi	%	Keterangan
Kelurahan Sukapura	4	4	100,00	Telah memenuhi kriteria Satlinmas diantaranya SK Penetapan SOTK, RKT Satlinmas, SP3T Satlinmas, dan Daftar Hadir Pelaksanaan Tugas
Kelurahan Kebon Jayanti	4	4	100,00	Telah memenuhi kriteria Satlinmas diantaranya SK Penetapan SOTK, RKT Satlinmas, SP3T Satlinmas, dan Daftar Hadir Pelaksanaan Tugas
Kelurahan Babakan Surabaya	4	4	100,00	Telah memenuhi kriteria Satlinmas diantaranya SK Penetapan SOTK, RKT Satlinmas, SP3T Satlinmas, dan Daftar Hadir Pelaksanaan Tugas
Kelurahan Cicaheum	4	4	100,00	Telah memenuhi kriteria Satlinmas diantaranya SK Penetapan SOTK, RKT Satlinmas, SP3T Satlinmas, dan Daftar Hadir Pelaksanaan Tugas
Kelurahan Babakansari	4	4	100,00	Telah memenuhi kriteria Satlinmas diantaranya SK Penetapan SOTK, RKT Satlinmas, SP3T Satlinmas, dan Daftar Hadir Pelaksanaan Tugas

Kelurahan Kebon Kangkung	4	4	100,00	Telah memenuhi kriteria Satlinmas diantaranya SK Penetapan SOTK, RKT Satlinmas, SP3T Satlinmas, dan Daftar Hadir Pelaksanaan Tugas
--------------------------	---	---	--------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Capaian persentase satlinmas aktif memperoleh nilai 100 %, tak luput dari berbagai permasalahan diantaranya masih ada praktik premanisme, baik secara individu maupun kelompok; ketidak tegasan hukum dan keterbatasan lapangan kerja membentuk sekelompok masyarakat yang kurang produktif dan mengganggu ketertiban sehingga menimbulkan perilaku premanisme; Peraturan Daerah yang kurang tersosialisasi, sehingga warga masyarakat kurang mengetahui peraturan daerah; kurangnya koordinasi antara kewilayahan dan Satpol PP dalam penanganan PKL.

Berbagai upaya telah dilakukan Kecamatan Kiaracondong dalam melaksanakan program yang mendukung sasaran tersebut diantaranya memfasilitasi kegiatan sosialisasi peraturan daerah kepada para PKL dan pelaku usaha ekonomi di kewilayahan, melakukan inspeksi ke lapangan terhadap kejadian bencana dan kejadian luar biasa di kewilayahan, melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik Polres dan Koramil dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban di kewilayahan.

Capaian kinerja indikator kinerja sasaran secara umum telah tercapai namun secara substansi masih banyak permasalahan-permasalahan yang harus dihadapi di kewilayahan Kecamatan Kiaracondong diantaranya :

1. Permasalahan pemeliharaan infrastruktur di kewilayahan baru mencapai 65 % dari jumlah pemeliharaan infrastruktur yang terfasilitasi.
2. Permasalahan ketahanan pangan melalui program dan kegiatan taman RW/buruan sae baru mencapai 92 % dari jumlah yang terfasilitasi.

3. Permasalahan adanya trend peningkatan stunting/gizi buruk bagi anak-anak balita mencapai 7,85 % tahun 2023 dan 12,33 % tahun 2024 berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Bandung.
4. Permasalahan tingkat kemiskinan masyarakat baru di kewilayahan Kecamatan meningkat mencapai 9,8 % dampak wabah covid 19 yang mengakibatkan sendi perekonomian dan mata pencaharian masyarakat menurun.
5. Permasalahan penanganan sampah Kota Bandung, yang dimana Kecamatan Kiaracondong memproduksi sampah rata-rata setiap hari mencapai 31,93 ton dengan rata-rata pengiriman sebanyak 7 – 8 ritase setiap harinya ke TPA Sarimukti, dalam kondisi pengiriman normal masalah penumpukan sampah dapat teratasi namun bila pengiriman tidak sesuai dengan jadwal dapat mengakibatkan penumpukan sampah sehingga menjadikan masalah baru yang dapat mengganggu kesehatan dan kenyamanan masyarakat di sekitarnya.
6. Permasalahan belum terfasilitasinya secara optimal UMKM yang menjadi penggerak perekonomian masyarakat Kecamatan Kiaracondong dimana jumlah pelaku usaha yang mengajukan NIB sebanyak 217 NPU, 7 (tujuh) unit koperasi di tempat ibadah dan 29 (duapuluh sembilan) unit koperasi yang telah berbadan hukum.

Atas permasalahan-permasalahan tersebut diatas dapat dilihat **data mikro** dari berbagai sumber yang menjadi leading sektornya antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.7

**Data Stunting Kecamatan Kiaracondong Tahun 2023 - 2024**

No	Uraian / Sumber Data	Tahun 2023	Tahun 2024	Trend
1	Jumlah Keluarga (DPPKB)	43.499	30.660	(12.839)
	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (DPPKB)	5.969	4.321	(1.648)
	<b>Persentase Keluarga Berisiko Stunting</b>	<b>13,72 %</b>	<b>14,09 %</b>	<b>0,37 %</b>



No	Uraian / Sumber Data	Tahun 2023	Tahun 2024	Trend
2	Jumlah Balita yang diukur (DINKES)	5.389	4.995	(394)
	Jumlah Bayi yang STUNTING (DINKES)	423	616	193
	<b>Persentase bayi yang STUNTING</b>	<b>7,85 %</b>	<b>12,33 %</b>	<b>4,48 %</b>
3	Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat 90% (Dinsos)	14,09 %	23,89 %	9,80 %
4	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan nontunai 90% (Dinsos)	24,22 %	31,52 %	7,30 %
5	Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi 90% (Dinkes)	15,83 %	20,51 %	4,68 %
6	Bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif 80% (Dinkes)	64,96 %	72,91 %	7,95 %
7	Anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya 90% (Dinkes)	78,73 %	80,33 %	1,60 %
8	Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi 90% (Dinkes)	17,16 %	88,40 %	71,24 %
9	Balita yang memperoleh imunisasi dasar lengkap 90% (Dinkes)	63,77 %	88,08 %	24,31 %
10	Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak 100% (DPKP)	89,20 %	85,34 %	(3,86 %)

Tabel 2.8

**Data DTSEN Kecamatan Kiaracondong Tahun 2025**

Kelurahan	Desil 1		Desil 2		Desil 3		Desil 4		Desil 5	
	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa
Sukapura	397	1.241	414	1.271	538	1.792	605	1.902	683	2.156
Kebon Jayanti	192	596	214	689	308	1.002	307	996	377	1.196
Babakan Surabaya	293	947	378	1.208	413	1.336	535	1.682	657	2.136
Cicaheum	260	823	289	952	344	1.122	419	1.329	537	1.652
Babakansari	395	1.250	526	1.650	575	1.872	781	2.459	957	3.121
Kebon Kangkung	196	605	212	647	284	918	275	860	328	1.056
<b>Total</b>	<b>1.733</b>	<b>5.462</b>	<b>2.033</b>	<b>6.417</b>	<b>2.462</b>	<b>8.042</b>	<b>2.922</b>	<b>9.228</b>	<b>3.539</b>	<b>11.317</b>

\*

Tabel 2.9

**Data Cluster Produksi Sampah Kecamatan Kiaracondong**

No	Cluster Objek Produksi Sampah	Jumlah Sasaran	Estimasi Jumlah Sampah Harian (Kg)			Lokasi Pembuangan
			Jenis Sampah			
			Organik	Anorganik	B3	
1	Rumah Tangga	43.754	14.900	5.690	1.204	1.Babakan Sari : TPST BABAKAN SARI 2.Babakan Surabaya : TPS BTM & Bank Sampah 3.Cicaheum : TPS Pasar Cicaheum,TPS Cicadas,TPS Subang 4.Kebon Jayanti : TPS Pasar Kiaracondong 5.Kebon Kangkung : Rumah Maggot RW 03,09,11 6.Sukapura : TPS RW 05,RW 10 dan Rumah Maggot
2	Pertokoan	502	628	236	110	
3	Warung Makan/Cafe	326	1.850	641	79	
4	Rumah Sakit/ Klinik	20	271	91	200	
5	Apotek	23	40	31	101	
6	Pasar	3	2.070	161	56	
7	Pasar Kaget	6	256	113	37	
8	Sarana Olah Raga	30	22	24	8	
9	Pabrik	75	701	259	113	
10	Pedagang Kaki Lima	586	276	175	100	
11	Perkantoran	55	105	120	45	
12	Bengkel	53	78	318	158	
13	Penginapan	4	31	20	5	
14	Sekolah	90	159	174	21	
15	Tempat Ibadah	145	131	107	15	
<b>Jumlah</b>		<b>45.672</b>	<b>21.518</b>	<b>8.160</b>	<b>2.252</b>	
<b>Total Produksi sampah harian</b>			<b>31.930</b>			

Tabel. 2.10

**Data mikro Kelurahan Kecamatan Kiaracondong Tahun 2024**

No	Data	Satuan	Jumlah	Terfasilitasi/ terpelihara	Tidak terfasilitasi/ tidak terpelihara	Analisis Permasalahan
<b>I</b>	<b>Infrastruktur</b>					
1	Kerb	meter	12.640	12.640	-	Keterbatasan alokasi anggaran pemeliharaan
2	Jalan lingkungan	meter	32.839	21.294	11.545	Keterbatasan alokasi anggaran pemeliharaan
3	Saluran air/ drainase/ gorong-gorong/ kali	meter	19.900	14.022	5.878	sulit di jangkau untuk dibersihkan karena tertutup beton bangunan



No	Data	Satuan	Jumlah	Terfasilitasi/ terpelihara	Tidak terfasilitasi/ tidak terpelihara	Analisis Permasalahan
4	ODF	lokasi	167	167	-	Keterbatasan lahan fasilitas umum
<b>II Ketahanan Pangan</b>						
1	Taman RW / Buruan SAE	lokasi	24	22	2	Kurang support untuk pengembangan kualitas buruan sae
<b>III Stunting</b>						
1	Anak Stunting	anak	616	616	0	Kurangnya pengetahuan pada masyarakat terhadap stunting
<b>IV Kemiskinan</b>						
1	DTKS	jiwa	16.026	5.052	10.974	Keterbatasan alokasi anggaran
<b>V Sampah</b>						
1	RW KBS	Lokasi	13	9	4	Kurangnya sosialisasi dan kesadaran masyarakat
2	Rumah memilah	rumah	1.411	1.245	166	Kekurangan sarana dan prasarana pendukung
<b>VI UMKM</b>						
1	UMKM	umkm	5.167	1.731	3.436	Kurangnya sosialisasi dan kesadaran masyarakat

Pada tahun 2024 anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi
Belanja	37.842.967.740,00	34.576.697.158,00
Belanja Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.325.867.776,00	9.436.227.817,00
Belanja Urusan Kegiatan Kecamatan	27.517.099.964,00	25.140.469.341,00
<b>Bertambah/ (Berkurang)</b>		<b>(3.266.270.582,00)</b>

Sumber : Sekretariat Kecamatan Kiaracondong (angka unaudited 2024)

Realisasi keuangan Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung pada tahun anggaran 2024 untuk belanja sebesar Rp.34.576.697.158,00 (91,37%) yang terdiri dari belanja penyediaan gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp.9.436.227.817,00 (91,38%) dan belanja urusan kegiatan Kecamatan sebesar Rp.25.140.469.341,00 (91,36%).

Untuk periode pelayanan Tahun 2020 - 2024 kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung, anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung sebagaimana tabel berikut:



Tabel 2.11

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Kiaracondong  
Kota Bandung Tahun 2020 - 2024**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- dalam ribuan (000)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- dalam ribuan (000)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Angg	Real
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja	28.192.748	26.763.253	33.103.734	48.555.438	37.842.968	25.134.208	24.448.353	31.275.943	41.476.589	34.576.697	0,89	0,91	0,94	0,85	0,91	0,60	0,54
Belanja Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.511.297	10.021.871	10.916.683	12.395.320	10.325.868	10.481.606	8.950.289	10.299.741	9.416.603	9.436.228	0,91	0,89	0,94	0,76	0,91	0,05	-0,08
Belanja Urusan Kegiatan Kecamatan	16.681.451	16.741.382	22.187.051	36.160.118	27.517.100	14.652.602	15.498.064	20.976.202	32.059.986	25.140.469	0,88	0,93	0,93	0,89	0,91	0,90	0,89

Sumber : Sekretariat Kecamatan Kiaracondong (angka rekonsiliasi per Des 2024)

### 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Kiaracondong

Kecamatan Kiaracondong sebagai unit pelayanan publik di tingkat wilayah memiliki tanggung jawab dalam memberikan layanan yang cepat, tepat dan akuntabel kepada seluruh lapisan masyarakat. Kelompok sasaran utama dari pelayanan Kecamatan Kiaracondong mencakup berbagai elemen masyarakat yang membutuhkan akses terhadap layanan pemerintahan, kependudukan dan sosial kemasyarakatan.

Berdasarkan peta proses bisnis yang dimiliki oleh Kecamatan, berikut adalah kelompok sasaran Layanan dari Kecamatan Kiaracondong:

Tabel 2.12

#### Kelompok Sasaran Layanan

No	Kelompok Sasaran Layanan	Keterangan
1	Masyarakat	Masyarakat secara umum untuk kebutuhan layanan administrasi kependudukan
		Pelaku Usaha Ekonomi Lokal dan UMKM yang membutuhkan fasilitas pengembangan usaha mikro dan peningkatan produksi di kewilayahan
		Pengusaha yang membutuhkan layanan perizinan usaha
		Organisasi masyarakat yang membutuhkan layanan pembinaan
		Penerima Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang membutuhkan penerima layanan social, program bantuan sosial, dan pemberdayaan masyarakat
		Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) yang merupakan salah satu peran penting layanan untuk mendukung program dan kegiatan di kewilayahan dalam rangka menyampaikan informasi kepada warga masyarakat secara langsung
2	Perangkat Daerah	Sekretariat, Badan dan Dinas Kota Bandung untuk kebutuhan layanan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan di kewilayahan
3	Kewilayahan	Kelurahan se Kecamatan dalam rangka layanan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan
4	Lembaga Vertikal	Kepolisian Sektor Kota Bandung, Komando Rayon Militer, Forkompincam, MUI Kecamatan dan Lembaga Vertikal lainnya dalam rangka layanan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan
5	Pemangku Kepentingan (Stakeholder)	Lembaga lain yang membutuhkan layanan di kewilayahan
		Media Massa yang membutuhkan layanan informasi
		Dunia Usaha

### 2.1.5 Mitra Kecamatan Kiaracundang

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pencapaian target pembangunan daerah, Kecamatan Kiaracundang secara aktif menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak. Mitra-mitra yang terlibat berasal dari unsur pemerintah, swasta, perguruan tinggi, lembaga sosial masyarakat, serta tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki komitmen dalam mendukung pembangunan kewilayahan.

Mitra yang terlibat di Kecamatan Kiaracundang turut berperan dalam berbagai program yang diselenggarakan oleh Kecamatan Kiaracundang, antara lain pemberdayaan masyarakat, penanganan stunting, penguatan UMKM, pengelola lingkungan, penanggulangan kemiskinan, serta penguatan kapasitas aparatur kewilayahan. Bentuk dukungan mitra dapat berupa teknis, pelatihan, pendampingan, bantuan sarana prasarana, hingga fasilitasi kegiatan sosial kemasyarakatan. Berdasarkan hasil pemetaan kinerja, dapat diidentifikasi bahwa perangkat daerah yang menjadi mitra dalam pemberian pelayanan Kecamatan Kiaracundang adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.13

#### Data Mitra Kecamatan Kiaracundang Dalam Pemberian Pelayanan

No	Indikator Kinerja Utama	Kriteria Diintervensi	Mitra Perangkat Daerah	Uraian
1	2	3	4	5
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracundang	Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin di capai	BKAD	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tersedianya Dokumen Perencanaan Anggaran yang Mendukung Kinerja</li><li>2. Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</li><li>3. Tersedianya DPA yang telah mengacu pada Dokumen Perencanaan Kinerja</li></ol>



		Setiap Pegawai Memahami dan Peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang direncanakan	BKPSDM	Tersedianya SKP pegawai yang selaras dengan rencana kinerja organisasi
		Pemanfaatan inovasi daerah dalam mendukung pembangunan daerah	Bagian Organisasi	Peningkatan kualitas pelayanan publik pada Perangkat Daerah
		Perencanaan daerah yang mendukung pembangunan kewilayahan	Bapperida	Peningkatan kualitas perencanaan pada Perangkat Daerah
2	Persentase Kelurahan UTAMA Kecamatan Kiaracondong	Layanan administrasi kependudukan	Disdukcapil	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan perekaman e-KTP</li><li>2. Pembuatan KK</li><li>3. Pembuatan Akta Kelahiran dan Kematian</li><li>4. Pembuatan dokumen kependudukan lainnya</li></ol>
			DPPPA	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mewujudkan kesetaraan gender</li><li>2. Penguatan peran keluarga dalam pendidikan anak</li><li>3. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak</li></ol>
			DPPKB	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pendorong implementasi program keluarga berencana</li><li>2. Menyosialisasikan, memfasilitasi dan mendampingi program keluarga berencana (KB) serta pembangunan keluarga.</li></ol>
			Dinsos	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penanganan permasalahan sosial, mediasi konflik, serta koordinasi dengan berbagai pihak seperti kelurahan, PKK, Karang Taruna, dan lembaga masyarakat</li><li>2. Pemberdayaan ekonomi masyarakat</li></ol>



				melalui pelatihan dan program sosial
			DLHK	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengelolaan sampah melalui program pengurangan, pemilahan, dan pengangkutan, serta mendukung terwujudnya RW Kawasan Bebas Sampah</li><li>2. Penghijauan, pemeliharaan ruang terbuka hijau, serta pengendalian pencemaran udara dan air</li><li>3. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai perilaku hidup bersih dan ramah lingkungan</li></ol>
			Dinkes	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah Kecamatan</li><li>2. Melaksanakan pelayanan kesehatan dasar, upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative</li><li>3. Pencegahan penyakit menular dan tidak menular, peningkatan gizi masyarakat, kesehatan ibu dan anak, serta penguatan ketahanan kesehatan lingkungan dengan berkolaborasi dengan Kelurahan, kader posyandu, dan tokoh masyarakat dalam mengembangkan gerakan masyarakat hidup sehat</li></ol>
			LKK	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Berperan aktif dalam menyerap dan menyampaikan</li></ol>



				<p>aspirasi masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Mendukung pelaksanaan program-program pemerintah, baik dalam bidang sosial, ekonomi maupun lingkungan.</li><li>3. Membantu dalam menyebar luaskan informasi kebijakan dan pelayanan publik.</li><li>4. Memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan di wilayah Kelurahan maupun Kecamatan</li></ol>
3	Persentase Satlinmas Aktif Kelurahan Lingkup Kecamatan Kiaracondong	Layanan ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Polsek	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memiliki peran penting dalam pengamanan wilayah, penegakan hukum, serta perlindungan masyarakat dari berbagai potensi gangguan keamanan.</li><li>2. Koordinasi lintas sektor, patroli wilayah terpadu, penyuluhan hukum dan kamtibmas, serta penanganan kasus sosial masyarakat.</li></ol>
			Koramil	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Berperan aktif dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban wilayah serta memperkuat ketahanan sosial masyarakat.</li><li>2. Patroli kewilayahan bersama, sosialisasi wawasan kebangsaan, pendampingan kegiatan linmas, serta partisipasi dalam Forkopimcam.</li></ol>
			Kesbangpol	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembinaan partai politik</li><li>2. Perizinan acara kegiatan</li></ol>
			Satpol PP	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Koordinator pelaksanaan penegakkan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah</li><li>2. Menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat</li><li>3. Koordinasi dengan instansi lain dalam menjaga ketertiban dan keamanan</li></ol>

## 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

Rencana pembangunan Kecamatan Kiaracondong pada lima tahun kedepan tidak lepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2025 – 2029 yang berkesinambungan sesuai dengan Inmendagri 2 tahun 2025, dan menjadi momentum untuk menyusun ulang prioritas pembangunan Kecamatan Kiaracondong dengan dasar pemahaman yang tajam terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di kewilayahan secara aktual dan potensi krisis yang akan terjadi di wilayah masing-masing Perangkat Daerah.

Permasalahan-permasalahan utama yang dihadapi oleh Kecamatan Kiaracondong saat ini dan berbagai isu strategis harus direspon secara transformatif, adaptif dan kolaboratif berbasis data kinerja sebelumnya.

### 2.2.1 Permasalahan Kecamatan Kiaracondong

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Kecamatan Kiaracondong Tahun 2018 – 2023 dan pelaksanaan program kegiatan tahun 2024 menunjukkan adanya permasalahan struktural yang belum terselesaikan secara fundamental dan masih menjadi hambatan utama dalam mewujudkan pembangunan kewilayahan yang inklusif dan berkelanjutan. Permasalahan ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling terhubung dan berdampak luas terhadap kualitas hidup warga masyarakat di wilayah Kecamatan serta kinerja pembangunan lintas sektor.

Berikut adalah enam permasalahan utama pembangunan kewilayahan Kecamatan Kiaracondong yang memerlukan respon strategis dan transformatif dalam periode Renstra 2025 – 2029.

1. Permasalahan bidang Kesekretariatan

Permasalahan bidang Kesekretariatan meliputi beberapa faktor dan tingkatan implementasi baik secara tataran kebijakan, program kegiatan dan teknis operasional.

Faktor permasalahan utama diantaranya :

- a. Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia

Meskipun berdasarkan hasil survey IKM pada setiap tahunnya menunjukkan nilai **Baik**, dari nilai 81,14 pada tahun 2019 hingga mencapai nilai 85,73 di tahun 2024, dimana salah satu

unsur layanan kompetensi pelaksana dalam hal kualitas Sumber Daya Manusia mengalami peningkatan yang tidak signifikan dengan rata-rata peningkatan mencapai 0,06 dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Sedangkan dari segi kuantitas mengalami penurunan sebesar 31,67 % dari tahun 2019 sejumlah 60 orang pegawai hingga tahun 2024 sejumlah 41 orang pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat dukungan pegawai kepada layanan yang diberikan kepada masyarakat belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal.

- b. Permasalahan pengelolaan aset  
Kurangnya tertib administrasi, lemahnya pemanfaatan dan pengamanan serta kurangnya pemeliharaan aset.

2. Permasalahan bidang Pemerintahan

- a. Ketersediaan data tidak lengkap, dimana banyak RT/RW tidak rutin melaporkan data kependudukan dan kegiatan;
- b. Data tidak akurat atau sudah kedaluwarsa, dimana masih banyak warga yang belum memperbaharui dokumen kependudukan (KTP, KK) dan Data kegiatan dan partisipasi masyarakat tidak dicatat secara sistematis;
- c. Belum Optimalnya kualitas pelayanan Publik pada Kecamatan, salah satunya dalam kaitan pelayanan KTP dengan prosedur tertentu menjadikan waktu pengerjaannya relatif lama;
- d. Minimnya kapasitas pengelolaan data, dimana petugas RT/RW tidak semuanya memiliki kemampuan digitalisasi data dan SDM pengelola data terbatas dan belum semua memahami analisis data mikro;
- e. Permasalahan Regulasi dan Kewenangan, dimana regulasi baru dari pusat atau provinsi terkadang terlambat disosialisasikan ke tingkat kelurahan, sehingga pelaksanaan di lapangan tidak seragam atau keliru; dan
- f. Kurangnya pemahaman warga terhadap peraturan yang berlaku, seperti prosedur administrasi kependudukan, batas kewenangan RT/RW dan kelurahan, serta pentingnya pelaporan data diri

secara berkala. Hal ini berdampak pada rendahnya partisipasi warga dalam proses pemerintahan dan seringkali terjadi kesalahpahaman saat mengurus dokumen atau mengikuti program pemerintah.

3. Permasalahan bidang Ketentraman dan Ketertiban
  - a. Masih ada praktik premanisme, baik secara individu maupun kelompok;
  - b. Ketidak tegasan hukum dan keterbatasan lapangan kerja membentuk sekelompok masyarakat yang kurang produktif dan mengganggu ketertiban sehingga menimbulkan perilaku premanisme;
  - c. Peraturan Daerah yang kurang tersosialisasi, sehingga warga masyarakat kurang mengetahui peraturan daerah;
  - d. Kurangnya koordinasi antara kewilayahan dan Satpol PP dalam penanganan PKL.
  
4. Permasalahan bidang Ekonomi dan Pembangunan
  - a. Belum optimalnya penanganan sampah, kesadaran masyarakat dalam memilah sampah masih sangat rendah;
  - b. Jumlah buruan sae masih sedikit, sehingga hasil Buruan Sae belum optimal pemanfaatannya;
  - c. Infrastruktur Dasar (Jalan lingkungan, kerb, saluran air, PJJ, dan lain sebagainya) masih banyak yang harus diperbaiki;
  - d. Belum optimalnya kelayakhunian kota (banyak wilayah kumuh, termasuk rutilahu);
  - e. Kondisi wilayah juga sangat berpengaruh terhadap kinerja Kecamatan Kiaracondong, hal ini dapat dilihat dari faktor kemungkinan bencana alam (banjir sungai cidurian, sekewaluh, Ciparumpung dan Cicadas ), kebakaran, dll;
  - f. Kurangnya kesadaran atau ketidak mampuan masyarakat untuk membuang limbah pada tempat yang tepat;
  - g. Belum terfasilitasi dan optimalisasi kegiatan UMKM yang menjadi penggerak ekonomi masyarakat kewilayahan.

5. Permasalahan bidang Kesejahteraan Sosial
  - a. Masih cukup tingginya angka kemiskinan dan pengangguran;
  - b. Adanya trend kenaikan angka stunting/gizi buruk bagi balita di Kecamatan Kiaracondong;
  - c. Bantuan kepada penyandang disabilitas dan lanjut usia yang terlantar belum optimal;
  - d. Akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar di kewilayahan belum optimal;
  - e. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial belum terfasilitasi secara optimal.
  
6. Permasalahan bidang Pemberdayaan Masyarakat
  - a. Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan kewilayahan;
  - b. Masih rendahnya peran serta aktif masyarakat dalam bidang pemberdayaan kemasyarakatan;
  - c. Masih rendahnya tingkat swadaya masyarakat dalam pembangunan kemasyarakatan, yang disebabkan oleh pergeseran nilai-nilai kegotongroyongan ke arah individualisme;
  - d. Belum optimalnya pembinaan lembaga kemasyarakatan di tingkat kewilayahan.

Tabel. 2.14

### Permasalahan Kecamatan Kiaracondong

Isu Strategis RPJMD	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	Akar Dari Akar Masalah	Keterangan	Crosscutting
Pengembangan Digitalisasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik						
	Masih terdapat layanan belum optimal	Pemahaman warga terhadap kebijakan baru	Kurangnya pemahaman prosedur administrasi kependudukan	Minimnya pengetahuan warga	Masih banyak warga yang belum memiliki KIA		Disdukcapil
			Rentang waktu pembuatan KTP lama	Keterbatasan jumlah kepingan KTP	Perpindahan mutasi keluar/masuk penduduk yang membutuhkan KTP		Disdukcapil
			Ketersediaan data kurang lengkap	RT/RW tidak secara rutin melaporkan data	Akurasi data kependudukan belum optimal	Masalah tupoksi	



Isu Strategis RPJMD	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Akar Dari Akar Masalah	Keterangan	Crosscutting
				kependudukan dan kegiatan		
			Minimnya kapasitas pengelolaan data	SDM pengelola data terbatas	Petugas RT/RW tidak semuanya memiliki kemampuan digitalisasi data	Iptek
		Lemahnya pengelolaan aset	Kurang tertibnya administrasi pengelolaan aset	Lemahnya pemanfaatan dan pengamanan aset	Ketidakpedulian dan Ketidaktegasan pengelola aset	BKAD
				Aset pemerintah belum optimal terpelihara	Minimnya kesadaran pengguna aset pemerintah	Masalah tupoksi
Implementasi Kebijakan Hijau, Tantangan Polusi Udara, dan Risiko Degradasi Lingkungan	Belum optimalnya penanganan sampah					
	Masih terjadi penumpukan sampah yang tidak terangkut	Kesadaran masyarakat terhadap bahaya bagi kesehatan akibat penumpukan sampah	Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pemanfaatan sampah	Keterbatasan lahan dalam pengelolaan sampah organik	Tidak ada pemilahan sampah organik dan anorganik	DLHK
			Minimnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah	Belum optimal satgas pengelolaan sampah mengedukasi masyarakat	Minimnya kawasan bebas sampah pada tingkat RW	Masalah tupoksi
			Pengelolaan sampah yang tidak efektif	Sistem pengelolaan sampah yang tidak terorganisir dengan baik	Masih terdapat tumpukan sampah yang tidak terurai	DLHK
		Biaya pengelolaan sampah sangat tinggi	Pengoperasian teknologi pengolahan sampah yang canggih dapat sangat tinggi	Lokasi yang dipergunakan sangat luas tidak sebanding dengan lahan yang ada	Keterbatasan anggaran pengelolaan sampah yang modern	BKAD DLHK
			Biaya pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan sangat tinggi	Tidak terorganisir dan dilakukan secara manual	Kurangnya koordinasi petugas di lapangan	Masalah tupoksi
				Masih terdapat pungutan liar pada pengangkutan dan pembuangan sampah	Tidak ada pengawasan secara intensif dari petugas di lapangan	Masalah tupoksi
Implementasi Kebijakan Hijau, Tantangan Polusi Udara, dan Risiko Degradasi Lingkungan	Belum optimalnya pemeliharaan infrastruktur dasar					
	Belum tercapainya ODF 100%	Keterbatasan akses ke fasilitas sanitasi yang memadai	Kurangnya lahan fasilitas umum sebagai akses fasilitasi sanitasi	Minimnya fasilitas umum untuk mengakomodir pelaksanaan program dan kegiatan	Luas lahan yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah kepadatan penduduk	BKAD DLHK DISCIPTABIN TAR DINKES



Isu Strategis RPJMD	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	Akar Dari Akar Masalah	Keterangan	Crosscutting
	Buruan SAE secara kuantitas belum optimal	Pemanfaatan Buruan Sae belum optimal	Jumlah buruan sae masih sedikit	Hasil buruan sae belum optimal pemanfaatannya	Kurangnya support untuk pengembangan kualitas buruan sae		DLHK
	Adanya Infrastruktur Dasar yang perlu diperbaiki	Terjadi bencana longsor pada musim penghujan	Tanggul pada pinggir bantalan sungai mengalami pengikisan	Perubahan tata guna lahan di sekitar sungai seperti deforestasi atau pembangunan pada pinggir bantalan sungai	Tidak adanya vegetasi atau struktur pelindung yang memadai		DPKP DSDABM
					Masih terdapat jalan pemukiman lingkungan yang rusak		DPKP
Digitalisasi, Inklusi, dan Tantangan Kesehatan Lansia	Belum optimalisasi penanganan kesejahteraan sosial kewilayahan						
	Masih tingginya jumlah pengangguran	Minimnya lapangan pekerjaan	Keterbatasan kualitas sumber daya manusia dalam persaingan dunia kerja	Kurangnya keterampilan dan kemampuan yang dibutuhkan oleh pasar kerja	Belum optimalnya pengembangan program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja		Disnaker
	Masih terdapat bayi stunting yang cenderung meningkat	Kurangnya asupan gizi yang seimbang, terutama pada ibu hamil dan anak usia dini	Kurangnya pendidikan gizi, kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang gizi masih terbatas	Masih rendahnya pemahaman ibu dalam pentingnya pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita	Kurangnya wawasan ibu dalam makanan gizi seimbang dan beragam	Tupoksi	Dinkes
				Tatalaksana gizi buruk yang belum berkelanjutan	Keterbatasan nakes terlatih tatalaksana gizi buruk		Dinkes
				Masih rendahnya cakupan baduta gizi kurang yang mendapat PMT pemulihan	Ketersediaan anggaran dan kemampuan kader pengolah PMT dalam kapasitas banyak	Tupoksi	
				Masih ada calon pengantin yang belum memeriksakan kesehatan ke Puskesmas sehingga pemeriksaan tidak lengkap	Kurangnya informasi serta pengetahuan Catin tersebut, terlalu dekat dengan jadwal pernikahan sehingga pemeriksaan kesehatan tidak ke Puskesmas	Tupoksi	Dinkes
	Belum optimalnya bantuan kepada penyandang disabilitas dan lanjut usia yang terlantar	Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kebutuhan dan hak-hak penyandang disabilitas dan orang tua lanjut usia yang terlantar	Keterbatasan sumber daya, termasuk dana dan tenaga kerja yang terlatih	Kurangnya SDM untuk penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Terdapat Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) hanya 1 orang		Dinsos



Isu Strategis RPJMD	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	Akar Dari Akar Masalah	Keterangan	Crosscutting
					Belum optimalnya koordinasi petugas Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) dalam meningkatkan kualitas layanan sosial	Tupoksi	
Dominasi Ekonomi Digital & Kreatif, Ketimpangan Ekonomi, dan Transformasi Teknologi	Belum terfasilitasi secara optimal UMKM yang menjadi penggerak ekonomi masyarakat	Menghadapi kesulitan dalam mengakses pasar yang lebih luas dan meningkatkan penjualan produknya	Regulasi yang tidak mendukung dalam mengembangkan usahanya	Regulasi yang terlalu kompleks dan berbelit-belit membuat UMKM kesulitan dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan	Masih minimnya jumlah pengusaha kecil yang memiliki NIB	Tupoksi	DKUKM Disdagin
			Kurangnya keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas produk dan daya saing	Kurangnya kesadaran tentang pentingnya pengetahuan dan keterampilan dalam meningkatkan kualitas produk dan daya saing	Minimnya akses ke pendidikan dan pelatihan UMKM yang memadai untuk meningkatkan kualitas produk dan daya saing	Tupoksi	DKUKM Disdagin
			Kurang memiliki akses ke teknologi yang memadai untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas usahanya	Minimnya pengetahuan yang cukup tentang teknologi yang tersedia dan bagaimana menggunakannya	Tidak memiliki biaya yang cukup untuk menginvestasikan dalam teknologi yang memadai		DKUKM Disdagin

## 2.2.2 Isu-Isu Strategis

Dalam 5 tahun kedepan, Kecamatan Kiaracondong akan fokus menjalankan dan mensukseskan program kerja yang telah direncanakan oleh pemerintah kota Bandung dengan memperhatikan isu-isu permasalahan KLHS, Global, Nasional, Regional dan isu-isu permasalahan Kota Bandung selama periode 2025 – 2029.

### 2.2.2.1 Telaahan Isu Global (SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) yang merupakan penyempurnaan dari *Millenium Development Goals* MDGs. SDGs ditetapkan pada bulan September 2015 di dalam Sidang Umum PBB yang selanjutnya diadopsi oleh 193 negara dan menjadi Agenda Global 2030.

Gambar 2.5

#### AGENDA PEMBANGUNAN GLOBAL



SDGs berisikan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan 169 target dan menggunakan pendekatan holistik terhadap prioritas area ekonomi, sosial, lingkungan pemerintahan dengan cakupan luas (seluruh negara-negara di dunia).

Gambar 2.6

### TANTANGAN DOMESTIK SDGs PADA TATA KELOLA PELAYANAN PUBLIK DAN KEWILAYAHAN



Pada paparan yang disampaikan Sekretariat Nasional SDGs Kementerian PPN/Bappenas bahwa Tantangan Domestik SDGs pada Tata Kelola Pemerintahan yaitu Capaian skor Indeks Pelayanan Publik pada level Provinsi dan Kab/Kota masih relative rendah dibanding Kementrian/Lembaga. Hal ini memerlukan perhatian khusus untuk Kabupaten/Kota agar dapat meningkatkan pelayanan publik dengan berbagai upaya yang nyata. Selain itu pada unsur kewilayahan terdapat Tantangan Domestik bahwa Ketimpangan Pembangunan antar wilayah masih relatif tinggi dengan Rasio Gini yang masih cukup tinggi sehingga perlu adanya strategi dan program prioritas dalam rangka pemerataan pembangunan.

#### 2.2.2.2 Telaahan Isu Nasional (RPJMN Tahun 2025-2029)

Pada bagian ini dilakukan penelaahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. RPJMN Tahun 2025-2029 telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Dalam rangka sinergi perencanaan pembangunan nasional dan daerah, maka dalam penyusunan RPJMD

dilakukan telaahan terhadap RPJMN. Visi RPJMN mengikuti Visi Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2029 adalah: **Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045**. Visi tersebut memiliki makna bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Misi RPJMN merupakan Upaya yang ditempuh untuk mencapai visi. Misi RPJMN disebut juga dengan Asta Cita dan menjadi Prioritas Nasional (PN) tahun 2025-2029 yaitu sebagai berikut yang ditempuh untuk mencapai visi. Misi RPJMN disebut juga dengan Asta Cita dan menjadi Prioritas Nasional (PN) tahun 2025-2029 yaitu sebagai berikut:

Gambar 2.7

### Asta Cita sebagai Prioritas Pembangunan



Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029

### 2.2.2.3 Telaahan Isu Regional (RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029)

RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran Visi, Misi, dan Program Gubernur dengan berpedoman pada RPJPD 2025-2045 (Tahap I) dan RPJMN 2025-2029 serta menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten/Kota, dan RKPD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Berikut ini adalah Visi dan Misi Jawa Barat yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029:

Gambar 2.8

### Visi dan Misi Jawa Barat Tahun 2025-2029

**INDONESIA 2045**  
**VISI INDONESIA 2025-2045**

- **Bersatu**  
Kesatuan kuat berdasarkan Pancasila dan Semangat Bhinneka Tunggal Ika
- **Berdaulat**  
Ketahanan, Kemandirian, Mandiri, Aman, Tangguh
- **Maju**  
Berdaya, modern, Tangguh, Inovatif dan adil
- **Berkelanjutan**  
Lestari dan seimbang antara pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan

**Jawa Barat 2045**  
**VISI JAWA BARAT 2025-2045**

- **Termaju**  
Provinsi Jawa Barat memiliki daya tingkat kemajuan dan perkembangan pertumbuhan yang tinggi tingkat diiringi dengan inovasi layanan
- **Berdaya Saing Dunia**  
Provinsi Jawa Barat memiliki keunggulan kompetitif di tingkat dunia dalam berbagai aspek
- **Berkelanjutan**  
Menjamin keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup dengan tata kelola yang baik dalam jangka panjang serta berkeseluruhan selama 4 (empat) tahap periode pembangunan untuk mencapai visi Jawa Barat pada tahun 2045

**Jabar Istimewa**  
**VISI JAWA BARAT 2025-2029**

- **Istimewa**  
Kondisi pemerintahan provinsi Jawa Barat dalam membangun pembangunan dan pelayanan publik yang terbaik untuk kesejahteraan Masyarakat
- **Lembur Diurus**  
Kembangkan wilayah pedesaan sebagai kawasan perdesaan yang maju, adil, dikelola untuk memperkuat ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan hidup
- **Kota Ditata**  
Kembangkan kota dengan pendekatan sebagai kawasan perdesaan yang maju, adil, dikelola untuk memperkuat ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan hidup



Isu strategis pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat tahun 2025-2029 yaitu:

1. Green dan blue economy
2. Kualitas dan daya saing SDM
3. Kesenjangan pembangunan dan infrastruktur dasar
4. Keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan
5. Keberlanjutan penataan ruang
6. Kualitas tata kelola pemerintahan

Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat periode 2025-2029 adalah:

### **JABAR ISTIMEWA**

#### **Situasi Kondisi Terunggul, Termaju, Paripurna, dan Teratas**

Dalam mencapai visi tersebut, maka ditetapkan beberapa misi, yaitu:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter.
2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif.
3. Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya.
4. Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance.

#### **2.2.2.4 Telaahan KLHS RPJMD Kota Bandung Tahun 2025-2029**

Delapan Isu Strategis yang menjadi telaahan KLHS di Kota Bandung di dalam RPJMD Kota Bandung Tahun 2025-2029, yaitu:

1. Menurunnya kualitas lingkungan hidup perkotaan akibat pencemaran dan pembangunan yang kurang terkendali
2. Tingginya kerentanan terhadap bencana alam, non alam, dan kebakaran belum diimbangi dengan kapasitas adaptasi dan mitigasi yang memadai.
3. Kurang optimalnya penyediaan dan pengelolaan infrastruktur permukiman yang berkualitas dari hulu ke hilir.
4. Tingginya kemacetan di Kota Bandung dan transportasi umum yang kurang memadai.

5. Belum signifikannya peningkatan kualitas SDM akibat pelayanan pendidikan dan kesehatan yang belum merata.
6. Lambatnya penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.
7. Belum optimalnya pembangunan sektor dan sumber daya ekonomi yang inklusif.
8. Belum optimalnya penegakan hukum, implementasi good governance dan digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan.

Delapan isu strategis kemudian dilihat keterkaitannya dengan isu strategis pada dokumen Rankhir RPJPD Kota Bandung 2025-2045, Rantek RPJMD Kota Bandung 2025-2029, TPB, dan antar isu strategis. Selain itu diketahui juga antar isu strategis KLHS RPJMD Kota Bandung 2025-2029 memiliki pengaruh timbal balik. Hubungan timbal balik menunjukkan bahwa suatu isu dapat saling memengaruhi satu sama lain.

Isu strategis pembangunan jangka menengah Kota Bandung pada periode tahun 2025-2029 memerhatikan berbagai aspek baik internal maupun eksternal daerah. Berdasarkan telaahan pada potensi dan permasalahan kota, KLHS RPJMD, dan lingkungan dinamis baik global, nasional, regional dan kota, maka isu strategis sebagai berikut:

1. Bonus Demografi, Peningkatan Populasi Lansia, dan Transisi Demografi
2. Dominasi Ekonomi Digital & Kreatif, Ketimpangan Ekonomi, dan Transformasi Teknologi
3. Pengembangan Transportasi Publik, Dominasi Kendaraan Pribadi, dan Kawasan Berorientasi Transit
4. Implementasi Kebijakan Hijau, Tantangan Polusi Udara, dan Risiko Degradasi Lingkungan
5. Digitalisasi, Inklusi, dan Tantangan Kesehatan Lansia
6. Ekspansi Ekspor, Dominasi Nasional, dan Posisi Kota Kreatif Global
7. Integrasi Smart City dan Dominasi *Artificial Intelligence & Internet of Things*
8. Pengembangan Digitalisasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

9. Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan dan Peningkatan Wisatawan
10. Pelestarian Budaya

Isu Strategis tersebut secara fungsional saling berhubungan satu dengan lainnya, sehingga upaya penanganan satu isu strategis dapat mendukung atau berdampak positif bagi upaya penanganan isu strategis lainnya.

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung pada tahun 2025 - 2029 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kota Bandung.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif dan implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung, sebagai berikut :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan Tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas.
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kota Bandung dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Bertolak dari penelaahan terhadap isu tata ruang wilayah Kota Bandung serta permasalahan pembangunan di Kota Bandung, maka ditetapkan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah Kecamatan Kiaracundang Kota Bandung sebagai berikut:

1. Memfasilitasi pengembangan UMKM

Kecamatan Kiaracundang dengan mayoritas penduduk yang padat dapat menjadi peluang bagi dunia usaha mikro. Kondisi ini menciptakan peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya beli masyarakat. Pengembangan UMKM dapat menjadi pilihan yang tepat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan di kewilayahan. Untuk mengembangkan usaha mikro perlu difasilitasi sarana dan prasarana pemasarannya (market place), dalam hal ini pemerintah daerah atau kewilayahan dapat mengimplikasikan kebijakannya sesuai dengan regulasi atau peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota seperti pengadaan pameran, penyelenggaraan kuliner day/kuliner night, festival dan lain sebagainya.

2. Mengoptimalkan pengelolaan sampah

Permasalahan sampah khususnya di daerah perkotaan merupakan masalah besar yang harus dihadapi, termasuk Kecamatan Kiaracundang yang memproduksi sampah 31,9 ton perhari diperlukan penanganan dan pengelolaan sampah yang efektif dan efisien. Untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah di kewilayahan perlu ditetapkan kebijakan yang tepat seperti kesadaran masyarakat untuk memilah sampah, pemanfaatan sampah agar dapat menjadi nilai tambah (value added) dan pengelolaan sampah yang tepat guna.

3. Meningkatkan ketahanan pangan  
Di dalam suatu kewilayahan konteks ketahanan pangan dapat berupa ketersediaan bahan pokok kebutuhan masyarakat yang cukup dan terjangkau karena menurunkan risiko konflik sosial akibat kelangkaan atau kenaikan harga pangan. Kebijakan yang dapat dilakukan diantaranya berkoordinasi dengan instansi terkait dengan pangan seperti Deperindag, Bulog, BUMN/BUMD dan koperasi. Mengadakan pameran pasar murah dengan harga yang terjangkau dan kualitas pangan yang baik.
4. Mengoptimalisasi pemeliharaan infrastruktur kewilayahan  
Pemeliharaan infrastruktur kewilayahan dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, kebijakan yang dapat dilakukan diantaranya perbaikan jalan, drainase, fasilitas umum dan infrastruktur lainnya yang mendukung aktivitas masyarakat di kewilayahan.
5. Pencegahan dan penurunan stunting  
Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran berdampak terhadap layanan kesehatan masyarakat belum dirasakan secara optimal, hal ini berpotensi meningkatnya angka stunting/gizi buruk bagi ibu hamil. Kebijakan yang dapat dilaksanakan diantaranya menyusun program khusus pendorong pencegahan stunting, memfasilitasi makanan tambahan untuk ibu hamil kurang energi kronis, memfasilitasi bantuan bagi warga miskin dan meningkatkan taraf kehidupan warga miskin.
6. Peningkatan kualitas pelayanan publik  
Kebijakan yang dilakukan diantaranya Mencakup kemudahan akses, kecepatan dan transparansi dalam pelayanan publik tingkat Kecamatan, seperti administrasi kependudukan dll.

Adapun isu-isu permasalahan yang akan diusung selama 5 (lima) tahun kedepan Kecamatan Kiaracondong dimuat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.15

**Perumusan Isu Strategis Kecamatan Kiaracondong Tahun 2025 - 2029**

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu strategis Kota	Isu strategis PD
			Global	Nasional	Regional		
Sumber pendanaan dari APBD Kota Bandung yang menjadi kewenangan perangkat daerah dapat dioptimalisasikan	Belum optimal kualitas pelayanan publik	Belum optimalnya penegakan hukum, implementasi good governance, dan digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan.	Peningkatan persaingan pemanfaatan sumber daya alam	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Kualitas tata kelola pemerintahan	Pengembangan Digitalisasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Memanfaatkan dan mengoptimalkan TPS yang ada di kewilayahan	Belum optimalnya penanganan sampah	Menurunnya kualitas lingkungan hidup perkotaan akibat pencemaran dan pembangunan yang kurang terkendali	Perkembangan demografi global	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat agama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Implementasi Kebijakan Hijau, Tantangan Polusi Udara, dan Risiko Degradasi Lingkungan	Mengoptimalkan Pengelolaan Sampah
Tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan pemeliharaan	Belum optimalnya pemeliharaan infrastruktur dasar	Tingginya kemacetan di Kota Bandung dan transportasi umum yang kurang memadai.	Peningkatan urbanisasi dunia	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Implementasi Kebijakan Hijau, Tantangan Polusi Udara, dan Risiko Degradasi Lingkungan	Mengoptimalkan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
KECAMATAN KIARACONDONG KOTA BANDUNG  
TAHUN 2025 - 2029**

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu strategis Kota	Isu strategis PD
			Global	Nasional	Regional		
Dukungan lembaga masyarakat dan institusi kesehatan untuk mencegah dan mengurangi risiko gizi buruk	Belum optimalisasi penanganan kesejahteraan sosial kewilayahan	Belum signifikannya peningkatan kualitas SDM akibat pelayanan pendidikan dan kesehatan yang belum merata	Konstelasi perdagangan global	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender; serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Keberlanjutan penataan ruang	Digitalisasi, Inklusi, dan Tantangan Kesehatan Lansia	Optimalisasi Pencegahan dan Penurunan Stunting
Kerja sama dengan koperasi yang telah berbadan hukum dan memfasilitasi kegiatan UMKM dengan diadakan acara kuliner day	Belum terfasilitasinya secara optimal UMKM yang menjadi penggerak ekonomi masyarakat	Tingginya kerentanan terhadap bencana alam, non alam, dan kebakaran belum diimbangi dengan kapasitas adaptasi dan mitigasi yang memadai.	Geopolitik dan geoekonomi	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Kualitas dan daya saing SDM	Dominasi Ekonomi Digital & Kreatif, Ketimpangan Ekonomi, dan Transformasi Teknologi	Memfasilitasi Pengembangan UMKM

### BAB 3

## TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### 3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Kiaracondong Tahun 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2025 – 2029 adalah tahap awal dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2025 – 2045. RPJPD Kota Tahun 2025 – 2045 menekankan pada transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola serta landasan transformasi. Fokus agenda pembangunan tahun 2025 – 2029 adalah Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Fondasi Pembangunan Kota, yang kemudian diformulasikan dengan visi dan misi Wali Kota Bandung, tercermin dalam misi 2 yaitu Mewujudkan Bandung Sebagai Kota yang Terbuka, Inklusif, Setara, dan Berkeadilan. Misi 2 menitik beratkan pada peningkatan kapasitas Kelurahan sebagai simpul keadilan sosial. Hal ini tercermin dari indikator yang akan dicapai, sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Misi		Tujuan & Sasaran		Indikator	
2	Mewujudkan Bandung Sebagai Kota yang Terbuka, Inklusif, Setara, dan Berkeadilan	2.1	Meningkatnya Daya Saing Kota dan Pemerataan Pembangunan	1	Indeks Daya Saing Daerah
				2	Gini Ratio
		2.1.1	Meningkatnya Pembangunan inklusif	1	Tingkat Kemiskinan
				2	Tingkat Pengangguran Terbuka

Indeks Daya Saing Daerah adalah instrument strategis untuk mengukur daya saing di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Indeks Daya Saing Daerah 2024 yang diluncurkan oleh Badan

Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mencakup 38 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota dengan 12 pilar daya saing seperti :

- **Infrastuktur** : menilai kualitas infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi dan sosial.
- **Stabilitas Ekonomi Makro** : mengukur stabilitas ekonomi makro yang mempengaruhi daya saing daerah.
- **Keterampilan Tenaga Kerja** : menilai kualitas dan keterampilan tenaga kerja yang tersedia.
- **Sistem Keuangan** : mengukur efektivitas keuangan dalam mendukung kegiatan ekonomi.
- **Kapabilitas Inovasi** : menilai kemampuan daerah dalam mengembangkan inovasi dan teknologi.

Tujuan Indeks Daya Saing Daerah adalah untuk membantu pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih akurat dan berbasis bukti, serta meningkatkan daya saing daerah. Dengan adanya Indeks Daya Saing Daerah, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih efektif dalam menentukan strategi peningkatan daya saing dan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan merupakan sasaran daerah pada RPJMD yang diampu oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Melalui kewenangan dan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki oleh Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung berkontribusi pada ketercapaian RPJMD Misi 2 Mewujudkan Bandung Sebagai Kota yang Terbuka, Inklusif, Setara, dan Berkeadilan , dengan Tujuan 2.1 Meningkatnya Daya Saing Kota dan Pemerataan Pembangunan (Indikator : Indeks Daya Saing Daerah) yaitu dalam meningkatkan kapasitas Kelurahan sebagai simpul keadilan sosial, sub sasaran strategis Meningkatnya peran inovasi daerah dalam meningkatkan daya saing daerah (Indikator : Indeks Inovasi Daerah) dan Meningkatnya Ketentraman Daerah (indikator : Indeks Ketentraman). Selanjutnya, sub sasaran strategis ini menjadi tujuan pada Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung.

### **3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Kiaracundang Tahun 2025-2029**

Sasaran Kecamatan Kiaracundang Kota Bandung merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan yang akan dicapai Kecamatan Kiaracundang Kota Bandung adalah sebanyak 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran, tujuan dan sasaran pada masing-masing isu strategis Kecamatan Kiaracundang Kota Bandung adalah sebagai berikut :



Tabel 3.1

**Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja  
Kecamatan Kiaracondong Tahun 2025 - 2029**

NO.	NSPK	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Meningkatnya peran inovasi daerah dalam meningkatkan daya saing daerah dan Meningkatkan Ketentraman Daerah	Indeks Inovasi Daerah										
	Permenpan RB No. 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik			Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kewilayahan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong	Nilai	85,75	86,00	86,25	86,50	86,75	87,00	
	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan				Persentase Kelurahan UTAMA Kecamatan Kiaracondong	%	N/A	50,00	66,67	83,33	100,00	100,00	
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan												



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
KECAMATAN KIARACONDONG KOTA BANDUNG  
TAHUN 2025 - 2029

NO.	NSPK	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat		Indeks Ketentraman										
	Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Swakarsa			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan	Persentase Satlinmas Aktif Kelurahan Lingkup Kecamatan Kiaracondong	%	<i>N/A</i>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	

### 3.3 Analisis Lingkungan Strategis Kecamatan Kiaracondong

Kinerja perangkat daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan suatu organisasi perangkat daerah memahami lingkungan strategis baik internal maupun eksternal dan menentukan strategi serta arah kebijakan yang sesuai. Perangkat daerah harus dapat merespon peluang dari lingkungan eksternal, memanfaatkan kekuatan internal, mengatasi kelemahan organisasi dan mengurangi dampak ancaman dari luar, agar dapat mengarahkan jalannya organisasi untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien.

Analisis lingkungan strategis Kecamatan Kiaracondong dipetakan dalam bentuk kekuatan dan kelemahan perangkat daerah yang mencakup unsur 5M (Man, Money, Method, Machine, dan Material). Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi yang dapat menjadi kekuatan serta kendala yang menjadi kelemahan.

#### 3.3.1 Identifikasi Kekuatan dan Kelemahan

Tabel 3.2  
Identifikasi Lingkungan Strategis

Unsur	Kekuatan (Strength)		Kelemahan (Weakness)	
<b>Internal</b>				
<b>Man</b>	1	Adanya penambahan SDM melalui rekrutmen CPNS dan PPPK	1	SDM masih membutuhkan pelatihan dan pengembangan kompetensi
	2	Setiap pegawai telah memiliki kompetensi, pengalaman dan jenjang pendidikan yang sesuai dengan beban kerja yang di emban	2	Terdapat kekurangan dan keterbatasan jumlah pegawai baik Pejabat Struktural, Jabatan Fungsional Umum, Jabatan Fungsional Tertentu dan Staf Teknis yang menyebabkan beban kerja dibagi tidak seimbang dan merata baik secara perorangan maupun unit kerja
	3	Adanya dukungan dari kader PKK, Karang Taruna, dan LPM serta komunitas RW untuk peningkatan kinerja layanan kewilayahan		



Unsur	Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weakness)
	4 Kerja sama dengan BKPSDM Kota Bandung untuk pengembangan karir dan diklat	
Money	5 Adanya dukungan APBD untuk memenuhi kebutuhan dan pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan	3 Komponen kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan yang dianggarkan mengalami kenaikan harga sehingga pagu tidak mencukupi
	6 Anggaran operasional dan gaji yang dialokasikan secara rutin dan tepat waktu	4 Mayoritas program dan kegiatan bergantung pada APBD sementara realisasi penyerapan anggaran terlambat
	7 Terdapat program dan kegiatan yang didukung APBD melalui musrenbang dan reses	5 Ketersediaan anggaran yang tidak memadai untuk mencakup seluruh usulan masyarakat
	8 Adanya dukungan Dana Alokasi Umum (DAU)	6 Ketersediaan anggaran yang terbatas tidak dapat mengakomodir seluruh program dan kegiatan
		7 Keterlambatan realisasi penyerapan anggaran
		8 Pembagian porsi anggaran tidak seimbang antar subkegiatan sehingga outcome yang dicapai tidak maksimal
Method	9 Adanya pembagian tugas dan fungsi secara jelas	9 Belum lengkap SOP untuk menjalankan tugas dan fungsi
	10 Adanya Peraturan Wali Kota Nomor 28 tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung	10 Belum optimalnya implementasi SOP disetiap kegiatan yang dilaksanakan
Machine	11 Infrastruktur dan teknologi informasi komunikasi telah tersedia (peralatan perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan)	11 Laptop/komputer dan printer yang tersedia ada yang mengalami kerusakan/gangguan



Unsur	Kekuatan (Strength)		Kelemahan (Weakness)	
	12	Sebagian besar pegawai telah mendapatkan laptop/komputer yang mendukung kinerja dan operasional	12	Banyaknya jumlah perangkat tidak sebanding dengan pagu pemeliharaan yang dapat dianggarkan membuat pemeliharaan dan pembaharuan perangkat teknologi belum optimal
	13	Sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian indikator kinerja telah tersedia sebagian	13	Keterbatasan anggaran pemeliharaan yang tersedia berdampak sarana dan prasarana mengalami kerusakan
Material	14	Ruang kerja cukup memadai untuk masing-masing unit	14	Masih terdapat kebutuhan ruangan lain untuk kegiatan LKK serta minimnya anggaran pemeliharaan
	15	Terdapat data kependudukan Dan DTSEN sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan	15	Data belum dimanfaatkan secara optimal, masih terdapat data yang tersedia kurang validitasnya
	16	Adanya ruang terbuka seperti taman yang dapat menjadi ruang bermain anak yang nyaman	16	Beberapa fasilitas layanan publik kurang terpelihara

Unsur	Kekuatan (Strength)		Kelemahan (Weakness)	
<b>Eksternal</b>				
Politik	1	Adanya dukungan kebijakan pemerintah pusat dan daerah terkait pelaksanaan urusan perangkat daerah sehingga menjadi lebih terarah	1	Kurangnya sosialisasi atas perubahan kebijakan atau aturan yang cepat
	2	Kerja sama dengan instansi/OPD horizontal dan vertikal lainnya	2	Koordinasi lintas instansi/OPD kurang optimal
Ekonomi	3	Perekonomian daerah Kota Bandung yang stabil sehingga PAD di Kota Bandung masih dalam kondisi baik dan aman menjamin alokasi APBD yang cukup untuk pelaksanaan program dan	3	Kondisi ekonomi nasional yang fluktuatif dikhawatirkan berdampak pada perekonomian daerah Kota Bandung



Unsur	Kekuatan (Strength)		Kelemahan (Weakness)	
		kegiatan di perangkat daerah		
Sosial Budaya	4	Partisipasi masyarakat terhadap dukungan program dan kegiatan semakin meningkat	4	Adanya budaya kerja yang masih tradisional atau kurang inovatif pada pegawai
Lingkungan	5	Sebagian besar karyawan sudah sadar budaya menjaga lingkungan dan hemat energi sehingga sudah dapat meminimalisir sampah dan efisien terhadap penggunaan air/listrik	5	Masih terdapatnya limbah kertas dan plastik akibat dari human-error khususnya pada pendokumentasian berkas
Alam	6	Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan di kantor yang dapat meningkatkan kenyamanan dan produktivitas pegawai	6	Dampak perubahan iklim yang mempengaruhi kesehatan dan produktivitas kerja pegawai (cuaca ekstrim)
	7	Kantor yang berada di lokasi strategis dan aman dari bencana alam	7	Resiko bencana alam (gempa bumi dan kebakaran) menjadi resiko dan ancaman bagi pegawai
IT	8	Akses internet yang cukup luas dengan jangkauan merata mendukung operasional perangkat daerah baik pelaksanaan program dan kegiatan seperti penggunaan aplikasi SIPD dan SIPPELA dalam perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan keuangan	8	Aplikasi pusat masih mengalami banyak hambatan teknis sehingga kegiatan operasional perangkat daerah terhambat, seperti SIPD yang sering maintenance menghambat pelaporan, pengajuan berkas, input data, dan pencairan data realisasi anggaran, Sistem Coretax yang mengalami hambatan saat memuat dan masih ada fitur yang tidak lengkap sehingga menghambat dalam pelaporan pajak

Hasil analisis lingkungan menunjukkan bahwa Kecamatan Kiaracondong memiliki fondasi internal yang cukup kokoh namun tetap memerlukan penguatan. Kapasitas sumber daya, dukungan anggaran, tata kelola, dan sarana pendukung telah menjadi modal penting untuk mendorong kinerja dan pelayanan. Mesti demikian masih terdapat sejumlah faktor yang menuntut perbaikan seperti peningkatan kualitas dan pemerataan kompetensi, penyempurnaan tata kelola dan serta sistem informasi, serta pemutahiran sarana dan data. Hal ini menegaskan perlunya pengelolaan internal yang lebih adaptif, integratif dan berorientasi pada inovasi agar mampu menanggapi dinamika pembangunan ke depan.

Pada sisi eksternal, lingkungan strategis memperlihatkan peluang yang besar sekaligus tantangan yang perlu diantisipasi. Perubahan kebijakan, fluktuasi ekonomi, dinamika sosial budaya, isu lingkungan dan bencana, serta perkembangan teknologi menuntut respons kebijakan yang fleksibel dan berkelanjutan. Oleh karena itu, faktor eksternal yang perlu perbaikan meliputi penguatan ketahanan organisasi, peningkatan kualitas pelayanan yang inklusif serta terintegrasi rencana pembangunan baik dengan stakeholder, instansi horizontal dan vertikal agar perangkat daerah mampu menjaga konsistensi kinerja dan mewujudkan target pembangunan jangka menengah secara komperhensif.

### **3.3.2 Perumusan Strategi**

Menindaklanjuti hasil analisis lingkungan, Kecamatan Kiaracondong menyusun beberapa strategi utama yang saling terkait dan fokus ke arah tujuan yang dirumuskan sesuai peta kekuatan masing-masing instansi, seperti dalam diagram formulasi strategi SWOT (*Strengths* , *Weaknesses*, *Opportunities* , *Threats*) sebagai berikut :

Tabel 3.3

**Matriks Analisis SWOT**

SWOT Matriks		Eksternal	
		Opportunities (O)	Threats (T)
Internal	<b>Strengths (S)</b>	<p><b>SO (Memaksimalkan kekuatan untuk Meraih Peluang)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan layanan melalui SDM yang berpengalaman, dukungan APBD/DAU dan kemitraan dengan stakeholder untuk memperluas cakupan layanan dan penguatan layanan di kewilayahan</li> <li>2. Mengoptimalkan dukungan lembaga kemasyarakatan kewilayahan, sarana dan prasarana yang mendukung indikator kinerja untuk mempertajam program dan kegiatan di kewilayahan</li> <li>3. Memanfaatkan teknologi informasi, dan peran serta masyarakat dalam partisipasi upaya pembangunan di kewilayahan.</li> </ol>	<p><b>ST (Memanfaatkan Kekuatan untuk mengendalikan Ancaman)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memanfaatkan anggaran tambahan DAU untuk menutupi kekurangan program dan kegiatan</li> <li>2. Melaksanakan manajemen risiko secara rutin untuk pencegahan dan memitigasi risiko</li> <li>3. Menggunakan sarana dan prasarana yang mendukung indikator kinerja untuk membantu program dan kegiatan kewilayahan</li> </ol>
	<b>Weaknesses (W)</b>	<p><b>WO (Mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan Peluang)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan kegiatan Musrenbang dalam rangka penyusunan perencanaan kegiatan pembangunan daerah</li> <li>2. Memanfaatkan aplikasi yang tersedia oleh instansi vertikal dan horizontal untuk percepatan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan</li> <li>3. Melakukan pembaharuan data secara berkala agar data terpilah secara valid dan tepat waktu</li> <li>4. Mengoptimalkan anggaran DAU untuk memenuhi kebutuhan anggaran yang belum memadai dari APBD</li> </ol>	<p><b>WT (Memperkecil kelemahan &amp; menghindari Ancaman)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan perencanaan, penganggaran, SDM yang dimiliki untuk mewujudkan integrasi sistem perencanaan pembangunan</li> <li>2. Menjamin mutu pelayanan sesuai standar yang berlaku /ISO (International Organization for Standardization)</li> <li>3. Audit dan Evaluasi berkala</li> </ol>

### 3.4 Strategi Kecamatan Kiaracondong Tahun 2025-2029

Strategi adalah rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan merupakan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam menunjang keberhasilan misi pembangunan daerah Kota Bandung yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan perangkat daerah sehingga dapat memberikan gambaran pelayan kepada masyarakat.

Dengan *grand design* perencanaan yang baik dapat menjawab suatu permasalahan baik yang sudah terjadi, sedang terjadi dan yang akan terjadi. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan di kewilayahan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya dan merupakan salah satu rujukan penting dalam perencanaan perangkat daerah. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Adapun Strategi Kecamatan Kiaracondong dalam mencapai tujuan dan sasaran RENSTRA Kecamatan Kiaracondong Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4

**Strategi Pembangunan Kecamatan Kiaracondong tahun 2025 - 2029**

Tahap 1 2025	Tahap 2 2026	Tahap 3 2027	Tahap 4 2028	Tahap 5 2029	Tahap 6 2030
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perbaikan penerangan jalan lingkungan (PJI) untuk meningkatkan keamanan, dan kenyamanan lingkungan;</li><li>2. Fasilitasi Penguatan Sistem Persampahan melalui optimalisasi pemilahan sampah, RW KBS, Bank Sampah dan pengolahan sampah lainnya;</li><li>3. Perbaikan dan Pembangunan Jalan lingkungan guna memperlancar konektivitas dan mobilitas masyarakat;</li><li>4. Penguatan infrastruktur pendukung lain seperti drainase (untuk mencegah banjir) dan sarana air bersih</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Fasilitasi penanganan stunting;</li><li>2. Fasilitasi pengembangan ruang publik di tingkat Kecamatan/ Kelurahan;</li><li>3. Fasilitasi peningkatan pelayanan publik berorientasi melayani dengan pemanfaatan teknologi;</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Fasilitasi pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif: akses pembiayaan, pelatihan kewirausahaan, pendampingan inovasi produk, serta promosi;</li><li>2. Fasilitasi peningkatan keterampilan (vocational training) bagi angkatan kerja agar sesuai kebutuhan industri;</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Digitalisasi dan kota cerdas : mengintegrasikan teknologi informasi dalam berbagai layanan;</li><li>2. Fasilitasi pengembangan destinasi dan event pariwisata;</li><li>3. Pemberdayaan ekonomi kreatif yang terintegrasi dengan pariwisata;</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Integrasi nilai agamis dan budaya dalam pembangunan: memastikan bahwa kemajuan fisik dan ekonomi kota tetap diimbangi dengan penguatan nilai-nilai agamis dan moral masyarakat;</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penguatan ekonomi berkelanjutan: konsolidasi sektor unggulan (pariwisata, ekonomi kreatif, digital) agar terus tumbuh inklusif dan tangguh;</li><li>2. Penguatan ketahanan dan keamanan sosial masyarakat melalui penguatan sistem perlindungan sosial, pengurangan kesenjangan wilayah dan ekonomi;</li><li>3. Penguatan nilai-nilai kebhinekaan, toleransi, budaya lokal, dan etika sebagai pilar integrasi sosial Bandung yang Unggul, Terbuka, Amanah, Maju dan Agamis;</li><li>4. Penguatan kelembagaan dan perencanaan berbasis data untuk memastikan kesinambungan pembangunan kota.</li></ol>

### **3.5 Arah Kebijakan Kecamatan Kiaracundang Tahun 2025-2029**

Disamping strategi, hal penting lainnya adalah menentukan arah kebijakan yang merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran selama 5(lima) tahun ke depan.

Berbagai ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandung, sebagai pedoman, pegangan, petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat untuk memperlancar dan menperpadukan setiap usaha untuk mencapai tujuan, sasaran serta visi dan misi yang telah diuraikan sebelumnya haruslah di tuangkan dalam bentuk kebijakan.

Dengan demikian maka arah makro kebijakan Kecamatan Kiaracundang adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan meningkatkan kualitas pelayanan publik ;
2. Kebijakan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kewilayahan, dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan;
3. Kebijakan meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui Satlinmas Aktif.

Berdasarkan hasil analisa strategi dan arah kebijakan dalam percepatan tercapainya tujuan dan sasaran kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk di Kecamatan Kiaracundang dapat dilihat tabel dibawah ini :

Tabel 3.5  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya peran inovasi daerah dalam meningkatkan daya saing daerah dan Meningkatkan ketentraman daerah	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kewilayahan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik Kecamatan	Mengoptimalkan sistem manajemen mutu untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan publik
		Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kewilayahan, dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban Masyarakat di Kecamatan	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui Satlinmas Aktif

## **BAB 4**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN**

#### **4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Kiaracondong Tahun 2025-2029**

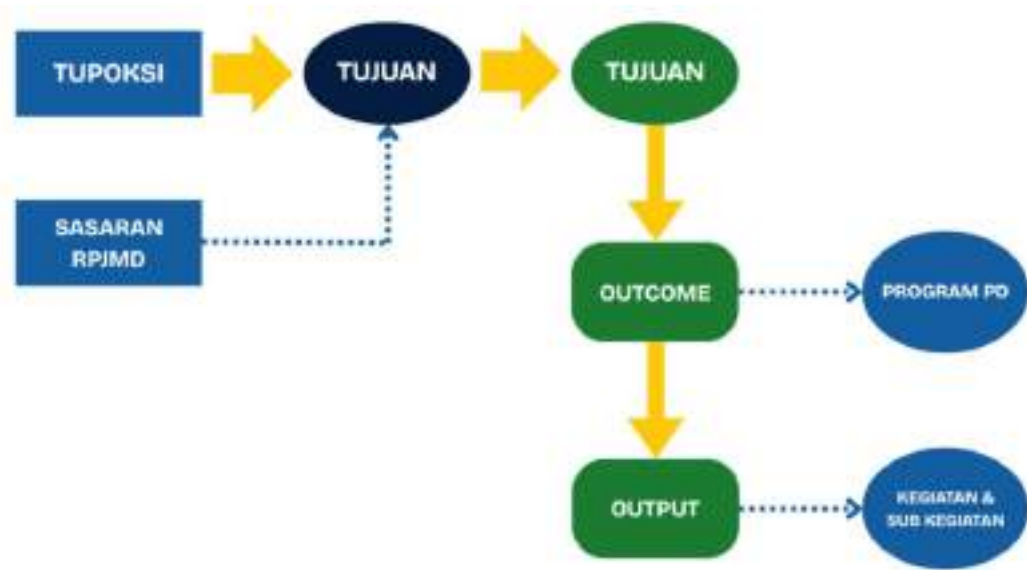
Berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah disusun selanjutnya ditetapkan sejumlah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan atau rencana kerja yang akan datang yang dijadikan sebagai pedoman operasional.

Jumlah program dan kegiatan di lingkup Kecamatan Kiaracondong pada periode tahun 2025 - 2029 mengalami perkembangan atau perubahan indikator dikarenakan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang kemudian diikuti terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berikut adalah program dan kegiatan di lingkup Kecamatan Kiaracondong yang akan dilaksanakan pada periode 2025 - 2029.

Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, salah satu bagian kunci adalah menyusun program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan. Hal Ini menjadi turunan langsung dari sasaran strategis yang merupakan wujud nyata operasionalisasi rencana strategis ke dalam bentuk tindakan nyata, sebagaimana cascading Kecamatan Kiaracondong di bawah ini :

Gambar 4.1

### Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Renstra PD



Sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Kecamatan Kiaracondong ditentukanlah program, dan kegiatan. Adapun program yang dimiliki Kecamatan Kiaracondong adalah sebagai berikut :

#### 1. **Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan program yang berfungsi mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kiaracondong secara administratif dan teknis. Program ini mencakup kegiatan seperti pengembangan kapasitas aparatur, pengelolaan keuangan dan aset, serta layanan administrasi umum. Tujuannya adalah untuk memastikan perencanaan pembangunan Kota Bandung dilakukan secara terintegrasi, efisien, dan berbasis data yang akurat, sehingga mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah secara optimal.

#### 2. **Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik merupakan program yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Kiaracondong di bidang pemerintahan, ekonomi pembangunan dan sosial. Program ini mencakup kegiatan para kasi yang

ada pada struktur organisasi Kecamatan seperti penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan pelaksanaan urusan yang dilimpahkan kepada Camat. Tujuannya adalah untuk memastikan perencanaan pembangunan Kecamatan Kiaracondong dilakukan secara terintegrasi dan sesuai dengan rencana pembangunan pemerintah Kota Bandung, sehingga mencapai visi dan misi pembangunan daerah.

### **3. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan merupakan program yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Kiaracondong di bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan. Program ini mencakup kegiatan seperti kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di tingkat Kecamatan. Tujuannya adalah untuk memastikan perencanaan pembangunan Kecamatan Kiaracondong dibidang pembangunan kewilayahan dan pemberdayaan masyarakat dilakukan secara terintegrasi dan sesuai dengan rencana pembangunan pemerintah Kota Bandung, sehingga mencapai visi dan misi pembangunan daerah.

### **4. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban**

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban merupakan program yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Kiaracondong di bidang ketentraman dan ketertiban di wilayah tingkat Kecamatan. Program ini mencakup kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah. Tujuannya adalah untuk memastikan perencanaan pembangunan Kecamatan Kiaracondong bidang ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan dilakukan secara terintegrasi dan sesuai dengan rencana pembangunan pemerintah Kota Bandung, sehingga mencapai visi dan misi pembangunan daerah.

Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari suatu program, yang langsung menunjang pencapaian sasaran strategis dalam suatu urusan pemerintahan. Kegiatan berada di antara program dan sub kegiatan dalam struktur perencanaan pembangunan daerah. Jenis kegiatan yang dimiliki Kecamatan Kiaracondong adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
5. Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
9. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan;
10. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum;
11. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
12. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan;
13. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
14. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.



Tabel 4.1  
**Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Kiaracondong  
Kota Bandung Tahun 2025 - 2029**

<b>NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Outcome</b>	<b>Output</b>	<b>Indikator</b>	<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Keterangan</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Meningkatnya peran inovasi daerah dalam meningkatkan daya saing daerah				Indeks Inovasi Daerah		
Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik		Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kewilayahan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik Kecamatan			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong		
			Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah		Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Nilai SAKIP Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
KECAMATAN KIARACONDONG KOTA BANDUNG  
TAHUN 2025 - 2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
KECAMATAN KIARACONDONG KOTA BANDUNG  
TAHUN 2025 - 2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Meningkatnya Kualitas Sarana Prasana Pelayanan Publik	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
KECAMATAN KIARACONDONG KOTA BANDUNG  
TAHUN 2025 - 2029**

<b>NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Outcome</b>	<b>Output</b>	<b>Indikator</b>	<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Keterangan</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana Pelayanan Publik	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan		Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kewilayahan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik Kecamatan			Persentase Kelurahan UTAMA Kecamatan Kiaracandong		
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan		Persentase Kelurahan Unggul	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
KECAMATAN KIARACONDONG KOTA BANDUNG  
TAHUN 2025 - 2029**

<b>NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Outcome</b>	<b>Output</b>	<b>Indikator</b>	<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Keterangan</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan	Persentase Kelurahan yang Memenuhi Data Profil Kelurahan di Bidang Pemerintahan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Persentase Pemenuhan Data Profil Kelurahan di Bidang Pemerintahan		
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Terselenggaranya Pelayanan Kependudukan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Administrasi Pemerintahan tepat waktu sesuai SOP	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum di Lingkungan Kecamatan	Persentase Kelurahan yang Memenuhi Data Profil Kelurahan di Bidang Ekonomi Pembangunan	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	
					Persentase Pemenuhan Data Profil Kelurahan di Bidang Ekonomi Pembangunan		



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
KECAMATAN KIARAONDONG KOTA BANDUNG  
TAHUN 2025 - 2029**

<b>NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Outcome</b>	<b>Output</b>	<b>Indikator</b>	<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Keterangan</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase Kelurahan yang Memenuhi Data Profil Kelurahan di Bidang Kesejahteraan Sosial	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Persentase Pemenuhan Data Profil Kelurahan di Bidang Kesejahteraan Sosial		
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat Kecamatan dalam pembangunan lingkup Kecamatan / Kelurahan		Persentase Kelurahan Berdaya	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Jumlah kegiatan yang menunjang Kelurahan Berdaya	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
KECAMATAN KIARACONDONG KOTA BANDUNG  
TAHUN 2025 - 2029**

<b>NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Outcome</b>	<b>Output</b>	<b>Indikator</b>	<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Keterangan</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musrenbang di Kelurahan	
				Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
				Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang Terbina	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
				Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat	Meningkatnya Ketenteraman Daerah				Indeks Ketenteraman		



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
KECAMATAN KIARACONDONG KOTA BANDUNG  
TAHUN 2025 - 2029**

<b>NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Outcome</b>	<b>Output</b>	<b>Indikator</b>	<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Keterangan</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Swakarsa		Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan			Persentase Satlinmas Aktif Kelurahan Lingkup Kecamatan Kiaracondong		
			Meningkatnya penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling lingkup Kecamatan / Kelurahan		Persentase Satlinmas Aktif Kelurahan Persentase Satkamling Aktif Kelurahan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	
				Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Persentase Satlinmas Aktif Kelurahan yang terbina Persentase Satkamling Aktif Kelurahan yang terbina	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	



Tabel 4.2  
**Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Kiaracondong  
Kota Bandung Tahun 2025 - 2029**

Bidang Urusan/ Program/Outco me/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satu an	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun											
			2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			Kinerja	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
Kecamatan					43.288.443.405,00		41.539.430.508,77		42.282.207.508,04		43.042.854.885,16		43.822.003.359,35		44.583.071.215,95
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kewilayahan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong	Nilai	85,50	85,75	21.085.814.913,00	86,00	18.300.699.161,97	86,25	18.608.908.008,87	86,50	18.943.678.067,06	86,75	19.286.590.680,57	87,00	19.621.545.796,83
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik	%	90	90	21.085.814.913,00	100	18.300.699.161,97	100	18.608.908.008,87	100	18.943.678.067,06	100	19.286.590.680,57	100	19.621.545.796,83
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	85,65	85,65		85,65		85,65		85,65		85,65			
Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan															
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	90	90	71.713.540,00	0	0	100	70.047.241,89	100	71.307.375,97	100	72.598.160,09	100	73.858.990,76



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
KECAMATAN KIARACONDONG KOTA BANDUNG  
TAHUN 2025 - 2029**

Bidang Urusan/ Program/Outcome/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun											
			2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			Kinerja	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	lap	1	1	71.713.540,00	0	0	1	70.047.241,89	1	71.307.375,97	1	72.598.160,09	1	73.858.990,76
Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	90	90	11.496.048.588,00	100	12.216.010.846,65	100	12.077.936.447,52	100	12.295.215.800,25	100	12.517.780.001,82	100	12.735.179.464,76
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan	529	510	11.496.048.588,00	510	12.216.010.846,65	600	12.077.936.447,52	660	12.295.215.800,25	660	12.517.780.001,82	660	12.735.179.464,76
Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah															
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	lap	1	1	139.027.500,00	0	0	1	115.361.692,36	1	117.437.023,18	1	119.562.831,93	1	121.639.309,99
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	paket	1	1	139.027.500,00	0	0	1	115.361.692,36	1	117.437.023,18	1	119.562.831,93	1	121.639.309,99
Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah															
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	90	90	2.985.262.085,00	100	1.446.387.698,50	100	1.468.115.471,33	100	1.494.526.537,55	100	1.521.579.995,66	100	1.548.005.661,70



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
KECAMATAN KIARACONDONG KOTA BANDUNG  
TAHUN 2025 - 2029**

Bidang Urusan/ Program/Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun											
			2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			Kinerja	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	2	0	0	0	0	1	34.116.620,23	1	34.730.370,53	1	35.359.048,98	1	35.973.138,56
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	2	2	1.398.521.909,00	2	373.539.862,87	2	420.312.225,79	2	427.873.547,94	2	435.618.782,85	2	443.184.284,83
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	paket	2	0	0,00	0	0,00	1	42.493.750,38	1	43.258.203,37	1	44.041.250,01	1	44.806.125,58
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	4	4	1.271.423.976,00	4	999.143.835,63	4	854.930.570,87	4	870.310.579,03	4	886.064.672,51	4	901.453.182,61
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	4	0	0,00	0	0,00	4	41.577.552,14	4	42.325.522,93	4	43.091.686,48	4	43.840.070,74
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	dok	4	4	50.071.200,00	4	37.604.000,00	4	38.480.615,05	4	39.172.872,63	4	39.881.967,88	4	40.574.608,14
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	lap	1	1	265.245.000,00	1	36.100.000,00	1	36.204.136,87	1	36.855.441,13	1	37.522.586,95	1	38.174.251,24
Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana Pelayanan Publik															



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
KECAMATAN KIARAONDONG KOTA BANDUNG  
TAHUN 2025 - 2029**

Bidang Urusan/ Program/Outco me/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satu an	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun											
			2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			Kinerja	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	90	90	1.881.044.600,00	0	0,00	100	127.991.878,98	100	130.294.424,01	100	132.652.973,46	100	134.956.791,33
Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	unit	4	5	228.338.000,00	0	0,00	2	62.951.597,46	2	64.084.082,50	2	65.244.112,79	2	66.377.223,85
Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	unit	1	1	1.652.706.600,00	0	0,00	1	65.040.281,51	1	66.210.341,51	1	67.408.860,68	1	68.579.567,47
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik															
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	90	90	3.006.820.950,00	100	3.524.580.140,00	100	3.510.160.259,63	100	3.573.307.251,05	100	3.637.990.156,03	100	3.701.172.054,58
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	lap	12	12	315.046.100,00	12	330.720.600,00	12	343.011.322,49	12	349.182.018,82	12	355.502.803,96	12	361.676.911,40
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	lap	12	12	2.691.774.850,00	12	3.193.859.540,00	12	3.167.148.937,14	12	3.224.125.232,23	12	3.282.487.352,07	12	3.339.495.143,18
Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana Pelayanan Publik															



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
KECAMATAN KIARACONDONG KOTA BANDUNG  
TAHUN 2025 - 2029**

Bidang Urusan/ Program/Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun											
			2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			Kinerja	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	90	90	1.505.897.650,00	100	1.113.720.476,82	100	1.239.295.017,17	100	1.261.589.655,04	100	1.284.426.561,56	100	1.306.733.523,76
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	45	59	659.417.600,00	59	605.967.000,00	59	691.910.310,35	59	704.357.620,79	59	717.107.685,05	59	729.561.876,25
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	111	166	134.553.400,00	135	94.498.600,00	135	111.649.191,25	135	113.657.735,02	135	115.715.132,26	135	117.724.786,33
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	6	5	711.926.650,00	4	413.254.876,82	5	435.735.515,57	6	443.574.299,23	6	451.603.744,26	7	459.446.861,18
<b>Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kewilayahan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik Kecamatan</b>	<b>Persentase Kelurahan UTAMA Kecamatan Kiaracondong</b>	%	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>19.377.650.641,00</b>	<b>50</b>	<b>20.884.308.020,97</b>	<b>66,67</b>	<b>21.412.076.026,64</b>	<b>83,33</b>	<b>21.797.274.445,28</b>	<b>100</b>	<b>22.191.841.979,67</b>	<b>100</b>	<b>22.577.253.332,76</b>
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan															
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN</b>	<b>Persentase Kelurahan Unggul</b>	%	<b>100</b>	<b>N/A</b>	<b>12.602.543.256,00</b>	<b>50</b>	<b>8.558.640.716,32</b>	<b>66,67</b>	<b>8.701.890.132,70</b>	<b>83,33</b>	<b>8.858.435.173,64</b>	<b>100</b>	<b>9.018.787.833,05</b>	<b>100</b>	<b>9.175.419.410,77</b>



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
KECAMATAN KIARACONDONG KOTA BANDUNG  
TAHUN 2025 - 2029**

Bidang Urusan/ Program/Outco me/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satu an	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun											
			2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			Kinerja	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
<b>PELAYANAN PUBLIK</b>															
Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan															
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kelurahan yang memenuhi data profil Kelurahan di bidang Pemerintahan	%	N/A	N/A	4.886.063.800,00	50	4.521.838.360,00	66,67	4.718.890.518,19	83,33	4.803.782.294,36	100	4.890.738.878,79	100	4.975.677.582,41
	Persentase pemenuhan data profil Kelurahan di bidang Pemerintahan	%	N/A	N/A		100		100		100		100		100	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	dok	4	4	4.886.063.800,00	4	4.521.838.360,00	4	4.718.890.518,19	4	4.803.782.294,36	4	4.890.738.878,79	4	4.975.677.582,41
Terselenggaranya pelayanan kependudukan di tingkat Kecamatan															
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase pelayanan administrasi kependudukan dan administrasi pemerintahan tepat waktu sesuai SOP	%	N/A	N/A	327.504.400,00	100	170.517.833,50	100	127.331.511,89	100	129.622.177,08	100	131.968.557,72	100	134.260.489,16



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
KECAMATAN KIARAONDONG KOTA BANDUNG  
TAHUN 2025 - 2029**

Bidang Urusan/ Program/Outco me/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satu an	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun											
			2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			Kinerja	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	lap	4	4	327.504.400,00	4	170.517.833,50	4	127.331.511,89	4	129.622.177,08	4	131.968.557,72	4	134.260.489,16
Terlaksananya koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum di lingkungan Kecamatan															
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Kelurahan yang memenuhi data profil Kelurahan di bidang Ekonomi Pembangunan	%	N/A	N/A	4.966.103.602,00	50	2.735.505.530,82	66,67	2.804.079.615,01	83,33	2.854.524.374,88	100	2.906.196.094,09	100	2.956.668.739,38
	Persentase pemenuhan data profil Kelurahan di bidang Ekonomi Pembangunan	%	N/A	N/A		100		100		100		100		100	
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah dokumen koordinasi/ sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	dok	4	4	4.966.103.602,00	4	2.735.505.530,82	4	2.804.079.615,01	4	2.854.524.374,88	4	2.906.196.094,09	4	2.956.668.739,38
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan															



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
KECAMATAN KIARACONDONG KOTA BANDUNG  
TAHUN 2025 - 2029**

Bidang Urusan/ Program/Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun											
			2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			Kinerja	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Kelurahan yang memenuhi data profil Kelurahan di bidang Kesejahteraan Sosial	%	N/A	N/A	2.422.871.454,00	50	1.130.778.992,00	66,67	1.051.588.487,61	83,33	1.070.506.327,33	100	1.089.884.302,46	100	1.108.812.599,81
	Persentase pemenuhan data profil Kelurahan di bidang Kesejahteraan Sosial	%	N/A	N/A		100		100		100		100		100	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	lap	4	4	2.422.871.454,00	4	1.130.778.992,00	4	1.051.588.487,61	4	1.070.506.327,33	4	1.089.884.302,46	4	1.108.812.599,81
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan/ Kelurahan															
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Kelurahan Berdaya</b>	%	<b>100</b>	<b>N/A</b>	<b>6.775.107.385,00</b>	<b>50</b>	<b>12.325.667.304,65</b>	<b>66,67</b>	<b>12.710.185.893,94</b>	<b>83,33</b>	<b>12.938.839.271,63</b>	<b>100</b>	<b>13.173.054.146,63</b>	<b>100</b>	<b>13.401.833.921,98</b>
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Kecamatan															
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan yang menunjang Kelurahan Berdaya	keg	N/A	N/A	5.824.825.840,00	66	12.031.427.604,65	72	12.399.649.832,79	78	12.622.716.736,78	84	12.851.209.259,22	90	13.074.399.472,71



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
KECAMATAN KIARACONDONG KOTA BANDUNG  
TAHUN 2025 - 2029**

Bidang Urusan/ Program/Outco me/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satu an	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun											
			2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			Kinerja	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musrenbang di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	lembaga kemasyarakatan	N/A	N/A	211.371.500,00	4	137.788.400,00	4	149.053.442,22	4	151.734.880,03	4	154.481.538,00	4	157.164.458,08
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang terbangun	unit	62	27	2.355.818.652,00	26	8.714.640.677,96	36	8.986.406.085,43	36	9.148.069.504,19	36	9.313.665.034,86	36	9.475.417.819,80
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	pokmas/ormas	18	18	3.257.635.688,00	18	3.178.998.526,69	18	3.264.190.305,14	18	3.322.912.352,55	18	3.383.062.686,36	18	3.441.817.194,83
Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan															
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang terbina	%	100	100	950.281.545,00	100	294.239.700,00	100	310.536.061,15	100	316.122.534,85	100	321.844.887,41	100	327.434.449,27
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	lembaga kemasyarakatan	4	4	647.192.800,00	4	234.000.000,00	4	247.587.900,42	4	252.041.950,91	4	256.604.336,52	4	261.060.849,17
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	lap	2	2	303.088.745,00	2	60.239.700,00	2	62.948.160,73	2	64.080.583,94	2	65.240.550,89	2	66.373.600,10



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
KECAMATAN KIARAONDONG KOTA BANDUNG  
TAHUN 2025 - 2029**

Bidang Urusan/ Program/Outco me/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satu an	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun											
			2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			Kinerja	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan	Persentase Satlinmas Aktif Kelurahan Lingkup Kecamatan Kiaracondong	%	N/A	N/A	2.824.977.851,00	100	2.354.423.325,83	100	2.261.223.472,53	100	2.301.902.372,83	100	2.343.570.699,11	100	2.384.272.086,36
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling lingkup Kecamatan / Kelurahan															
<b>PROGRAM KORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN</b>	Persentase Satlinmas Aktif Kelurahan	%	N/A	N/A	2.824.977.851,00	100	2.354.423.325,83	100	2.261.223.472,53	100	2.301.902.372,83	100	2.343.570.699,11	100	2.384.272.086,36
	Persentase Satkamling Aktif Kelurahan	%	N/A	N/A		62,35		71,76		81,18		87,06		90,59	
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban Kecamatan															
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Satlinmas Aktif Kelurahan yang terbina	%	N/A	N/A	2.824.977.851,00	100	2.354.423.325,83	100	2.261.223.472,53	100	2.301.902.372,83	100	2.343.570.699,11	100	2.384.272.086,36
	Persentase Satkamling Aktif Kelurahan yang terbina	%	N/A	N/A		100		100		100		100			
Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah laporan koordinasi/ sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	lap	4	4	2.824.977.851,00	4	2.354.423.325,83	4	2.261.223.472,53	4	2.301.902.372,83	4	2.343.570.699,11	4	2.384.272.086,36

## **4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kiaracondong Tahun 2025-2029**

Indikator kinerja daerah secara teknis dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau kompositnya (impact). Indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan, setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Pemerintah Kota Bandung, maka Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu tahun 2025 - 2029 sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD Pemerintah Kota Bandung Tahun 2025 - 2029. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Organisasi Pemerintah Daerah dengan pemerintah, dan OPD akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen Laporan Kinerja (LKjIP) tahunan.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dalam kurun waktu periode Tahun 2025 - 2029 beserta penjelasannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.3

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**KECAMATAN KIARACONDONG**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGUKURAN	TARRGET						SATUAN	INTERPRETASI
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kewilayahan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong	Hasil pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Kecamatan. Pemenuhan standar kepatuhan pelayanan publik sesuai UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Alat ukur yang digunakan sesuai dengan Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017.	Rata-rata IKM Kecamatan dan Kelurahan dengan 9 unsur penilaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	85,75	86,00	86,25	86,50	86,75	87,00	Nilai	Semakin tinggi nilai IKM, menunjukkan masyarakat semakin puas terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kiaracondong.
		Persentase Kelurahan UTAMA Kecamatan Kiaracondong	Kelurahan disebut sebagai Kelurahan UTAMA jika memenuhi minimal 5 dari 7 (dengan No.1 Wajib) kriteria berikut: <b>1. Pemutakhiran data Laci RW</b>  <b>2. Partisipasi Kewilayahan dalam Infrastruktur Dasar Terpelihara (memenuhi 4 dari 6 kriteria)</b> a. Perbaikan jalan di lingkungan masyarakat sebesar minimal 10% dari total panjang jalan rusak (dalam meter); b. Perbaikan saluran air (drainase) di lingkungan masyarakat sebesar	Jumlah Kelurahan UTAMA dibagi dengan jumlah semua Kelurahan yang ada di Kecamatan dikali 100%	-	50,00	66,67	83,33	100	100	%	



			<p>minimal 10% dari total drainase rusak;</p> <p>c. Pemenuhan ODF 100%;</p> <p>d. Tersedianya/terbangunnya biopori/drumpori minimal sebanyak 20 titik per RW;</p> <p>e. Tersedianya PJJ/PJG pada titik rawan (berkurangnya titik rawan);</p> <p>f. Fasilitasi pembuatan sarana air bersih.</p> <p><b>3. Partisipasi Kewilayahan dalam Pemenuhan Kelurahan Memilah (memenuhi 3 dari 5 dengan kriteria a dan e menjadi kriteria wajib)</b></p> <p>a. Terbentuknya RW pemilah sampah (minimal sebesar 50% jumlah rumah setiap RW pada Kelurahan);</p> <p>b. Terdapat pengolahan sampah organik yang aktif (misalnya loseda, kang empos, bata terawang, dll) pada setiap RW;</p> <p>c. Adanya pengolahan sampah (yang aktif) melalui pemanfaatan budidaya magot/ikan lele/ayam pada tingkat Kelurahan;</p> <p>d. Terdapat pengolahan sampah melalui bank sampah yang aktif (skala Kelurahan);</p>									
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--



			<p>e. Terdapat buruan sae RW yang aktif (minimal 50% dari jumlah RW tiap Kelurahan).</p> <p><b>4. Partisipasi Kewilayahan dalam Penanganan Stunting (4 dari 5 kriteria)</b></p> <p>a. Adanya program khusus (inovasi kewilayahan) pendorong pencegahan Stunting;</p> <p>b. Terfasilitasinya makanan tambahan untuk Ibu Hamil KEK (Kurang Energi Kronis) atau yang rentan menjadi Ibu Hamil KEK;</p> <p>c. Terfasilitasinya makanan tambahan untuk Balita Stunting;</p> <p>d. Terfasilitasinya Posyandu (PMT, Insentif Kader Posyandu, pengadaan peralatan Posyandu);</p> <p>e. Tersedianya laporan TPPS Kelurahan secara berkala: ➢ Adanya SK TPPS Kelurahan; ➢ Monitoring dan Evaluasi TPPS Kelurahan; ➢ Rembug Stunting tingkat Kelurahan; ➢ Terkumpulnya data sasaran, capaian layanan dan data</p>									
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--





			<p>tindak lanjut aduan sosial masyarakat;</p> <p>f. Fasilitasi pendataan dan pelatihan bagi pengangguran di lingkup RW;</p> <p>g. Fasilitasi pelatihan bagi PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga).</p> <p><b>6. Partisipasi Kewilayahan dalam Pengembangan UMKM</b></p> <p>a. Pendataan UMKM dan UMKM Perempuan tingkat RW;</p> <p>b. Fasilitasi NIB, P-IRT, Sertifikasi Halal.</p> <p><b>7. Partisipasi Kewilayahan dalam Kesiapsiagaan Bencana</b></p> <p>a. Fasilitasi pembentukan RW Siaga Bencana;</p> <p>b. Fasilitasi Mitigasi dan Penanganan Bencana.</p>									
2	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan	Persentase Satlinmas Aktif Kelurahan Lingkup Kecamatan Kiaracandong	<p><b>Satlinmas Aktif</b></p> <p>Kriteria Satlinmas Aktif adalah secara kumulatif memiliki persyaratan - persyaratan sebagai berikut :</p> <p>1. Adanya Surat Keputusan Penetapan Struktur Organisasi Tata Kerja Satlinmas;</p>	Jumlah Satlinmas Aktif dibagi jumlah semua Satlinmas yang ada di Kecamatan dikali 100%	-	100	100	100	100	100	%	



			<ol style="list-style-type: none"><li>2. Adanya Rencana Kerja Tahunan Satlinmas;</li><li>3. Adanya Surat Perintah Penugasan Pelaksanaan Tugas Satlinmas;</li><li>4. Daftar Hadir Pelaksanaan Tugas;</li><li>5. Laporan Harian Pelaksanaan Tugas;</li><li>6. Laporan Tahunan Satlinmas;</li><li>7. Minimal mempunyai 25% satkamling tingkat RW yang aktif dengan kriteria:<ul style="list-style-type: none"><li>- Kepengurusan/Kelembagaan</li><li>- Jadwal piket/ronda</li><li>- Daftar Hadir</li><li>- Buku Laporan Kejadian</li></ul></li></ol>									
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Untuk mendukung program prioritas pembangunan daerah berdasarkan Inmendagri 2/2025 dalam mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 - 2029, Kecamatan Kiaracondong menjabarkan sub kegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.4

**SUB KEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

No	Program Prioritas Kepala Daerah	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>		
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
				<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>		
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
				<i>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</i>		
1	Optimasi pengelolaan sampah dan lingkungan hidup Bandung UTAMA			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimasi dan Penambahan Pendamping KBS dan Penyuluh Persampahan di Kewilayahan</li> <li>2. Optimasi Bandung Zero Waste</li> <li>3. Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan Sampah Terpadu</li> <li>4. Penambahan Personil dan Insentif untuk Gober dan Petugas Kebersihan</li> </ol>	
				<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>		
2	Program Terpadu Pengentasan Kemiskinan Ekstrem			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1. Inkubator Pemberdayaan Sosial Kewilayahan untuk Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	



No	Program Prioritas Kepala Daerah	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
					2. Optimasi Petugas Verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 3. Penanganan dan Pendampingan PMKS	
3	Penguatan Ketahanan Keluarga Berkualitas yang Unggul				1. Penguatan Peran Tenaga Pendamping Sosial di setiap Kewilayahan 2. Revitalisasi Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) bagi Penyandang Disabilitas	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan / Kelurahan	<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>		
				Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musrenbang di Kelurahan		
4	PRAKARSA Bandung UTAMA			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1. Program Akselerasi Prioritas Kewilayahan (PRAKARSA) Bandung UTAMA	
5	Optimasi Ketahanan dan Akses Pangan yang Cukup, Aman dan Bergizi untuk Masyarakat			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1. Optimasi Pelaksanaan Urban Farming "Buruan Sae Utama" untuk Peningkatan Perekonomian dan Ketahanan Pangan berbasis Kewilayahan 2. Pendukung Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)	
				<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</i>		
6	Penguatan Ketahanan Keluarga Berkualitas yang Unggul			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1. Nyaaah Ka Indung : Pemberdayaan Ekonomi Mandiri	



No	Program Prioritas Kepala Daerah	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
					2. Edukasi Pra-Nikah bagi Calon Pengantin 3. Program Terpadu Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	
7	Pembentukan UMKM Center UTAMA dan Pengembangan industri ekonomi kreatif			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1. Kemudahan Akses dan Insentif Perizinan, NIB, UMKM, dan Usaha Wisata (Resto dan Hotel) 2. Mendirikan Inkubasi Bisnis di 30 Kecamatan 3. UMKM Center di 30 Kecamatan 4. Pusat Gastronomi di 30 Kecamatan 5. Pembentukan, Pengawasan, dan Pembinaan Koperasi Merah Putih (KMP)	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	<i>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</i>		
8	Pengendalian bencana hidrometeorologi peningkatan ketangguhan kota			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1. Meningkatkan Peran Linmas dan Gober untuk Mitigasi Kebencanaan dan Hidrometeorologi	
9	Peningkatan Kualitas dan Layanan Infrastruktur Jalan, Trotoar dan Penerangan Jalan Umum				1. Penegakkan Peraturan dan Penataan Zona PKL	
10	Terjaganya kondusivitas daerah				1. Penguatan Linmas dan Satpol PP Kota Bandung	

## BAB 5

### PENUTUP

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Kiaracondong sebagai salah satu unit kerja yang strategis dan menunjang pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Bandung, maka Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kiaracondong ini merupakan dokumen perencanaan bidang/urusan pemeritahan umum diantaranya pelayanan pembinaan pemberdayaan masyarakat, memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan, memfasilitasi kegiatan peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup masyarakat, memfasilitasi Kegiatan peningkatan perekonomian masyarakat seperti pembinaan UKM dan Koperasi dan pembinaan/sosialisasi peluang usaha, mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum serta memfasilitasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum dikewilayahan, dan pelayanan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dilaksanakan dengan mengkoordinasikan kegiatan penerapan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah untuk periode tahun 2025 - 2029.

Rencana Strategis (Renstra) ini disusun untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung tahun 2025 – 2029 dalam rangka mewujudkan visi kota Bandung yaitu *"Mewujudkan Kota Bandung yang Unggul, Terbuka, Amanah, Maju dan Agamis Melalui Pemerintahan yang Berorientasi Melayani serta Berkelanjutan dalam Mendukung Pembangunan Nasional"*.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kiaracondong ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Kecamatan Kiaracondong. Karena itu, rencana strategis ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Kecamatan Kiaracondong serta digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD Kota Bandung. Adapun Rencana Kerja dan RKA

Kecamatan Kiaracondong periode tahun 2025 – 2030 adalah sebagai berikut :

1. Tahun 2025 Kecamatan Kiaracondong berfokus pada penyelesaian perbaikan penerangan jalan lingkungan; memfasilitasi penguatan sistem persampahan melalui optimalisasi pemilahan sampah, RW KBS, bank sampah dan pengolahan sampah lainnya; perbaikan dan pembangunan jalan lingkungan guna memperlancar konektivitas dan mobilitas masyarakat; penguatan infrastruktur pendukung lain seperti drainase (untuk mencegah banjir) dan sarana air bersih.
2. Tahun 2026 Kecamatan Kiaracondong berfokus pada penyelesaian memfasilitasi penguatan sistem persampahan melalui optimalisasi pemilahan sampah, RW KBS, bank sampah dan pengolahan sampah lainnya; fasilitasi penanganan stunting; fasilitasi pengembangan ruang publik di tingkat Kecamatan/ Kelurahan; fasilitasi peningkatan pelayanan publik berorientasi melayani dengan pemanfaatan teknologi.
3. Tahun 2027 Kecamatan Kiaracondong berfokus pada penyelesaian fasilitasi penanganan stunting; Fasilitasi pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif: akses pembiayaan, pelatihan kewirausahaan, pendampingan inovasi produk, serta promosi; Fasilitasi peningkatan keterampilan (vocational training) bagi angkatan kerja agar sesuai kebutuhan industri.
4. Tahun 2028 Kecamatan Kiaracondong berfokus pada penyelesaian fasilitasi penanganan stunting; digitalisasi dan kota cerdas: mengintegrasikan teknologi informasi dalam berbagai layanan; fasilitasi pengembangan destinasi dan event pariwisata (Opsional); pemberdayaan ekonomi kreatif yang terintegrasi dengan pariwisata.
5. Tahun 2029 Kecamatan Kiaracondong berfokus pada penyelesaian fasilitasi penanganan stunting; Integrasi nilai agamis dan budaya dalam pembangunan: memastikan bahwa kemajuan fisik dan ekonomi kota tetap diimbangi dengan penguatan nilai-nilai agamis dan moral masyarakat.
6. Tahun 2030 Kecamatan Kiaracondong berfokus pada penyelesaian penguatan ekonomi berkelanjutan: konsolidasi sektor unggulan

(pariwisata, ekonomi kreatif, digital) agar terus tumbuh inklusif dan tangguh; penguatan ketahanan dan keamanan sosial masyarakat melalui penguatan sistem perlindungan sosial, pengurangan kesenjangan wilayah dan ekonomi; penguatan nilai-nilai kebhinekaan, toleransi, budaya lokal, dan etika sebagai pilar integrasi sosial Bandung yang Unggul, Terbuka, Amanah, Maju dan Agamis; penguatan kelembagaan dan perencanaan berbasis data untuk memastikan kesinambungan pembangunan kota.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kiaracondong yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Kecamatan Kiaracondong harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) Kecamatan Kiaracondong. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Kecamatan Kiaracondong di masa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kiaracondong ini.

Bandung, 13 November 2025

  
**CAMAT KIARAONDONG**  
*[Handwritten Signature]*

Mochamad Arief Budiman, S.STP  
Pembina Tk I/IV b  
NIP. 197712171996121001



# POHON KINERJA KECAMATAN KIARAONDONG

Meningkatnya peran inovasi daerah dalam meningkatkan daya saing daerah dan Meningkatkan ketentraman daerah

**Indikator : 1. Indeks Inovasi Daerah**

**2. Indeks Ketentraman**

OUTCOME

KINERJA STRATEGIS

KINERJA TACTICAL PROGRAM

KINERJA OPERASIONAL KEGIATAN

KINERJA OPERASIONAL KEGIATAN

- Pengelolaan Sampah skala RW (RW KBS) (Dinas Lingkungan Hidup)
- Partisipasi kewilayahan terhadap penanganan stunting (Dinas Kesehatan dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)
- Partisipasi Kewilayahan dalam Penanganan Kemiskinan (Dinas Sosial)
- Partisipasi kewilayahan dalam pengembangan UMKM (Dinas KUMKM)
- Pemenuhan Profil Kelurahan (Dinas Kependudukan, Bagian Tata Pemerintahan)
- Kesiapsiagaan bencana (BPBD)

CROSSCUTTING DENGAN PD LAIN SEBAGAI MITRA

Meningkatnya partisipasi masyarakat Kecamatan dalam pembangunan lingkup Kecamatan/Kelurahan

**Indikator: Persentase Kelurahan Berdaya**

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan

**Indikator: Persentase Kelurahan Unggul**

Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah

**Indikator 1: Nilai SAKIP Perangkat Daerah**

**Indikator 2: Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselesaikan dengan baik**

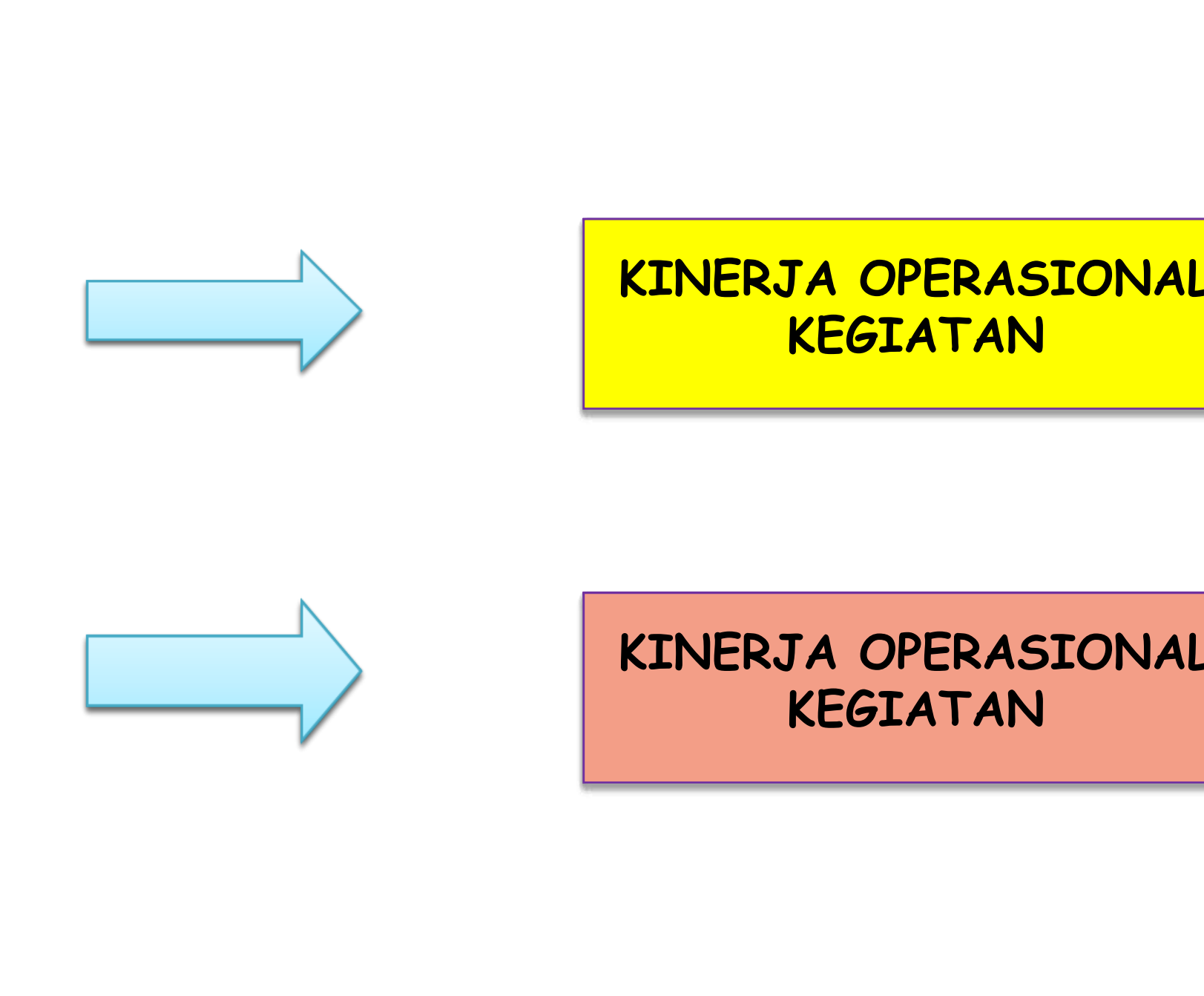
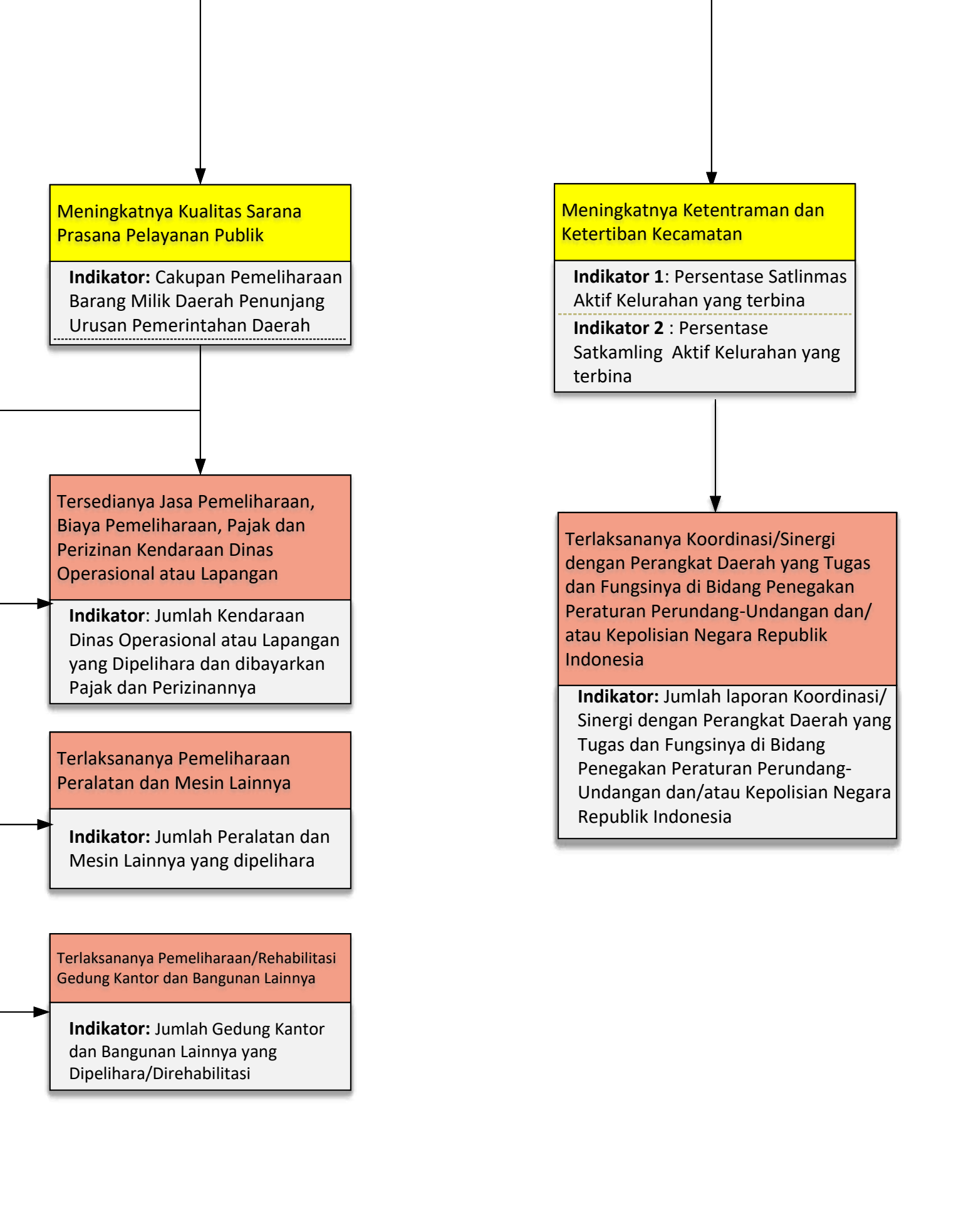
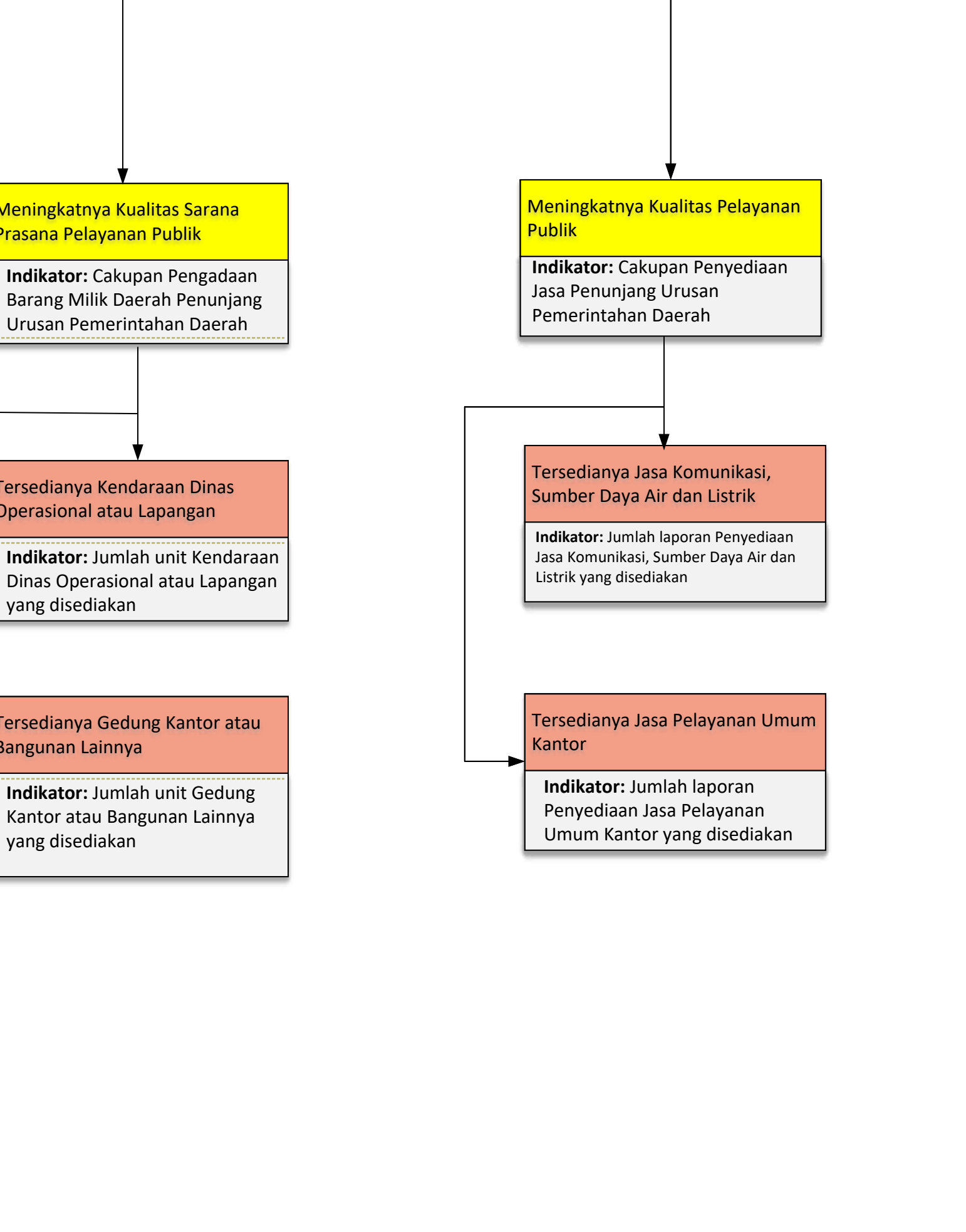
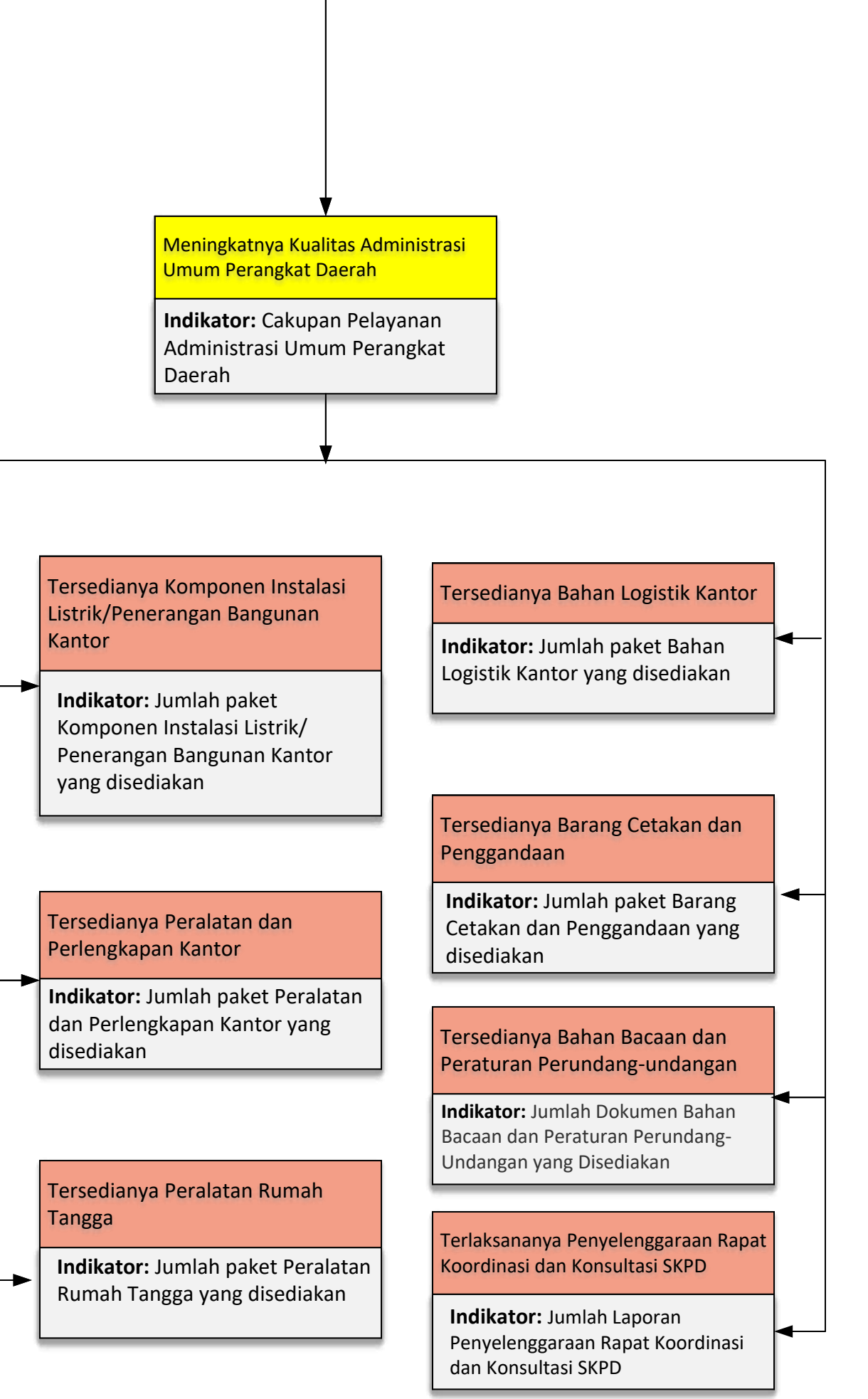
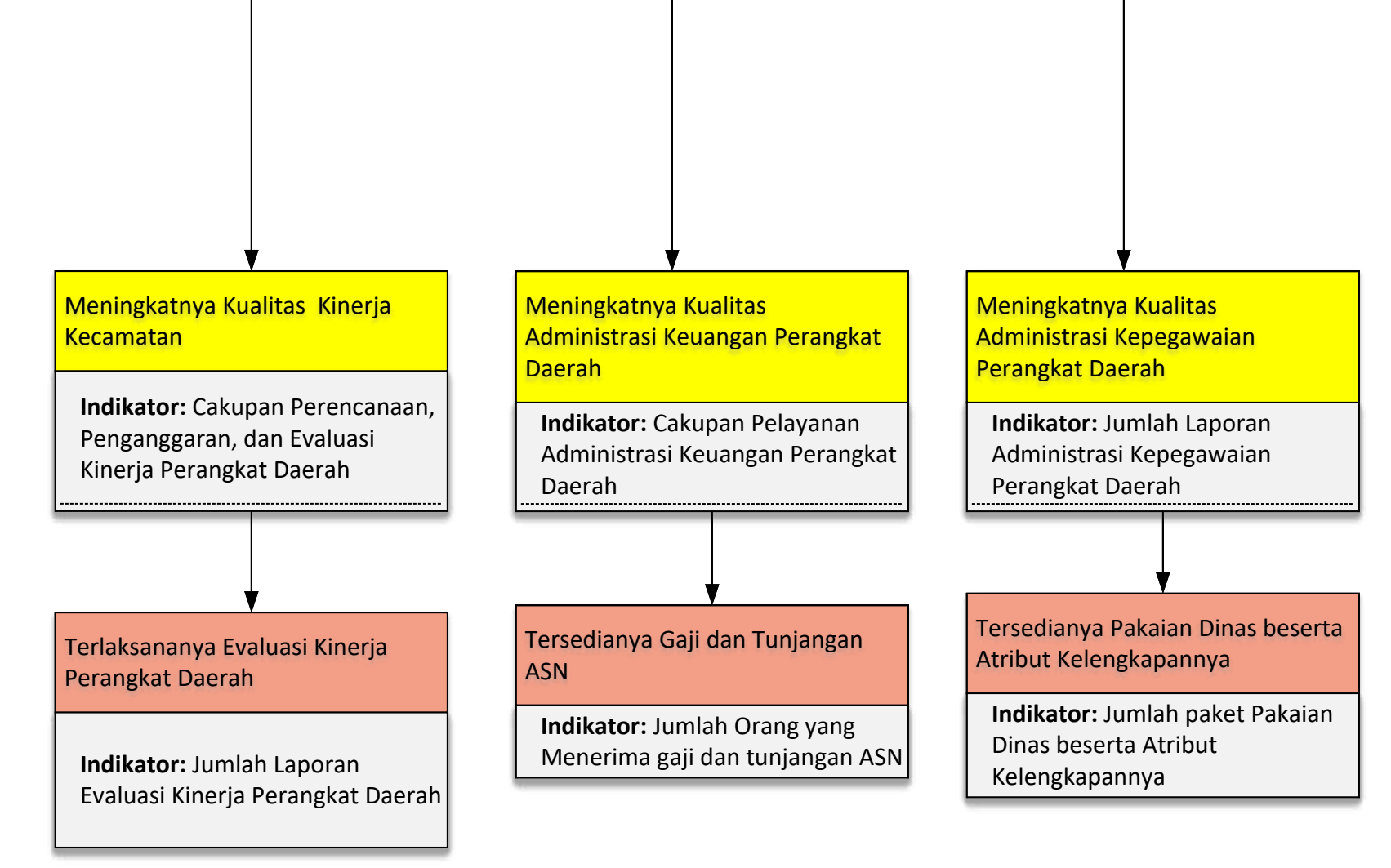
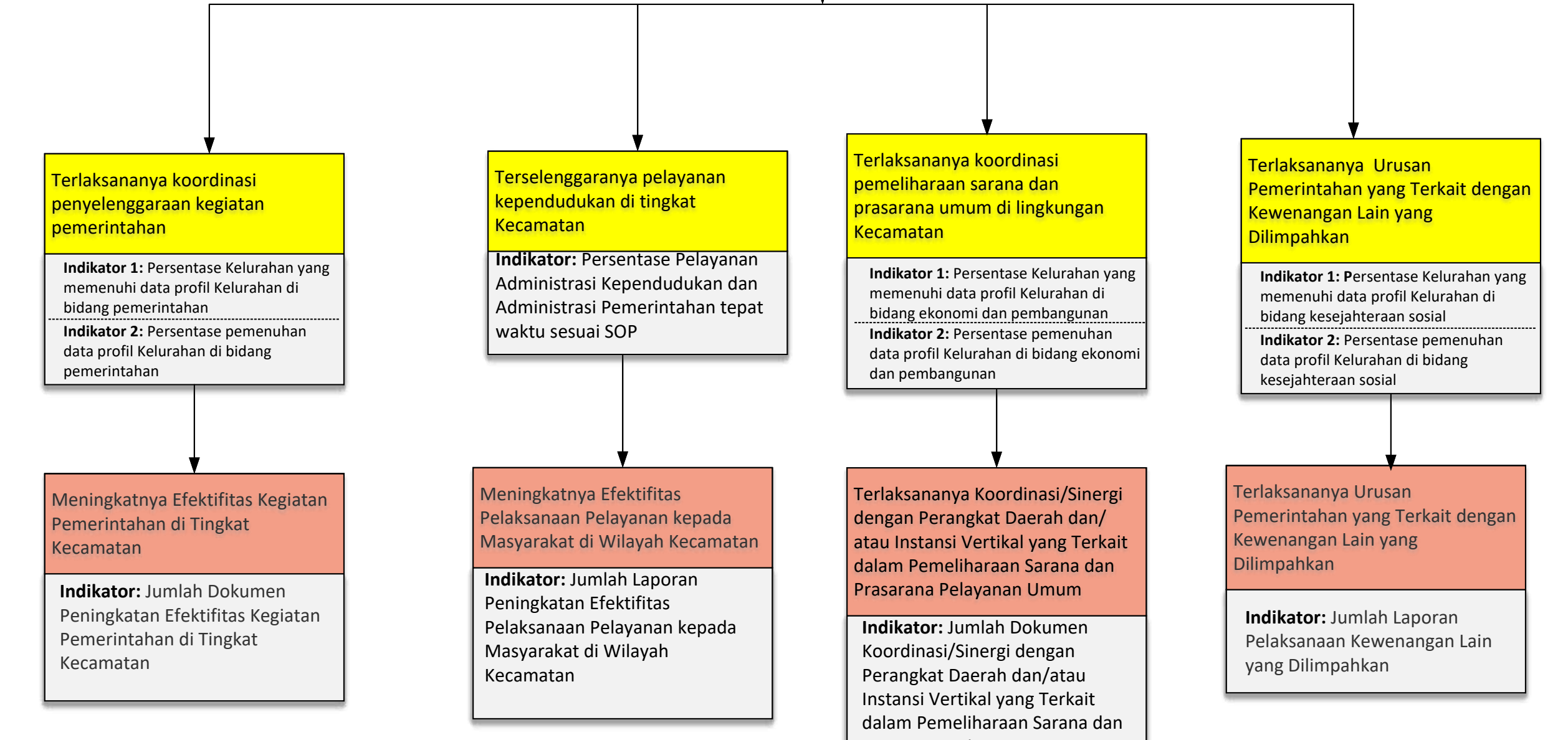
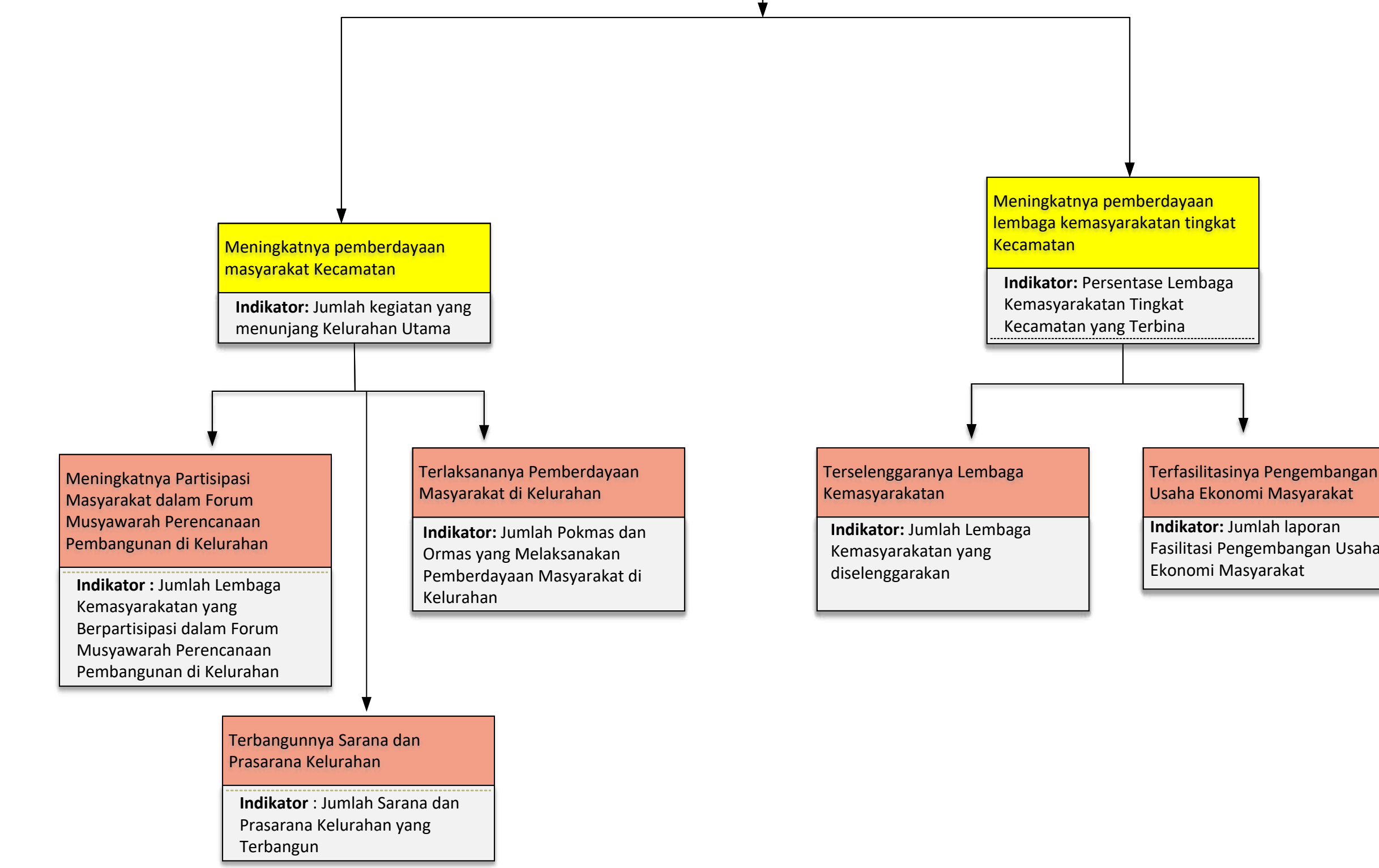
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan

**Indikator : Persentase Satlimas Aktif**

Meningkatnya Penyelenggaraan Satlimas dan Satkamling lingkup Kecamatan

**Indikator 1: Persentase Satlimas Aktif Kelurahan**

**Indikator 2: Persentase Satkamling Aktif Kelurahan**



CROSSCUTTING DENGAN PD LAIN SEBAGAI MITRA

- SATPOL PP:
- Koordinasi terkait ketentraman dan ketertiban umum
  - Dukungan teknis pengamanan lingkungan dan mobilisasi masyarakat dalam gangguan bencana